



# LAPORAN KEUANGAN

## *AUDITED 2021*

KEMENTERIAN DESA,  
PEMBANGUNAN DAERAH  
TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI



**BAGIAN ANGGARAN 067**

Jl. TMP Kalibata No.17, Jakarta Selatan, 12750, DKI Jakarta

Telp : 021 - 7994372

[Kemendesago.id](http://Kemendesago.id)



# LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI

# 2021 AUDITED

## LAPORAN REALISASI ANGGARAN (Milyar Rupiah)

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja dalam basis kas.

	261,99%	98,23%	95,19%	93,18%	% Thd Anggaran
	2,42 M	257,91 M	2.781,32 M	49,97 M	Anggaran
	6,34 M	253,34 M	2.647,57 M	46,57 M	Realisasi
Penerimaan Negara Bukan Pajak		Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	

## LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional disusun menggunakan basis akrual, menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan. Selisih dari Pendapatan dengan Beban dari Kegiatan Operasional dan Kegiatan Non Operasional serta Pos Luar Biasa akan menghasilkan Surplus/Defisit LO yang akan disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

	Pendapatan	1,90 M
	Beban Operasional	2.896,87 M
	Defisit Keg. Non Operasional	(51,70 M)
	Defisit LO	(2.946,67 M)

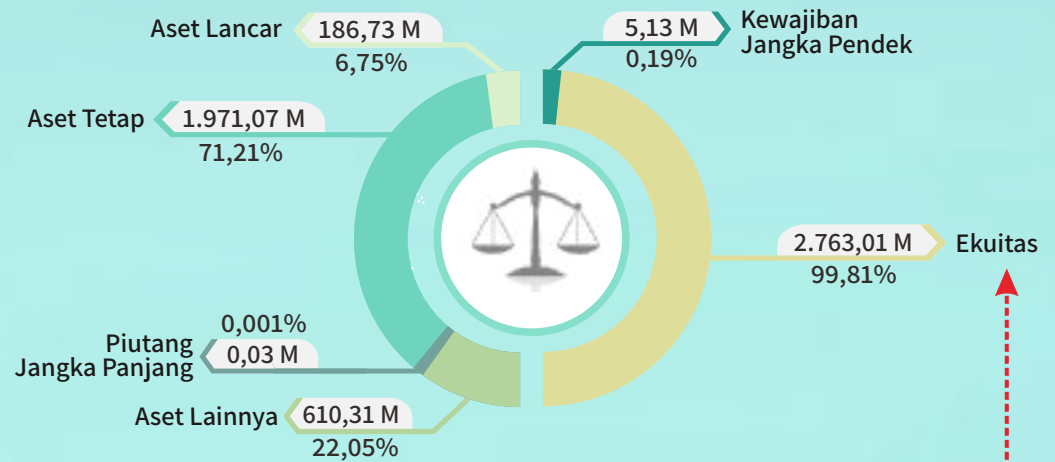
## LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi saldo awal, kenaikan atau penurunan dan saldo akhir ekuitas selama satu periode pelaporan.

	Ekuitas Awal	2.739,05 M
	Defisit LO	(2.946,67 M)
	Koreksi yang +/- Ekuitas	29,38 M
	Transaksi Antar Entitas	2.941,25 M
	Kenaikan/Penurunan Ekuitas	23,96 M
	Ekuitas Akhir	2.763,01 M

## NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas per akhir periode pelaporan.



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan/analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

TDK Aset Tetap	1,19 M (5 Satker)	Rekon SP2D Bel. Modal	0,30 M (1 Satker)
TDK Aset Lainnya	0,20 M (2 Satker)	Rekon GL VS BMN	117,06 M (16 Satker)
Saldo Tidak Normal	18,11 M (8 Satker)		
Transfer Keluar/Masuk	47,24 M (33 Satker)		
Saldo Satker Inaktif	270,01 M (23 Satker)		

Keterangan  
TDK : Transaksi Dalam Konfirmasi

Laporan Keuangan Lebih Lengkap



<https://tinyurl.com/A2021KDPDPTT>  
Biro Keuangan dan BMN

## KATA PENGANTAR

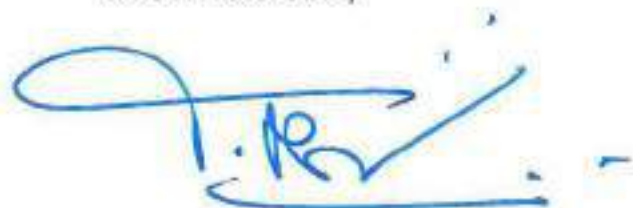
Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Tahun 2021 *Audited* Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi adalah salah satu entitas pelaporan sehingga berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2021 *Audited* mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan Tahun 2021 *Audited* ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Diharapkan Laporan Keuangan Tahun 2021 *Audited* ini dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Disamping itu, Laporan Keuangan Tahun 2021 *Audited* ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, April 2022  
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah  
Tertinggal, dan Transmigrasi  
Sekretaris Jenderal,



Taufik Madjid, S.Sos, M.Si  
NIP 19710701 199903 1 013

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
Laporan Realisasi Anggaran	3
Neraca	4
Laporan Operasional	5
Laporan Perubahan Ekuitas	6
Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	25
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	55
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	113
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	135
F. Pengungkapan Penting Lainnya	150
Lampiran dan Daftar	170



**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Laporan Keuangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2021 *Audited* sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 26 April 2022

Menteri Desa,  
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan  
Transmigrasi  
Republik Indonesia,

A handwritten signature in blue ink, which appears to read 'Abdul Halim Iskandar', written over a horizontal line.

Abdul Halim Iskandar

## RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2021 *Audited* telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

### 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021. Realisasi Pendapatan Negara per 31 Desember 2021 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp6.340.076.578,00. Realisasi Belanja per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.947.479.010.035,00 atau mencapai 95,41% dari alokasi anggaran sebesar Rp3.089.194.851.000,00.

### 2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas per 31 Desember 2021. Nilai Aset per 31 Desember 2021 dicatat dan disajikan sebesar Rp2.768.134.878.519,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp186.728.507.133,00; Aset Tetap (netto) sebesar Rp1.971.067.943.029,00; Piutang Jangka Panjang (netto) sebesar Rp29.178.573,00; dan Aset Lainnya (netto) sebesar Rp610.309.249.784,00. Nilai Kewajiban dan Ekuitas, masing-masing sebesar Rp5.128.106.901,00; dan Rp2.763.006,771,618,00.

### 3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.899.336.545,00 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp2.896.875.563.448,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional

senilai Rp2.894.976.226.903,00. Defisit Kegiatan Non Operasional dan Defisit sebelum Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp51.698.023.315,00 dan Rp2.946.674.250.218,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp2.946.674.250.218,00.

#### **4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2021 adalah sebesar Rp2.739.050.841.674,00. ditambah Defisit-LO sebesar Rp2.946.674.250.218,00, ditambah dengan koreksi-koreksi sebesar Rp29.378.813.812,00 dan transaksi antar entitas senilai total Rp2.941.251.366.350,00 sehingga Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah senilai Rp2.763.006.771.618,00.

#### **5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk 31 Desember 2021 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

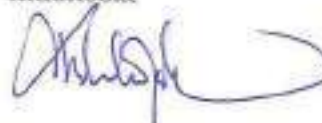
## I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2021		% Thd Angg	31 DESEMBER 2020
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
<b>PENDAPATAN</b>	B.1				
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	2.420.000.000,00	6.340.076.578,00	261,99	28.534.612.860,00
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>2.420.000.000,00</b>	<b>6.340.076.578,00</b>	<b>261,99</b>	<b>28.534.612.860,00</b>
<b>BELANJA</b>	B.2				
<b>Belanja Operasi</b>					
Belanja Pegawai	B.2.1	257.907.496.000,00	253.339.847.313,00	98,23	253.454.101.379,00
Belanja Barang	B.2.2	2.781.315.117.000,00	2.647.572.730.238,00	95,19	2.151.823.109.760,00
Belanja Modal	B.2.3	49.972.238.000,00	46.566.432.484,00	93,18	45.967.105.262,00
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>3.089.194.851.000,00</b>	<b>2.947.479.010.035,00</b>	<b>95,41</b>	<b>2.451.244.317.401,00</b>

Jakarta, 26 April 2022  
Penanggung Jawab UAPA,  
Menteri Desa Pembangunan Daerah  
Tertinggal dan Transmigrasi Republik  
Indonesia



**Abdul Halim Iskandar**


## II. NERACA

**KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI**  
**NERACA**  
**PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020
<b>ASSET</b>			
<b>ASSET LANCAR</b>			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	10.716.000,00	-
Kas Lainnya dan Setoran Kas	C.2	74.333.492,00	319.087.387,00
Piutang Bukan Pajak	C.3	1.157.977.401,00	1.381.596.736,00
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan pajak	C.4	(101.937.578,00)	(56.448.233,00)
Piutang Bukan Pajak (Neto)	C.5	1.056.039.823,00	1.325.148.503,00
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.6	145.767.100,00	160.767.100,00
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.7	(11.686.710,00)	(8.796.710,00)
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Neto)	C.8	134.080.390,00	151.970.390,00
Perediaan	C.9	185.453.337.438,00	50.163.326.511,00
<b>Jumlah Asat Lancar</b>		<b>186.728.807.132,00</b>	<b>61.861.822.791,00</b>
<b>ASSET TETAP</b>			
Tanah	C.10	701.074.345.474,00	677.730.335.000,00
Peralatan dan Mesin	C.11	401.230.930.684,00	380.904.537.930,00
Gedung dan Bangunan	C.12	603.103.929.447,00	579.526.324.551,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.13	857.833.129.707,00	808.940.560.937,00
Asat Tetap Lainnya	C.14	115.537.418.571,00	121.088.849.932,00
Konstruksi dalam Pelebaran	C.15	17.670.622.384,00	30.177.236.114,00
AKUMULASI PENYUSUTAN	C.16	(725.372.452.628,00)	(600.262.391.761,00)
<b>Jumlah Asat Tetap</b>		<b>1.971.067.943.029,00</b>	<b>1.997.934.498.703,00</b>
<b>PIUTANG JANGKA PANJANG</b>			
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.17	30.714.287,00	32.714.287,00
Penyisihan Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.18	(1.535.714,00)	-
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Neto)	C.19	29.178.573,00	32.714.287,00
<b>Jumlah Piutang Jangka Panjang</b>		<b>29.178.873,00</b>	<b>32.714.287,00</b>
<b>ASSET LAINNYA</b>			
Asat Tidak Berwujud	C.20	9.304.664.004,00	7.737.984.754,00
Asat Lain-lain	C.21	1.428.971.979.371,00	1.550.857.892.252,00
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Asat Lainnya	C.22	(827.967.413.591,00)	(852.115.441.671,00)
<b>Jumlah Asat Lainnya</b>		<b>610.309.249.784,00</b>	<b>706.480.438.335,00</b>
<b>JUMLAH ASSET</b>		<b>2.768.134.878.819,00</b>	<b>2.768.209.178.116,00</b>
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.23	4.336.743.309,00	16.440.891.026,00
Pendanaan Diterima Dimuka	C.24	739.320.242,00	817.445.416,00
Utang Muka dari KPPN	C.25	10.716.000,00	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.26	1.327.350,00	-
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>		<b>5.128.106.901,00</b>	<b>17.258.336.442,00</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>5.128.106.901,00</b>	<b>17.258.336.442,00</b>
<b>EKUITAS</b>			
Ekuitas	C.27	2.763.005.771.618,00	2.739.950.841.674,00
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>2.763.005.771.618,00</b>	<b>2.739.950.841.674,00</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>2.768.134.878.819,00</b>	<b>2.768.209.178.116,00</b>

Jakarta, 26 April 2022  
 Penanggung Jawab UAPA,  
 Menteri Desa Pembangunan Daerah  
 Tertinggal dan Transmigrasi Republik  
 Indonesia



Abdul Halim Iskandar

### III. LAPORAN OPERASIONAL

**KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI**  
**LAPORAN OPERASIONAL**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>			
<b>PENDAPATAN</b>			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	1.899.336.545,00	1.269.876.614,00
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>1.899.336.545,00</b>	<b>1.269.876.614,00</b>
<b>BEBAN</b>			
Beban Pegawai	D.2	253.339.847.313,00	253.484.161.379,00
Beban Persediaan	D.3	25.558.272.960,00	13.234.223.405,00
Beban Barang dan Jasa	D.4	1.986.396.103.325,00	1.907.198.482.580,00
Beban Pemeliharaan	D.5	43.154.768.245,00	35.200.161.942,00
Beban Perjalanan Dinas	D.6	223.764.933.002,00	118.683.325.096,00
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	199.388.318.251,00	361.266.031.446,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.8	165.222.108.471,00	165.317.408.357,00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.9	51.191.861,00	62.796.885,00
<b>JUMLAH BEBAN</b>		<b>2.896.875.563.448,00</b>	<b>2.882.416.731.100,00</b>
<b>SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>		<b>(2.894.978.225.903,00)</b>	<b>(2.851.156.854.486,00)</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>			
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Nonlancar		(53.661.107.168,00)	(224.982.995.804,00)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		209.807.086,00	437.368.190,00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		55.870.914.254,00	225.420.363.994,00
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		1.963.083.853,00	27.325.473.227,00
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		1.963.083.853,00	27.858.359.110,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	529.885.873,00
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	D.10	<b>(51.698.023.318,00)</b>	<b>(197.657.822.567,00)</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>		<b>(2.946.674.250.218,00)</b>	<b>(3.048.814.377.053,00)</b>
Pos Luar Biasa		-	-
<b>SURPLUS/DEFISIT LO</b>	D.10	<b>(2.946.674.250.218,00)</b>	<b>(3.048.814.377.053,00)</b>

Jakarta, <sup>26</sup> April 2022  
 Penanggung Jawab UAPA,  
 Menteri Desa Pembangunan Daerah  
 Tertinggal dan Transmigrasi Republik  
 Indonesia



**Abdul Halim Iskandar**


#### IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020
EKUITAS AWAL	E.1	2.739.050.841.674,00	3.438.288.220.906,00
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(2.946.674.250.218,00)	(3.048.814.377.053,00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEELJAKAN AKUNTANSI	E.3.1	-	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS		<b>29.378.813.812,00</b>	<b>(81.705.669.944,00)</b>
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	-	(385.159.615,00)
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	E.3.4	(116.816.479,00)	13.072.234.927,00
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.5	-	20.896.734.600,00
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	E.3.6	26.241.018.426,00	(22.357.017.084,00)
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.7	3.254.611.865,00	(92.932.462.772,00)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	2.941.251.366.350,00	2.431.282.667.765,00
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		23.955.929.944,00	(699.237.379.232,00)
<b>EKUITAS AKHIR</b>	<b>E.5</b>	<b>2.763.006.771.618,00</b>	<b>2.739.050.841.674,00</b>

Jakarta, 26 April 2022  
 Penanggung Jawab UAPA,  
 Menteri Desa Pembangunan Daerah  
 Tertinggal dan Transmigrasi Republik  
 Indonesia



**Abdul Halim Iskandar**

## V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### A. PENJELASAN UMUM

#### A.1. Profil dan Kebijakan Teknis

*Dasar Hukum  
Entitas dan  
Rencana  
Strategis*

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2015, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Fungsi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, yakni:

- a) Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, pengembangan daerah tertentu, pembangunan daerah tertinggal, penyiapan, pembangunan permukiman, dan pengembangan kawasan transmigrasi;
- b) Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- c) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;
- d) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- e) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- f) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta pengelolaan informasi di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan,

pemberdayaan masyarakat desa, pengembangan daerah tertentu, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi;

- g) Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Untuk mewujudkan NAWACITA, khususnya Cita ke-3 yaitu: “Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan”, terdapat target sasaran strategis tahun 2020 sampai dengan 2024 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yaitu:

- a) Berkembangnya status pembangunan desa menjadi desa mandiri;
- b) Meningkatnya status perkembangan kawasan Perdesaan;
- c) Penurunan angka kemiskinan di pedesaan
- d) Terevitalisasinya Badan Usaha Milik Desa (BUM Des)
- e) Terevitalisasinya Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM Desma)
- f) Meningkatnya investasi di Perdesaan mendukung transformasi ekonomi
- g) Meningkatnya status perkembangan Kawasan Transmigrasi yang direvitalisasi
- h) Terentaskannya daerah tertinggal
- i) Menurunnya penduduk miskin di daerah tertinggal
- j) Meningkatnya rata-rata IPM di daerah Tertinggal
- k) Meningkatnya SDM desa dan perdesaan daerah tertinggal dan transmigrasi.

Sebagai entitas pelaporan Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi merupakan gabungan dari beberapa entitas pelaporan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-EI), yaitu:

KODE SATKER	NAMA SATKER
067 02	Inspektorat Jenderal
067 03	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Pedesaan
067 04	Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
067 05	Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu (*)
067 06	Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal
067 07	Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi
067 08	Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi (*)
067 09	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
067 10	Sekretariat Jenderal
067.11	Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

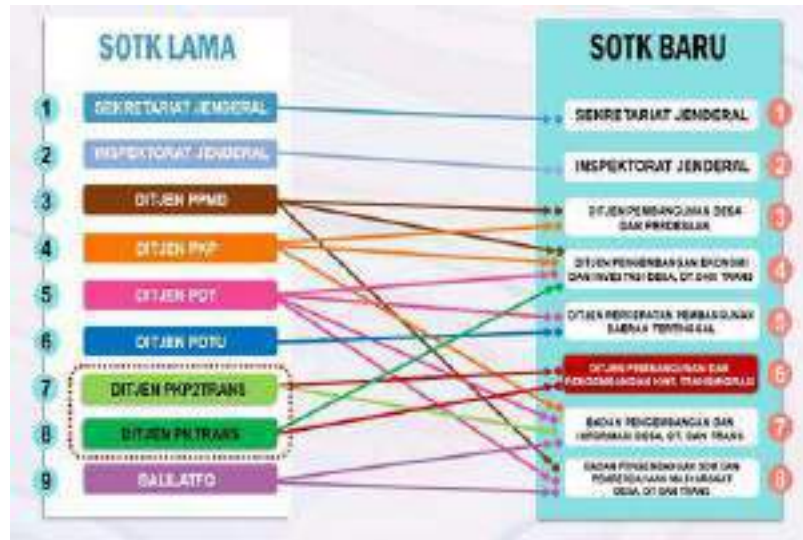
Ket:

(\*) Unit Kerja Eselon 1 yang dilikuidasi

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi terdiri dari 8 UKE 1 dan 2 UKE-1 yang dilikuidasi dengan jumlah satker berdasarkan aplikasi e-Rekon adalah sebanyak 127 Satker yang merupakan satker aktif dengan rincian sebagai berikut:

No	Kode E1	Nama UKE 1	Total Satker
1	06702	Inspektorat Jenderal	1
2	06703	Ditjen PDP	34
3	06704	Ditjen PEID	6
4	06705	Ditjen PDTu	1
5	06706	Ditjen PPDT	1
6	06707	Ditjen PPKTrans	70
7	06708	Ditjen PKTrans	1
8	06709	BPSDM	11
9	06710	Setjen	1
10	06711	BPI	1
<b>Total</b>			<b>127</b>

Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengalami perubahan berdasarkan Permendesa Nomor 15 Tahun 2020 tanggal 26 Oktober 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, sehingga pada Tahun Anggaran 2021, SOTK sudah berdasarkan aturan yang baru dengan perubahan dijelaskan pada tabel berikut:



Ditjen PDP menggunakan kode 067.03 yang merupakan perubahan nomenklatur dari Ditjen PPMD pada tahun 2020. Ditjen PEID menggunakan kode 067.04 yang merupakan perubahan nomenklatur dari Ditjen PKP pada tahun 2020. Ditjen PDTu dan Ditjen PDT melebur jadi 1 menjadi Ditjen PPDT dengan menggunakan kode 067.06 yang merupakan kode lama Ditjen PDT. Ditjen PKP2Trans dan Ditjen PKTrans melebur jadi 1 menjadi Ditjen PPKTrans dengan menggunakan kode 067.07 yang merupakan kode lama Ditjen PKP2Trans. BPSDM menggunakan kode 067.09 yang merupakan perubahan nomenklatur dari Balilatfo pada tahun 2020. Terdapat UKE-1 baru yang menggunakan kode 067.11 yaitu Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (BPI).

### A.1.1 Prioritas Nasional

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2020 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021, pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi terdapat alokasi anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada Prioritas Nasional PN I, PN II, PN V, PN VI.

a) PN I : Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Pagu

anggaran PN I adalah Rp739.568.000,00 dan total realisasi sebesar Rp736.026.452,00;

b) PN II : Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Pagu anggaran PN II adalah Rp2.214.425.536.052,00 dan total realisasi sebesar Rp2.120.774.712.996,00;

c) PN V : Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Pagu anggaran PN V adalah Rp10.000.000.000,00 dan total realisasi sebesar Rp9.640.386.318,00;

d) PN VI : Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim. Pagu anggaran PN VI adalah Rp23.505.007.000,00 dan total realisasi sebesar Rp23.472.597.739,00.

Adapun rincian Program Prioritas Nasional sebagaimana terlampir.

#### **A.1.2 Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Program Pemulihan Ekonomi Nasional (Program PEN), Program PEN adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan ekonomi nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi Covid-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi terdapat program PEN pada sektor Dukungan Sektoral K/L dengan program sebagai berikut:

a) Desa Wisata dengan kegiatan Pengembangan Objek Wisata Mendukung Destinasi Super Prioritas dan Pengembangan Amenitas Wisata di Daerah Tertinggal mendukung Destinasi Super Prioritas. Program ini dilaksanakan oleh Ditjen PDP dengan pagu anggaran Rp49.000.000.000,00;

b) Rehabilitasi Mangrove dengan kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat dan Konservasi Kawasan atau

Rehabilitasi Ekosistem (Pembibitan/Persemaian *Mangrove* dan Penanaman/Rehabilitasi *Mengrove*). Program ini dilaksanakan oleh Ditjen PPDT dengan pagu anggaran Rp23.278.410.000,00 yang merupakan tambahan anggaran atau pergeseran anggaran dari BA-BUN sesuai surat Menteri Keuangan No. S-36/MK.2/2021 perihal Penetapan Satuan Anggaran Bagian Anggaran dari BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya BA Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk Rehabilitasi Lahan *Mangrove*;

- c) Ketahanan Pangan dengan kegiatan Rencana Perwujudan Kawasan Transmigrasi, Perpindahan Penempatan Transmigrasi, Mediasi dan Kerjasama antar Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Transmigrasi, Bantuan Sarana Produksi Pertanian, Bantuan Sarana Prasarana Utilitas yang dibangun dan ditingkatkan di Kawasan Transmigrasi. Program ini dilaksanakan oleh Ditjen PPKTrans dengan pagu anggaran Rp146.391.179.000,00.

Berikut besaran alokasi anggaran dan realisasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) adalah sebagai berikut:

*Anggaran dan Realisasi Program PEN berdasarkan jenis Program Kegiatan*

*(Dalam Rupiah)*

Program	Pagu Anggran	Realisasi	%	Target Output	Capaian Output	%
Desa Wisata	49.000.000.000,00	48.878.617.670,00	99,75	96 Unit	96 Unit	100,00
Rehabilitasi Mangrove	23.278.410.000,00	23.246.001.439,00	99,86	1600 org & 500 Hektar	1600 org & 500 Hektar	100,00
Ketahanan Pangan	146.391.179.000,00	105.918.937.082,00	72,35	532 NSPK/Keluarga	257 NSPK/Keluarga	48,31
<b>Jumlah</b>	<b>218.669.589.000,00</b>	<b>178.043.556.191,00</b>	<b>81,42</b>			

*Anggaran dan Realisasi Program PEN berdasarkan jenis program dan jenis Belanja*

*(Dalam Rupiah)*

Program	Pagu Anggran		Realisasi	
	Belanja Barang	Belanja Modal	Belanja Barang	Belanja Modal
Desa Wisata	49.000.000.000,00	-	48.878.617.670,00	-
Rehabilitasi Mangrove	23.278.410.000,00	-	23.246.001.439,00	-
Ketahanan Pangan	137.014.054.000,00	9.377.125.000,00	99.451.084.571,00	6.467.852.511,00
<b>Jumlah</b>	<b>209.292.464.000,00</b>	<b>9.377.125.000,00</b>	<b>171.575.703.680,00</b>	<b>6.467.852.511,00</b>

## A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

### *Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan*

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 *Audited* ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Entitas yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan Laporan Operasional serta laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Penyusunan Laporan Keuangan tingkat Satker menggunakan Aplikasi SAIBA yang selanjutnya melakukan *upload* dari Aplikasi SAIBA ke Aplikasi e-Rekon-LK, Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Eselon I dan Tingkat Kementerian disusun dengan mengunduh dari Aplikasi e-rekon-LK Satker. Dalam penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2021 *Audited* berpedoman pada:

- Peraturan Menteri Keuangan 222/PMK.05/2016 tentang perubahan atas PMK Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian LKKL, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat;
- Mulai tahun 2016 sesuai Surat Dirjen Perbendaharaan

Nomor S-5568/PB/2016 tanggal 14 Juli 2016 tentang Pedoman Rekonsiliasi tidak lagi dilakukan proses Rekonsiliasi antara UAPA dengan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Proses rekonsiliasi hanya dilakukan oleh satker dengan KPPN setempat;

- Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor: S-369/PB/2020 tanggal 27 April 2020 tentang Pemutakhiran Akun dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19;
- Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor: S-27/PB/PB.6/2021 tanggal 31 Desember 2021 perihal Jadwal Rekonsiliasi, Penyusunan, dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) Tahun 2021 *Audited* serta perlakuan akuntansi atas Transaksi Akhir Tahun;
- Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor: S-3/PB/PB.6/2022 tanggal 25 Januari 2022 perihal Rilis Aplikasi SAIBA Versi 21.1.0 dan SIMAK BMN Versi 21.1.0 dalam rangka Penyusunan LKKL *Audited* Tahun 2021.
- Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor: S-16/PB/PB.6/2022 tanggal 25 Maret 2022 perihal Rilis Update Aplikasi SAIBA Versi 21.1.0 dan SIMAK BMN Versi 21.2.0 dalam rangka Penyusunan LKKL Tahun 2021 *Audited*.

### **A.3. Basis Akuntansi**

#### *Basis Akuntansi*

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang

mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

#### **A.4. Dasar Pengukuran**

##### *Dasar Pengukuran*

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

#### **A.5. Kebijakan Akuntansi**

##### *Kebijakan Akuntansi*

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2021 *Audited* telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Di samping itu, dalam penyusunannya telah

diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:

**a) Pendapatan- LRA**

*Pendapatan-  
LRA*

- 1) Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- 2) Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- 3) Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

**b) Pendapatan- LO**

*Pendapatan-LO*

- 1) Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal adalah sebagai berikut:
  - o Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
  - o Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
  - o Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- 2) Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- 3) Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

**c) Belanja***Belanja*

- 1) Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- 2) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- 3) Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

**d) Beban***Beban*

- 1) Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- 2) Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

**e) Aset***Aset*

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset Lainnya.

**1) Aset Lancar***Aset Lancar*

- a. Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- b. Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- c. Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Adapun perhitungan penyisihannya sesuai dengan PMK Nomor 69/PMK.06/2014 Tentang Penentuan Kualitas Piutang Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara dan PMK Nomor 207/PMK.06/2019 Tentang Perubahan atas PMK Nomor 69/PMK.06/2014 Tentang Penentuan Kualitas Piutang Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara adalah:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%

Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- d. Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- e. Nilai Persediaan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 234/PMK.05/2020 tentang Perubahan atas PMK Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat yang mengatur bahwa persediaan dinilai menggunakan metode FIFO (*First In First Out*) mulai Tahun 2021.

## 2) Aset Tetap

### *Aset Tetap*

- a. Aset tetap meliputi seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.
- b. Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- c. Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
1. Pengeluaran untuk per satuan Peralatan dan Mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  2. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
  3. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai beban kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap

lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- d. Pada Tahun 2017 dan 2018, Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Jalan, Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodifikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian Negara/Lembaga yang sedang dilaksanakan pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian kembali dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian kembali selain Tanah.
- e. Pada tahun 2019, atas hasil penilaian kembali tahun 2017 dan 2018 terdapat perbaikan/koreksi yang dilakukan untuk penyempurnaan hasil penilaian kembali agar diperoleh nilai Aset Tetap yang lebih akurat, andal, dan wajar.
- f. Berdasarkan Surat Anggota BPK Nomor 50/S/IV-XV/01/2020 tanggal 6 Januari 2020 hal Tanggapan atas Penyelesaian Tindak Lanjut Perbaikan Penilaian Kembali Barang Milik Negara Tahun 2017-2018 dinyatakan

- bahwa Pemerintah dapat menyajikan seluruh hasil penilaian kembali BMN tahun 2017-2018 beserta perbaikannya dalam LKPP tahun 2019 *Audited* sesuai mekanisme yang berlaku.
- g. Nilai Aset Tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal ini nilai Aset Tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai Aset Tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
  - h. Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
  - i. Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

### **3) Penyusutan Aset Tetap**

#### *Penyusutan Aset Tetap*

- a. Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- b. Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - 1. Tanah;
  - 2. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
  - 3. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada

Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

4. Aset Tetap Renovasi yang tidak menambah masa manfaat. Aset Tetap Renovasi (ATR) adalah aset yang berasal dari pengakuan belanja modal atas biaya renovasi aset yang bukan milik satker. Aset yang direnovasi dapat berupa Gedung dan Bangunan milik satker lain, Kendaraan milik satker lain maupun BMN Lainnya milik satker lain. (PMK Nomor 65/PMK.06/2017 Tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat).
  - c. Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
  - d. Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
  - e. Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

*Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap*

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

#### 4) Piutang Jangka Panjang

*Piutang Jangka Panjang*

- a. Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal

pelaporan.

- b. Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

## 5) Aset Lainnya

### *Aset Lainnya*

- a. Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- b. Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- c. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- d. Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

### *Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud*

<b>Kelompok Aset Tak Berwujud</b>	<b>Masa Manfaat (tahun)</b>
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- e. Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

#### **f) Kewajiban**

##### *Kewajiban*

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

##### a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

##### b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

#### **g) Ekuitas**

##### *Ekuitas*

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## **B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Selama periode berjalan per 31 Desember 2021, Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal dengan pagu awal sebesar Rp4.060.905.168.000,00 menjadi Rp3.089.194.851.000,00. Hal ini disebabkan adanya *refocussing* dan realokasi yaitu pengalihan anggaran kepada Kementerian Lain dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan terutama disebabkan adanya pandemi virus Covid-19 yang masih melanda negeri ini pada tahun 2021 serta anggaran diprioritaskan untuk Pemulihan Ekonomi Nasional.

Pengurangan anggaran di Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi dalam tahun anggaran 2021 mengalami 4 (empat) kali pengurangan sebesar Rp971.710.317.000,00. Tahap I sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor: S-30/MK.02/2021 tanggal 12 Januari 2021 perihal *Refocussing* dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021 yang difokuskan untuk penanganan Pandemi Covid-19, tahap II sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor: S-408/MK.02/2021 tanggal 18 Mei 2021 perihal Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021, tahap III sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor: S-584/MK.02/2021 tanggal 6 Juli 2021 perihal *Refocussing* dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021, tahap IV sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor: S-629/MK.02/2021 tanggal 20 Juli 2021 perihal *Refocussing* dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021 Tahap IV.

Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja dapat dilihat pada tabel berikut:

*Rincian Perubahan Anggaran Setelah Revisi  
Per Jenis Pendapatan dan Jenis Belanja  
Per 31 Desember 2021*

*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	31 Desember 2021		
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI	KENAIKAN / PENURUNAN
<b>Pendapatan</b>			
Pendapatan dari Pengelolaan BMN	2.420.000.000,00	2.420.000.000,00	-
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>2.420.000.000,00</b>	<b>2.420.000.000,00</b>	<b>-</b>
<b>Belanja</b>			
Belanja Pegawai	312.693.800.000,00	257.907.496.000,00	(54.786.304.000,00)
Belanja Barang	3.632.227.857.000,00	2.781.315.117.000,00	(850.912.740.000,00)
Belanja Modal	115.983.511.000,00	49.972.238.000,00	(66.011.273.000,00)
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>4.060.905.168.000,00</b>	<b>3.089.194.851.000,00</b>	<b>(971.710.317.000,00)</b>

Revisi tersebut antara lain berupa pengurangan belanja pegawai sebesar Rp54.786.304.000,00 yang terdiri atas pengurangan anggaran belanja gaji dan tunjangan PNS sebesar Rp32.394.755.000,00; pengurangan anggaran belanja lembur sebesar Rp4.511.047.000,00; serta pengurangan anggaran belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito sebesar Rp17.880.502.000,00.

Pengurangan pagu belanja barang sebesar Rp850.912.740.000,00 terdiri atas pengurangan anggaran Belanja Barang Operasional sebesar Rp4.062.924.000,00; pengurangan anggaran Belanja Barang Non Operasional sebesar Rp281.586.041.000,00; penambahan anggaran Belanja Barang Persediaan sebesar Rp4.694.100.000,00; pengurangan anggaran Belanja Jasa sebesar Rp221.899.532.000,00; penambahan anggaran Belanja Pemeliharaan sebesar Rp3.047.697.000,00; pengurangan anggaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebesar Rp141.558.211.000,00; pengurangan anggaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri sebesar Rp2.394.620.000,00; pengurangan anggaran Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda sebesar Rp157.266.696.000,00; pengurangan anggaran Belanja Barang Fisik dan Penunjang Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebesar Rp80.247.504.000,00; serta penambahan anggaran Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp30.360.991.000,00.

Pengurangan Belanja Modal sebesar Rp66.011.273.000,00 terdiri atas penambahan anggaran Belanja Modal Tanah sebesar Rp10.000.000,00; penambahan anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp3.151.676.000,00; pengurangan anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp10.410.193.000,00; pengurangan anggaran Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp62.575.503.000,00; serta penambahan anggaran Belanja Modal Lainnya sebesar Rp3.812.747.000,00.

Adapun rincian Perubahan Anggaran Belanja Setelah Revisi per Program per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

*Rincian Perubahan Revisi Anggaran Belanja Per Program  
Per 31 Desember 2021*

(Dalam Rupiah)

Kode	Program	Anggaran Belanja Semula	Anggaran Belanja Setelah Revisi
WA	Program Dukungan Manajemen	830.474.368.000,00	647.259.983.000,00
CT	Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	3.230.430.800.000,00	2.441.934.868.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>4.060.905.168.000,00</b>	<b>3.089.194.851.000,00</b>

Sumber dana program kegiatan berasal dari rupiah murni, pinjaman luar negeri, dan hibah luar negeri. Adapun rincian perubahan revisi anggaran belanja berdasarkan sumber dana dijelaskan sebagai berikut:

*Rincian Perubahan Revisi Anggaran Belanja  
Berdasarkan Sumber Dana  
Per 31 Desember 2021*

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 DESEMBER 2021		
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI	KENAIKAN (PENURUNAN) ANGGARAN BELANJA
Rupiah Murni	3.763.545.168.000,00	2.842.851.801.000,00	(920.693.367.000,00)
Pinjaman Luar Negeri	275.300.204.000,00	226.953.797.000,00	(48.346.407.000,00)
Hibah Luar Negeri	22.059.796.000,00	17.780.508.000,00	(4.279.288.000,00)
Hibah Langsung Luar Negeri	-	1.608.745.000,00	1.608.745.000,00
<b>Jumlah Anggaran Belanja</b>	<b>4.060.905.168.000,00</b>	<b>3.089.194.851.000,00</b>	<b>(971.710.317.000,00)</b>

Berdasarkan tabel rincian di atas, terdapat pengurangan anggaran dari Rupiah Murni sebesar Rp920.693.367.000,00. Hal ini disebabkan pengalihan anggaran untuk penanganan

pandemi Covid-19. Adapun penghematan anggaran rupiah murni terdapat pada keseluruhan program kegiatan di Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi.

Pada Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi terdapat anggaran dana pinjaman luar negeri sebesar Rp226.953.797.000,00 yang digunakan untuk program:

1. Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) di Ditjen PDP. Pada tahun 2021 Ditjen PDP memiliki pinjaman luar negeri sebesar Rp30.000.000.000,00 yang merupakan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa Subkomponen 2B: Pengembangan Kapasitas Masyarakat Dan Sistem Akuntabilitas Sosial Melalui Platform Digital;
2. Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) di BPSDM yang memiliki pagu sebesar Rp85.000.000.000,00; dimana kegiatan tersebut berada di: Puslat SDM dengan program kegiatan antara lain: Persiapan Pengembangan Desain Online Video Platform untuk Akademi Desa 4.0 dengan alokasi anggaran sebesar Rp804.659.000,00; Produksi Konten Video Pembelajaran Mandiri Berbasis Komunitas dengan alokasi anggaran sebesar Rp5.129.571.590,00; Kampanye Informasi Pembangunan Desa Yang Berdampak Pada SDGs Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.400.000.000,00; Dukungan Manajemen dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.665.769.410,00; Pusat Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan program kegiatan antara lain: Peningkatan Kapasitas dan Tata Kelola TPP dengan alokasi anggaran sebesar Rp60.000.000.000,00; Pengembangan *Learning Management System / LMS (2A) Pendamping Desa* dengan alokasi anggaran sebesar Rp10.000.000.000,00; *Workshop* Harmonisasi Regulasi Pembangunan Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.000.000.000,00; Dukungan Manajemen dengan alokasi anggaran sebesar

Rp4.000.000.000,00

3. Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) di Sekretariat Jenderal dengan pagu anggaran sebesar Rp5.000.000.000,00;
4. Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) di BPI dengan pagu anggaran sebesar Rp20.000.000.000,00;
5. Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) yang sumber pendanaannya adalah Pinjaman dan Hibah Luar Negeri melalui IFAD. Pada Tahun Anggaran 2021, dengan adanya perubahan SOTK Lama ke SOTK Baru, Kegiatan TEKAD pun berpindah yang sebelumnya dari Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Ditjen PPMD) ke Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Ditjen PEIDDTT). Program TEKAD ini menysasar pada 5 (lima) provinsi yaitu Maluku Utara, Maluku, NTT, Papua dan Papua Barat. Tahun Anggaran 2021 dari Pinjaman Luar Negeri pada kegiatan TEKAD ini memiliki anggaran pagu belanja sebesar Rp86.953.787.000,00.

Pada Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi terdapat anggaran dana hibah luar negeri sebesar Rp17.780.508.000,00 yang digunakan untuk program:

1. Program Investing In Nutrition Early Years (INEY) di Ditjen PDP dengan tujuan memfasilitasi desa dalam mendukung pelaksanaan intervensi sensitif dan intervensi spesifikasi serta terjadinya konvergensi pencegahan stunting di tingkat desa. Tahun 2021 Hibah Luar Negeri (INEY) sebesar Rp3.626.864.000,00;
2. Program Penyediaan Air Minum Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS). Pada tahun 2021 Ditjen PDP memiliki Program Penyediaan Air Minum Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) yang berasal dari sumber dana Hibah Luar Negeri sebesar dari pagu

Rp793.644.000,00;

3. Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) yang sumber pendanaannya adalah Pinjaman dan Hibah Luar Negeri melalui IFAD. Pada Tahun Anggaran 2021, dengan adanya perubahan SOTK Lama ke SOTK Baru, Kegiatan TEKAD pun berpindah yang sebelumnya dari Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Ditjen PPMD) ke Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Ditjen PEIDDTT). Program TEKAD ini menysasar pada 5 (lima) provinsi yaitu Maluku Utara, Maluku, NTT, Papua dan Papua Barat. Tahun Anggaran 2021 Hibah Luar Negeri pada kegiatan TEKAD ini memiliki anggaran pagu belanja sebesar Rp13.360.000.000,00.

Pada Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi terdapat anggaran dana hibah langsung luar negeri sebesar Rp1.608.745.000,00 di Ditjen PDP. Hibah Langsung Luar Negeri dalam bentuk uang diberikan dari United Nations Children's Fund (UNICEF). Tujuannya adalah monitoring dan penanganan anak tidak sekolah dan anak beresiko putus sekolah dampak Covid-19, pengelolaan Database Integrasi SIPBM, Pendampingan Desa Model Desa Tanggap Bencana dan Desa Peduli Iklim, Monitoring dan Evaluasi Panduan Desa Ramah Anak (PDRA). Pengajuan Pembukaan Rekening Dana Hibah Langsung UNICEF pada Bank BNI disetujui pada tanggal 28 Juni 2021 nomor surat: TEB/20.1/3242/2021 tentang konfirmasi pembukaan rekening GIRO, dengan Nomor Rekening: RPL 140 PDHL DITJEN PDP, dengan nomor registrasi hibah 2NYCWZHA.

### **B.1 Pendapatan**

Realisasi Pendapatan Negara Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp6.340.076.578,00 atau

*Realisasi  
Pendapatan  
Rp6.340.076.578,00*

mencapai 261,99% persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp2.420.000.000,00. Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2021 Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi dapat dilihat pada tabel berikut:

*Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi Pendapatan  
Per 31 Desember 2021*

*(Dalam Rupiah)*

No	Uraian Akun	Estimasi Pendapatan	Realisasi Pendapatan	% Realisasi Anggaran
1	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	420.000.000,00	526.976.180,00	125,47
2	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	209.807.086,00	-
3	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	2.000.000.000,00	738.938.378,00	36,95
4	Pendapatan Jasa Lainnya	-	276.997.097,00	-
5	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	-	13.142,00	-
6	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	-	17.000.000,00	-
7	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga	-	8.038.228,00	-
8	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	251.595.418,00	-
9	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	-	65.677.190,00	-
10	Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	-	3.803.043.285,00	-
11	Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL	-	226.267.165,00	-
12	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	-	29.930.000,00	-
13	Penerimaan kembali Persekot/Uang Muka Gaji	-	3.992.552,00	-
14	Pendapatan Anggaran Lain-lain	-	181.800.857,00	-
<b>Jumlah</b>		<b>2.420.000.000,00</b>	<b>6.340.076.578,00</b>	<b>261,99</b>

Realisasi Pendapatan Per 31 Desember 2021 sebagian besar berasal dari Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL yang merupakan pengembalian atas temuan BPK pada tahun sebelumnya.

Selanjutnya, Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2021 dibandingkan dengan 31 Desember tahun 2020 terdapat penurunan sebesar 77,78 persen. Penurunan pendapatan ini disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19 yang ditindaklanjuti dengan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berdampak pada penurunan Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan; serta Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL.

Perbandingan Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2021 dan 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

*Perbandingan Realisasi Pendapatan  
31 Desember 2021 dan 2020*

*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	REALISASI 31 Desember 2021	REALISASI 31 Desember 2020	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha	1.475.721.644,00	1.755.086.123,00	(15,92)
Pendapatan Jasa Lainnya	276.997.097,00	-	100,00
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan	25.051.370,00	38.632.870,00	(35,16)
Pendapatan Denda	251.595.418,00	229.127.375,00	9,81
Pendapatan Lain-lain	4.310.711.049,00	26.511.766.492,00	(83,74)
<b>Jumlah</b>	<b>6.340.076.578,00</b>	<b>28.534.612.860,00</b>	<b>(77,78)</b>

Realisasi Anggaran Pendapatan pada Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi Per 31 Desember 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

*Realisasi Anggaran Pendapatan Pada UKE-1  
Per 31 Desember 2021*

*(Dalam Rupiah)*

Kode	Eselon I	Estimasi	Realisasi	% Realisasi Anggaran
067.02	Inspektorat Jenderal	-	12.558.329,00	-
067.03	Ditjen PDP	-	1.589.800.933,00	-
067.04	Ditjen PEID	-	209.423.133,00	-
067.05	Ditjen PDTu	-	257.872.229,00	-
067.06	Ditjen PPDT	-	505.545.300,00	-
067.07	Ditjen PPKTrans	-	1.234.251.936,00	-
067.08	Ditjen PKTrans	-	11.435.558,00	-
067.09	BPSDM	420.000.000,00	1.060.734.476,00	252,56
067.10	Sekretariat Jenderal	2.000.000.000,00	1.389.982.864,00	69,50
067.11	BPI	-	68.471.820,00	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>2.420.000.000,00</b>	<b>6.340.076.578,00</b>	<b>261,99</b>

Rincian Jenis Pendapatan sesuai Akun Pendapatan 31 Desember 2021 dan 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

*Rincian Jenis Pendapatan Sesuai Akun  
31 Desember 2021 dan 2020*

*(Dalam Rupiah)*

KODE AKUN	URAIAN	31 DES 2021	31 DES 2020
	<b>Pendapatan PNPB Lainnya</b>		
4251	Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha		
425119	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	526.976.180,00	307.236.950,00
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	209.807.086,00	376.508.192,00
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	60.859.998,00
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	738.938.378,00	1.010.480.983,00
	<b>Jumlah Pendapatan dari Pengelolaan BMN</b>	<b>1.475.721.644,00</b>	<b>1.755.086.123,00</b>
4256	Pendapatan Jasa Lainnya		
425699	Pendapatan Jasa Lainnya	276.997.097,00	-
	<b>Jumlah Pendapatan Jasa Lainnya</b>	<b>276.997.097,00</b>	<b>-</b>
4257	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan		
425719	Pendapatan Layanan Jasa Perbankan	-	305.754,00
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	13.142,00	1.782.544,00
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara	17.000.000,00	36.544.572,00
425793	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Ketiga	8.038.228,00	-
	<b>Jumlah Pendapatan Bunga</b>	<b>25.051.370,00</b>	<b>38.632.870,00</b>
4258	Pendapatan Iuran dan Denda		
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	251.595.418,00	229.127.375,00
	<b>Jumlah Pendapatan Iuran dan Denda</b>	<b>251.595.418,00</b>	<b>229.127.375,00</b>
4259	Pendapatan Lain-Lain		1.268.441.201,00
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	65.677.190,00	356.916.816,00
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	3.803.043.285,00	24.830.282.675,00
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL	226.267.165,00	1.268.441.201,00
425931	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	29.930.000,00	55.804.300,00
425931	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	3.992.552,00	-
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	181.800.857,00	321.500,00
	<b>Jumlah Pendapatan Lain-lain</b>	<b>4.310.711.049,00</b>	<b>26.511.766.492,00</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>6.340.076.578,00</b>	<b>28.534.612.860,00</b>

Realisasi pendapatan anggaran lain-lain (425999) per 31 Desember 2021 sebesar Rp181.800.857,00. Pendapatan ini terdapat pada satker sebagai berikut:

1. Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu (05.350455) sebesar Rp381,00 berasal dari potongan pembayaran belanja pegawai atas kekurangan gaji kenaikan pangkat bulan Oktober 2020 a.n Ronny Leo, dkk sesuai SP2D Nomor 211751303000060 tanggal 11 Januari 2021.
2. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau sebesar Rp181.800.000,00 berasal dari kegiatan pembangunan Saluran Air Bersih (SAB) lanjutan perpipaan yang putus kontrak sehingga Uang Muka atas Kontrak tersebut dikembalikan ke Kas

Negara.

3. Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertentu, dan Transmigrasi (11.670892) sebesar Rp476,00 berasal dari adanya potongan pembayaran belanja pegawai atas kekurangan kenaikan gaji berkala.

## B.2. BELANJA

*Realisasi Belanja*  
Rp2.947.479.010.035,00

Realisasi Belanja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.947.479.010.035,00 atau 95,41 persen dari anggaran belanja sebesar Rp3.089.194.851.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja Per 31 Desember 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

*Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja  
Per 31 Desember 2021*

*(Dalam Rupiah)*

Uraian	31 DES 2021		
	Anggaran	Realisasi	% Realisasi
Belanja Pegawai	257.907.496.000,00	253.516.703.404,00	98,30
Belanja Barang	2.781.315.117.000,00	2.654.208.897.779,00	95,43
Belanja Modal	49.972.238.000,00	46.576.869.872,00	93,21
<b>Total Belanja Kotor</b>	<b>3.089.194.851.000,00</b>	<b>2.954.302.471.055,00</b>	95,63
Pengembalian Belanja	-	6.823.461.020,00	-
<b>Total Belanja</b>	<b>3.089.194.851.000,00</b>	<b>2.947.479.010.035,00</b>	<b>95,41</b>

Terdapat Pengembalian Belanja sebesar Rp6.823.461.020,00 berasal dari:

1. Pengembalian Belanja Gaji Pokok PNS sebesar Rp25.066.380,00;
2. Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS sebesar Rp15.873,00;
3. Pengembalian Belanja Tunjangan Struktural PNS sebesar Rp38.237.100,00;
4. Pengembalian Belanja Tunjangan Fungsional PNS sebesar Rp24.087.628,00;
5. Pengembalian Belanja Uang Makan PNS sebesar Rp948.900,00;
6. Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS sebesar Rp70.552.426,00;
7. Pengembalian Belanja Pegawai (Tunjangan

- Khusus/Kegiatan) sebesar Rp17.947.784,00;
8. Pengembalian Belanja Keperluan Perkantoran sebesar Rp10.978.314,00;
  9. Pengembalian Belanja Surat Dinas Pos Pusat sebesar Rp324.800,00;
  10. Pengembalian Belanja Honor Operasional Satuan Kerja sebesar Rp890.000,00;
  11. Pengembalian Belanja Operasional Lainnya sebesar Rp316.878,00;
  12. Pengembalian Belanja Bahan sebesar Rp106.007.406,00;
  13. Pengembalian Belanja Honor Output Kegiatan sebesar Rp22.030.000,00;
  14. Pengembalian Belanja Barang Non Operasional Lainnya sebesar Rp16.020.175,00;
  15. Pengembalian Belanja Sewa sebesar Rp22.884.000,00;
  16. Pengembalian Belanja Jasa Profesi sebesar Rp113.995.000,00;
  17. Pengembalian Belanja Jasa Lainnya sebesar Rp578.155.206,00;
  18. Pengembalian Belanja Jasa – Penanganan Pandemi COVID-19 sebesar Rp73.601.123,00;
  19. Pengembalian Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp21.824.981,00;
  20. Pengembalian Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp14.643.886,00;
  21. Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa sebesar Rp2.708.659.087,00;
  22. Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sebesar Rp50.000,00;
  23. Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota sebesar Rp1.830.565.328,00;
  24. Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota sebesar Rp1.043.533.357,00;
  25. Pengembalian Belanja Peralatan dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda sebesar Rp71.683.000,00.

26. Pengembalian Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik sebesar Rp5.000,00.

27. Pengembalian Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya sebesar Rp10.437.388,00.

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Sedangkan Rincian Anggaran dan Realisasi belanja berdasarkan program Per 31 Desember 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

*Rincian Anggaran dan Belanja Berdasarkan Program  
Per 31 Desember 2021*

*(Dalam Rupiah)*

Kode	Program	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja
WA	Program Dukungan Manajemen	647.259.983.000,00	633.042.699.982,00
CT	Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	2.441.934.868.000,00	2.314.436.310.053,00
<b>Jumlah</b>		<b>3.089.194.851.000,00</b>	<b>2.947.479.010.035,00</b>

Adapun realisasi belanja berdasarkan sumber dana kegiatan pada 31 Desember 2021 di Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi dapat dilihat pada tabel berikut:

*Rincian Anggaran dan Belanja Berdasarkan Sumber Dana  
Per 31 Desember 2021*

*(Dalam Rupiah)*

Jenis Sumber Dana	31 Desember 2021		% Realisasi
	Anggaran	Realisasi	
Rupiah Murni	2.842.851.801.000,00	2.760.779.867.989,00	97,11
Pinjaman Luar Negeri	226.953.797.000,00	181.636.197.233,00	80,03
Hibah Luar Negeri	17.780.508.000,00	3.454.200.853,00	19,43
Hibah Langsung Luar Negeri	1.608.745.000,00	1.608.743.960,00	100,00
<b>JUMLAH</b>	<b>3.089.194.851.000,00</b>	<b>2.947.479.010.035,00</b>	<b>95,41</b>

Pada Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi terdapat anggaran dana pinjaman luar negeri sebesar Rp226.953.797.000,00 yang digunakan untuk program:

1. Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) di Ditjen PDP. Pada tahun 2021 Ditjen PDP memiliki pinjaman luar negeri sebesar Rp30.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp25.284.906.619,00 atau 84,28% yang merupakan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa Subkomponen 2B: Pengembangan Kapasitas Masyarakat Dan Sistem Akuntabilitas Sosial Melalui Platform Digital;
2. Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) di BPSDM yang memiliki pagu sebesar Rp85.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp69.557.820.403,00 atau 81,83%;
3. Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) di Sekretariat Jenderal dengan pagu anggaran sebesar Rp5.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp4.958.015.544,00 atau 99,16% yang merupakan program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa Perencanaan dan Kerja Sama;
4. Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) di BPI dengan pagu anggaran sebesar Rp20.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp8.546.592.055,00 atau 42,73%.
  - Program Penguatan Pemerintahan Dan Pembangunan Desa (P3PD) Pengembangan Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Untuk Pengembangan Desa Digital melalui *Smart Village* dimana PIU (Project Implementing Unit) adalah Pusdaing (Pusat Daya Saing Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi) dengan anggaran sebesar Rp10.000.000.000,00 Anggaran pinjaman luar negeri dari *International Bank For Reconstruction & Development* tersebut telah terealisasi sebesar Rp8.546.592.055,00 atau 85.47%;

- Program Penguatan Pemerintahan Dan Pembangunan Desa (P3PD) Data dan Informasi Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Untuk Pengembangan Desa Digital melalui *Smart Village* dimana PIU (*Project Implementing Unit*) Pusdatin (Pusat Data dan Informasi) dengan anggaran sebesar Rp10.000.000.000,00. Anggaran pinjaman luar negeri tersebut belum dapat terealisasi disebabkan sistem informasi desa yang direncanakan menggunakan PHLN telah dilaksanakan menggunakan Rupiah Murni (RM) serta direncanakan dana Rp10.000.000.000,00 (PHLN) digunakan untuk penyediaan perangkat TIK di Ruang Komunitas Digital Program *Smart Village*, namun karena waktu yang terbatas sehingga tidak dapat dilaksanakan;
5. Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) yang sumber pendanaannya adalah Pinjaman dan Hibah Luar Negeri melalui IFAD. Pada Tahun Anggaran 2021, dengan adanya perubahan SOTK Lama ke SOTK Baru, Kegiatan TEKAD pun berpindah yang sebelumnya dari Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Ditjen PPMD) ke Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Ditjen PEIDDTT). Program TEKAD ini menysasar pada 5 (lima) provinsi yaitu Maluku Utara, Maluku, NTT, Papua dan Papua Barat. Tahun Anggaran 2021 dari Pinjaman Luar Negeri pada kegiatan TEKAD ini memiliki anggaran pagu belanja sebesar Rp86.953.797.000,00 dengan realisasi Rp73.288.862.612,00 atau 84,28%.

Pada Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi terdapat anggaran dana hibah luar negeri sebesar Rp17.780.508.000,00 yang digunakan untuk program:

1. Program *Investing In Nutrition Early Years* (INEY) di Ditjen PDP dengan tujuan memfasilitasi desa dalam mendukung pelaksanaan intervensi sensitif dan intervensi spesifikasi

- serta terjadinya konvergensi pencegahan stunting di tingkat desa. Tahun 2021 Hibah Luar Negeri (INEY) sebesar Rp3.626.864.000,00 dengan realisasi anggaran secara bruto sebesar Rp2.948.139.026,00 atau 81,3% dan terdapat pengembalian belanja sebesar Rp43.104.871,00.
2. Program Penyediaan Air Minum Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS). Pada tahun 2021 Ditjen PDP memiliki Program Penyediaan Air Minum Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) yang berasal dari sumber dana Hibah Luar Negeri sebesar dari pagu Rp793.644.000,00 sudah terserap sebesar Rp456.766.698,00 atau 57,55% hal ini dikarenakan terkendala Hibah PAMSIMAS baru masuk DIPA pada bulan Juli 2021, sehingga untuk penyerapannya baru dilaksanakan di triwulan IV, kegiatan sudah terlaksana berupa *Workshop* Penyusunan Buku Saku Keberlanjutan PAMSIMAS namun terdapat kendala yaitu peserta yang berlokasi jauh tidak dapat datang karena belum vaksin.
  3. Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) yang sumber pendanaannya adalah Pinjaman dan Hibah Luar Negeri melalui IFAD. Pada Tahun Anggaran 2021, dengan adanya perubahan SOTK Lama ke SOTK Baru, Kegiatan TEKAD pun berpindah yang sebelumnya dari Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Ditjen PPMD) ke Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Ditjen PEIDDTT). Program TEKAD ini menasar pada 5 (lima) provinsi yaitu Maluku Utara, Maluku, NTT, Papua dan Papua Barat. Tahun Anggaran 2021 Hibah Luar Negeri pada kegiatan TEKAD ini memiliki anggaran pagu belanja sebesar Rp13.360.000.000,00 dengan realisasi Rp92.400.000,00 atau 0,69%. Hal ini dikarenakan adanya beberapa revisi, dimana revisi tersebut harus mendapatkan NOL dari pihak pemberi Hibah yaitu IFAD dan semua hibah luar negeri harus melalui pengadaan. Estimasi awal 4 paket kegiatan

kajian dapat terserap di termin awal, tapi sampai saat ini proses *shortlist* di UKPBJ belum terselesaikan, sedangkan untuk paket kajian lainnya yang terakomodir dalam anggaran tersebut masih dalam proses menunggu kelengkapan dokumen dan NOL dari IFAD sehingga tidak dapat direalisasikan.

Pada Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi terdapat anggaran dana hibah langsung luar negeri sebesar Rp1.608.745.000,00 di Ditjen PDP. Hibah Langsung Luar Negeri dalam bentuk uang diberikan dari *United Nations Children's Fund* (UNICEF). Tujuannya adalah monitoring dan penanganan anak tidak sekolah dan anak beresiko putus sekolah dampak dari Covid-19, pengelolaan Database Integrasi SIPBM, Pendampingan Desa Model Desa Tanggap Bencana dan Desa Peduli Iklim, Monitoring dan Evaluasi Panduan Desa Ramah Anak (PDRA). Pengajuan Pembukaan Rekening Dana Hibah Langsung UNICEF pada Bank BNI di setujui pada tanggal 28 Juni 2021 nomor surat: TEB/20.1/3242/2021 tentang konfirmasi pembukaan rekening Giro, dengan Nomor Rekening: RPL 140 PDHL DITJEN PDP, dengan nomor registrasi hibah 2NYCWZHA. Program ini terealisasi sebesar Rp1.608.743.960,00 atau 100%.

Realisasi Belanja per 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar 20,25 persen dibandingkan Tahun 2020. Rincian perbandingan Realisasi Belanja Netto per jenis Belanja Per 31 Desember 2021 dan 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

*Perbandingan Realisasi Belanja Netto per jenis Belanja  
Per 31 Desember 2021 dan 2020*

*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	REALISASI	REALISASI	KENAIKAN (PENURUNAN) %
	31 DES 2021	31 DES 2020	
Belanja Pegawai	253.339.847.313,00	253.454.101.379,00	(0,05)
Belanja Barang	2.647.572.730.238,00	2.151.823.109.760,00	23,04
Belanja Modal	46.566.432.484,00	45.967.106.262,00	1,30
<b>Jumlah</b>	<b>2.947.479.010.035,00</b>	<b>2.451.244.317.401,00</b>	<b>20,24</b>

### B.2.1 Belanja Pegawai

*Belanja Pegawai*  
Rp253.339.847.313,00

Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp253.339.847.313,00 dan Rp253.454.101.379,00 atau terjadi penurunan sebesar 0,05 persen dari tahun 2020.

Realisasi belanja pegawai per 31 Desember 2021 mencapai 98,23 persen dari anggaran belanja sebesar Rp257.907.496.000,00.

Adapun Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi Per 31 Desember 2021 masing-masing Unit Kerja Eselon I dapat dilihat pada tabel berikut:

*Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Per UAE-1  
Per 31 Desember 2021*

*(Dalam Rupiah)*

Kode	Eselon I	Estimasi Anggaran	Realisasi	% Realisasi
067.02	Inspektorat Jenderal	18.906.351.000,00	18.831.293.420,00	99,60
067.03	Ditjen PDP	26.983.976.000,00	25.439.231.945,00	94,28
067.04	Ditjen PEID	24.256.610.000,00	23.994.327.353,00	98,92
067.05	Ditjen PDTu	3.385.613.000,00	3.385.611.245,00	100,00
067.06	Ditjen PPDT	21.290.076.000,00	21.029.340.168,00	98,78
067.07	Ditjen PPKTrans	32.195.484.000,00	31.971.963.291,00	99,31
067.08	Ditjen PKTrans	4.561.614.000,00	4.561.611.511,00	100,00
067.09	BPSDM	59.736.957.000,00	59.005.567.707,00	98,78
067.10	Sekretariat Jenderal	45.004.741.000,00	43.898.127.905,00	97,54
067.11	BPI	21.586.074.000,00	21.222.772.768,00	98,32
	<b>JUMLAH</b>	<b>257.907.496.000,00</b>	<b>253.339.847.313,00</b>	<b>98,23</b>

Perbandingan rincian realisasi Belanja Pegawai Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi per 31 Desember 2021 dan 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

*Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Pegawai  
Per 31 Desember 2021 dan 2020*

*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	REALISASI 31 DES 2021	REALISASI 31 DES 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	144.757.613.320,00	139.832.047.818,00	3,52
Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	427.905.000,00	463.810.200,00	(7,74)
Belanja Lembur	625.351.000,00	1.154.241.000,00	(45,82)
Belanja Tunjangan Khusus & Pegawai Transito	107.705.834.084,00	112.217.952.150,00	(4,02)
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>253.516.703.404,00</b>	<b>253.668.051.168,00</b>	<b>(0,06)</b>
Pengembalian Belanja Pegawai	176.856.091,00	213.949.789,00	<b>(17,34)</b>
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>253.339.847.313,00</b>	<b>253.454.101.379,00</b>	<b>(0,05)</b>

Kenaikan belanja gaji dan Tunjangan PNS sebesar 3,52 persen dan disebabkan adanya penambahan pegawai serta pergantian jabatan dari jabatan struktural menjadi jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi. Adapun penurunan belanja lembur dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 45,82 persen disebabkan adanya pandemi Covid-19 yang ditindaklanjuti dengan kebijakan *Work From Home* (WFH) dan *Work Form Office* (WFO) pada pegawai.

### **B.2.2 Belanja Barang**

*Belanja Barang*  
*Rp2.647.572.730.238,00*

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp2.647.572.730.238,00 dan Rp2.151.823.109.760,00 atau terjadi kenaikan sebesar 23,04 persen dibandingkan tahun 2020. Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2021 mencapai 95,19 persen dari anggaran belanja barang Tahun 2021 sebesar Rp2.781.315.117.000,00.

Belanja Barang Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi per 31 Desember 2021 per Unit Kerja Eselon I dapat dilihat pada tabel berikut:

*Anggaran dan Realisasi Belanja Barang pada UKE-I  
Per 31 Desember 2021*

*(Dalam Rupiah)*

Kode	Eselon I	Estimasi Anggaran	Realisasi	Realisasi %
067.02	Inspektorat Jenderal	13.812.607.000,00	13.658.687.713,00	98,89
067.03	Ditjen PDP	223.340.798.000,00	212.999.490.841,00	95,37
067.04	Ditjen PEID	181.476.538.000,00	154.106.243.460,00	84,92
067.05	Ditjen PDTu	312.300.000,00	312.300.000,00	100,00
067.06	Ditjen PPDT	67.261.803.000,00	66.292.684.492,00	98,56
067.07	Ditjen PPKTrans	377.987.961.000,00	334.733.106.996,00	88,56
067.08	Ditjen PPKTrans	1.092.084.000,00	1.092.031.147,00	100,00
067.09	BPSDM	1.704.126.738.000,00	1.668.712.376.894,00	97,92
067.10	Sekretariat Jenderal	141.686.477.000,00	139.572.430.755,00	98,51
067.11	BPI	70.217.811.000,00	56.093.377.940,00	79,88
<b>JUMLAH</b>		<b>2.781.315.117.000,00</b>	<b>2.647.572.730.238,00</b>	<b>95,19</b>

Adapun perbandingan Belanja Barang Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi Per 31 Desember 2021 dan 2020 per jenis belanja dapat dilihat pada tabel berikut:

*Perbandingan Rincian Belanja Barang per Jenis Belanja  
Per 31 Desember 2021 dan 2020*

*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	REALISASI 31 DES 2021	REALISASI TAHUN 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	112.063.115.780,00	94.354.927.250,00	18,77
Belanja Barang Non Operasional	172.943.127.358,00	73.006.317.522,00	136,89
Belanja Barang Persediaan	25.440.438.628,00	13.203.100.575,00	92,69
Belanja Jasa	1.780.048.537.720,00	1.737.439.467.584,00	2,45
Belanja Pemeliharaan	43.393.353.012,00	38.410.924.952,00	12,97
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	229.347.760.774,00	119.979.459.546,00	91,16
Belanja Perjalanan Luar negeri	-	388.067.400,00	(100,00)
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masy.	153.588.385.895,00	71.181.124.108,00	115,77
Belanja Fisik dan Penunjang Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan	76.113.518.156,00	3.561.913.407,00	100,00
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat	61.270.660.456,00	2.186.476.000,00	2.702,26
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>2.654.208.897.779,00</b>	<b>2.153.711.778.344,00</b>	<b>23,24</b>
Pengembalian Belanja	6.636.167.541,00	1.888.668.584,00	<b>251,37</b>
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>2.647.572.730.238,00</b>	<b>2.151.823.109.760,00</b>	<b>23,04</b>

Secara keseluruhan realisasi belanja barang mengalami kenaikan. Kenaikan belanja barang mayoritas disebabkan adanya kenaikan anggaran belanja diserahkan masyarakat pada tahun 2021 dibandingkan tahun sebelumnya yang mengalami *refocussing* anggaran akibat adanya pandemi Covid-19 serta jumlah *refocussing* yang terjadi pada tahun 2021 tidak sebesar *refocussing* pada tahun 2020.

Adapun belanja barang untuk penanganan Pandemi Covid-19 oleh Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

*Belanja Barang untuk Penanganan Covid-19  
Per 31 Desember 2021*

*(Dalam Rupiah)*

Kode Akun	Uraian Akun	Estimasi Anggaran	Realisasi	Realisasi %
521131	Belanja Barang Operasional- Penanganan Pandemi Covid-19	10.408.811.000,00	9.671.399.987,00	92,92
521241	Belanja Barang Non Operasional- Penanganan Pandemi Covid-19	110.985.357.000,00	81.267.439.905,00	73,22
521841	Belanja Barang Persediaan- Penanganan Pandemi Covid-19	208.505.000,00	206.677.620,00	99,12
522192	Belanja Jasa- Penanganan Pandemi Covid-19	23.001.286.000,00	16.837.491.769,00	73,20
524115	Belanja Perjalanan Dinas- Penanganan Pandemi Covid-19	6.605.752.000,00	5.891.602.970,00	89,19
526132	Belanja Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam Bentuk Barang- Penanganan Pandemi Covid-19	2.107.730.000,00	1.673.279.500,00	79,39
526321	Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam Bentuk Uang- Penanganan Pandemi Covid-19	18.008.690.000,00	18.008.690.000,00	100,00
526322	Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam Bentuk Barang- Penanganan Pandemi Covid-19	4.483.301.000,00	876.970.456,00	19,56
<b>JUMLAH</b>		<b>175.809.432.000,00</b>	<b>134.433.552.207,00</b>	<b>76,47</b>

Akun-akun khusus penanganan Pandemi Covid-19 ini dianggarkan sesuai surat dirjen perbendaharaan No. S-369/PB/2020 tanggal 27 April 2020 tentang Pemutakhiran Akun dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19. Akun-akun khusus ini digunakan oleh Satker-Satker di lingkup Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi untuk Penanganan Covid dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Berdasarkan tabel belanja barang untuk penanganan Pandemi Covid-19 oleh Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut

- Realisasi Belanja Barang Operasional-Penanganan Pandemi Covid-19 (521131) telah mencapai 92,92 persen per 31 Desember 2021 digunakan untuk pembelian masker, *handsanitizer*, penyemprotan disinfektan, pembelian vitamin, pengadaan paket data internet, pembayaran aplikasi *zoom* pada seluruh satker.
- Realisasi Belanja Non Operasional-Penanganan Pandemi Covid-19 (521241) telah mencapai 73,22 persen per 31 Desember 2021 digunakan untuk *Swab Test*, multivitamin, Biaya Konsumsi petugas penyemprot pada satker Ditjen PDP, Ditjen PPKTrans, BPSDM, dan Sekretariat Jenderal.

- Realisasi belanja Barang Persediaan-penanganan Pandemi Covid-19 (521841) telah mencapai 99,12 persen digunakan untuk pembelian masker dan *handsanitizer* Realisasi belanja Barang Persediaan-penanganan pandemi Covid-19 ada pada satker Ditjen PDP dan BPSDM.
- Realisasi Belanja Jasa-Penanganan Pandemi Covid-19 (522192) telah mencapai 73,20 persen per 31 Desember 2021 digunakan untuk *Swab Test* dengan menggunakan pihak ketiga, Penyemprotan disinfektan dengan pihak ketiga, dan Honor Narasumber dan moderator video *conference* pada seluruh satker.
- Realisasi belanja perjalanan dinas-penanganan Pandemi Covid-19 (524115) telah mencapai 89,19 persen digunakan untuk pembayaran perjalanan dinas pegawai dalam rangka program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Ketahanan Pangan dengan kegiatan mediasi dan kerjasama antar pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perpindahan dan penempatan transmigrasi di Provinsi Kalimantan Tengah pada satker Dinas Transmigrasi Kab Kapuas, Disnakertrans Prov. Kalimantan Tengah, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Ditjen PPKTrans.
- Realisasi belanja Peralatan Mesin untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda dalam bentuk barang-Penanganan Pandemi Covid-19 (526132) sebesar 79,39 persen termasuk dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Ketahanan Pangan dalam rangka bantuan sarana prasarana pertanian dan utilitas yang dibangun di kawasan Transmigrasi Kab. Kapuas Prov. Kalimantan Tengah.
- Realisasi Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda dalam bentuk uang-Penanganan Pandemi Covid-19 (526321) sebesar 100 persen merupakan belanja yang masuk dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Rehabilitasi Mangrove yang digunakan untuk kegiatan Pembibitan/persemaian mangrove dan Penanaman/rehabilitasi mangrove senilai

pada satker Ditjen PDT.

- Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya kepada masyarakat/Pemda dalam bentuk barang-Penanganan Pandemi Covid-19 (526322) masih sebesar 19,56 persen, belanja ini termasuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Realisasi rendah dikarenakan terhambatnya proses pelaksanaan kegiatan dan direncanakan direvisi namun proses revisi anggaran juga terhambat. Realisasi rendah tersebut terdapat pada Satker Dinas Transmigrasi Kab. Kapuas.

Berikut rincian akun belanja barang untuk penanganan Pandemi Covid-19 yang digunakan untuk Program PEN:

*Rincian Realisasi Belanja Barang untuk Penanganan Covid-19 dengan akun khusus yang digunakan untuk PEN Per 31 Desember 2021*

*(Dalam Rupiah)*

Kode Satker	Kode Akun	Estimasi Anggaran	Realisasi	Realisasi %
350456	522192	82.180.000,00	67.871.009,00	82,59
350454	521131	113.600.000,00	112.320.000,00	98,87
	522192	64.822.000,00	35.514.125,00	54,79
350217	526321	18.008.690.000,00	18.008.690.000,00	100,00
	521131	27.000.000,00	27.000.000,00	100,00
	521241	106.536.082.000,00	77.350.097.000,00	72,60
	522192	3.765.510.000,00	2.352.850.366,00	62,48
	524115	243.304.000,00	144.051.000,00	59,21
	526132	1.089.890.000,00	708.164.900,00	64,98
	526322	4.458.801.000,00	858.770.456,00	19,26
350226	521131	12.666.000,00	12.574.000,00	99,27
	521241	1.898.837.000,00	1.546.974.700,00	81,47
	522192	2.247.925.000,00	1.286.152.050,00	57,22
	524115	2.307.736.000,00	1.890.534.000,00	81,92
	526132	1.017.840.000,00	965.114.600,00	94,82
418239	521241	132.480.000,00	100.372.800,00	75,76
	522192	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00
	524115	86.670.000,00	72.807.200,00	84,01
	526322	10.500.000,00	4.200.000,00	40,00
418241	521241	24.100.000,00	17.386.200,00	72,14
	522192	88.050.000,00	69.775.000,00	79,24
	524115	125.300.000,00	119.631.999,00	95,48
	526322	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00
418242	521241	77.224.000,00	64.844.000,00	83,97
	522192	13.700.000,00	12.560.000,00	91,68
	524115	89.212.000,00	71.468.900,00	80,11
	526322	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00
350467	521131	114.772.000,00	113.362.344,00	98,77
	521241	148.236.000,00	147.907.148,00	99,78
	522192	2.990.624.000,00	2.926.765.884,00	97,86
	524115	3.638.280.000,00	3.477.865.614,00	95,59
<b>JUMLAH</b>		<b>149.434.031.000,00</b>	<b>112.585.625.295,00</b>	<b>75,34</b>

Adapun rincian realisasi belanja barang untuk penanganan pandemi Covid-19 dengan akun khusus Penanganan Pandemi Covid-19 pada masing-masing Unit Kerja Eselon I per 31 Desember 2021 dijelaskan pada tabel berikut:

*Rincian Realisasi Belanja Barang untuk Penanganan Covid-19  
dengan akun khusus pada masing-masing UKE-I  
Per 31 Desember 2021*

*(Dalam Rupiah)*

UKE-I	521131	521241	521841	522192	524115	526132	526321	526322
Hjen	75.246.141,00			242.345.891,00				
PDP	26.035.100,00	577.859.150,00	204.577.620,00	1.092.648.474,00				
PEID	1.404.507.493,00	79.200.000,00		1.092.771.542,00				
PDTu								
PPDT	1.198.408.451,00	95.000.000,00		721.711.897,00			18.008.690.000,00	
PPKTrans	3.491.477.957,00	79.277.809.648,00		7.278.445.201,00	5.891.602.970,00	1.673.279.500,00		876.970.456,00
PKTrans	34.600.000,00							
BPSDM	1.792.962.215,00	1.205.362.211,00	2.100.000,00	4.380.394.996,00				
Sekjen	1.375.008.900,00	32.208.896,00		1.310.683.623,00				
BPI	273.153.730,00			718.490.145,00				
<b>JUMLAH</b>	<b>9.671.399.987,00</b>	<b>81.267.439.905,00</b>	<b>206.677.620,00</b>	<b>16.837.491.769,00</b>	<b>5.891.602.970,00</b>	<b>1.673.279.500,00</b>	<b>18.008.690.000,00</b>	<b>876.970.456,00</b>

### **B.2.3 Belanja Modal**

*Belanja Modal*  
*Rp46.566.432.484,00*

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp46.566.432.484,00 dan Rp45.967.106.262,00 atau mengalami kenaikan sebesar 1,30 persen dibandingkan dengan Tahun 2020 disebabkan kenaikan anggaran belanja modal pada tahun 2021 dibanding tahun 2020. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal Per 31 Desember 2021 mencapai 93,18 persen dari anggaran tahun 2021 sebesar Rp49.972.238.000,00.

Adapun Rincian Belanja Modal Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi per 31 Desember 2021 pada masing-masing Unit Kerja Eselon I dapat dilihat pada tabel berikut:

*Anggaran dan Realisasi Modal per Unit Kerja Eselon I  
Per 31 Desember 2021*

*(Dalam Rupiah)*

Kode	Unit Kerja Eselon I	Anggaran	Realisasi	%Realisasi Anggaran
067.02	Inspektorat Jenderal	542.083.000,00	541.895.200,00	99,97
067.03	Ditjen PDP	1.888.000.000,00	1.860.317.075,00	98,53
067.04	Ditjen PEID	2.966.820.000,00	2.959.188.054,00	99,74
067.07	Ditjen PPKTrans	20.436.599.000,00	17.499.047.061,00	85,63
067.09	BPSDM	7.473.376.000,00	7.356.745.256,00	98,44
067.10	Sekretariat Jenderal	6.653.860.000,00	6.424.837.198,00	96,56
067.11	BPI	10.011.500.000,00	9.924.402.640,00	99,13
	<b>JUMLAH</b>	<b>49.972.238.000,00</b>	<b>46.566.432.484,00</b>	<b>93,18</b>

Adapun Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Modal Per Jenis Belanja Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Per 31 Desember 2021 dan 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal per Jenis Belanja  
Per 31 Desember 2021 dan 2020*

*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	REALISASI 31 DES 2021	REALISASI 31 DES 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	10.000.000,00	-	100,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.636.785.603,00	18.273.696.155,00	34,82
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.839.695.756,00	313.691.500,00	1.124,04
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.070.375.900,00	26.911.227.607,00	(73,73)
Belanja Modal Lainnya	11.020.012.613,00	468.491.000,00	2.252,24
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>46.576.869.872,00</b>	<b>45.967.106.262,00</b>	<b>1,33</b>
Pengembalian	10.437.388,00	-	100,00
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>46.566.432.484,00</b>	<b>45.967.106.262,00</b>	<b>1,30</b>

**1) Belanja Modal Tanah**

*Belanja Modal Tanah  
Rp10.000.000,00*

Realisasi Belanja Modal Tanah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp10.000.000,00 dan Rp0,00. Realisasi belanja modal Tanah per 31 Desember 2021 mencapai 100 persen dari anggaran belanja modal tanah sebesar Rp10.000.000,00.

*Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Modal Tanah  
Per 31 Desember 2021 dan 2020*

*(Dalam Rupiah)*

URAIAN JENIS BELANJA	31 DES 2021	31 DES 2020	Naik (Turun) %
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	10.000.000,00	-	100,00
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
Pengembalian Belanja Modal Lainnya	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>

Realisasi belanja modal tanah tersebut merupakan realisasi anggaran belanja modal pembuatan sertifikat tanah (531114) pada satker Balai Latihan Masyarakat Ambon sebesar Rp10.000.000,00 yang digunakan untuk pengurusan pembuatan sertifikat tanah yang berada pada Balai Latihan Masyarakat Ambon berupa pengurusan pembuatan surat pernyataan, fee/biaya notaris, survey petugas BPN dalam rangka pengurusan sertifikat tanah SHM Nomor 94 atas nama Dr. Katje Sitanaya yang akan dibalik nama menjadi milik Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi.

## 2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan  
dan Mesin  
Rp24.636.785.603,00

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp24.636.785.603,00 dan Rp18.273.696.155,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar 34,82 persen dibandingkan 31 Desember 2020 hal ini disebabkan adanya kenaikan anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada tahun 2021 dibandingkan tahun sebelumnya yang diikuti dengan kenaikan realisasi belanjanya.

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin per 31 Desember 2021 mencapai 98,58 persen dari anggaran belanja peralatan dan mesin sebesar Rp24.990.781.000,00.

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi 31 Desember 2021 per Unit Kerja Eselon I dapat dilihat pada tabel berikut:

*Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin  
Per Unit Kerja Eselon I  
Per 31 Desember 2021*

*(Dalam Rupiah)*

Kode	Unit Kerja Eselon I	Anggaran	Realisasi	%Realisasi Anggaran
067.02	Inspektorat Jenderal	542.083.000,00	541.895.200,00	99,97
067.03	Ditjen PDP	1.888.000.000,00	1.860.317.075,00	98,53
067.04	Ditjen PEID	2.966.820.000,00	2.959.188.054,00	99,74
067.07	Ditjen PPKTrans	1.755.024.000,00	1.754.119.200,00	99,95
067.09	BPSDM	3.500.225.000,00	3.488.049.500,00	99,65
067.10	Sekretariat Jenderal	6.525.089.000,00	6.297.635.074,00	96,51
067.11	BPI	7.813.540.000,00	7.735.581.500,00	99,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>24.990.781.000,00</b>	<b>24.636.785.603,00</b>	<b>98,58</b>

Realisasi belanja modal peralatan mesin tersebut merupakan realisasi anggaran belanja modal (532111) sebagian besar untuk Pengadaan Peralatan dan Mesin Operasional Kantor seperti alat elektronik, furniture untuk mendukung kegiatan operasional pegawai.

Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi pada 31 Desember 2021 dan 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

*Perbandingan Rincian Realisasi*

*Belanja Modal Peralatan dan Mesin  
Per 31 Desember 2021 dan 2020*

*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	REALISASI 31 DES 2021	REALISASI 31 DES 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.636.785.603,00	17.799.283.465,00	38,41
Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Penanganan Pandemi Covid-19	-	465.325.290,00	(100,00)
Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	-	9.087.400,00	(100,00)
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>24.636.785.603,00</b>	<b>18.273.696.155,00</b>	<b>34,82</b>
Pengembalian	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>24.636.785.603,00</b>	<b>18.273.696.155,00</b>	<b>34,82</b>

### 3) *Belanja Modal Gedung dan Bangunan*

*Belanja Modal Gedung  
dan Bangunan  
Rp3.839.695.756,00*

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp3.839.695.756,00 dan Rp313.691.500,00 atau mengalami kenaikan sebesar 1.124 persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020. Hal ini disebabkan adanya *refocussing* anggaran untuk penanganan Pandemi Covid-19 pada tahun 2020. Adanya kenaikan anggaran untuk belanja modal gedung dan bangunan ini diikuti dengan kenaikan realisasi belanja modal gedung dan bangunan. Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2021 mencapai 97,35 persen dari anggaran belanja sebesar Rp3.944.027.000,00.

Adapun Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi pada 31 Desember 2021 per Unit Kerja Eselon I dapat dilihat pada tabel berikut:

*Rincian Anggaran dan Realisasi  
Belanja Modal Gedung dan Bangunan  
31 Desember 2021*

*(Dalam Rupiah)*

Kode	Unit Kerja Eselon I	Anggaran	Realisasi	%Realisasi Anggaran
067.09	BPSDM	3.944.027.000,00	3.839.695.756,00	97,35
<b>JUMLAH</b>		<b>3.944.027.000,00</b>	<b>3.839.695.756,00</b>	<b>97,35</b>

Perbandingan Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan per Jenis Belanja pada Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi per 31 Desember 2021 dan 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

*Perbandingan Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan  
Per 31 Desember 2021 dan 2020*

*(Dalam Rupiah)*

URAIAN JENIS BELANJA	31 DES 2021	31 DES 2020	Naik (Turun) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.053.338.762,00	160.411.500,00	1.180,04
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	-	153.280.000,00	(100,00)
Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan	17.514.777,00	-	100,00
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	1.768.842.217,00	-	100,00
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>3.839.695.756,00</b>	<b>313.691.500,00</b>	<b>1.124,04</b>
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>3.839.695.756,00</b>	<b>313.691.500,00</b>	<b>1.124,04</b>

Realisasi belanja modal gedung dan bangunan berasal dari Unit Kerja Eselon-1 BPSDM dengan rincian sebagai berikut:

- BPSDM sebesar Rp1.768.842.217,00 yang terdiri atas pembangunan gedung ibadah permanen sebesar Rp1.275.575.508,00 dan bangunan gedung kantor permanen sebesar Rp493.266.709,00;
- Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Banjarmasin sebesar Rp408.690.777,00 untuk pembangunan perluasan gedung kantor peruntukan ruang rapat;
- Balai Latihan Masyarakat Denpasar sebesar Rp1.662.162.762,00 untuk pembangunan gedung pendidikan permanen 2 tingkat Rp1.540.826.000,00 dan bangunan gedung pendidikan dan latihan Rp121.336.762,00.

#### **4) Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

*Belanja Modal JIJ  
Rp7.070.375.900,00*

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan (JIJ) untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp7.070.375.900,00 dan Rp26.911.227.607,00 atau mengalami penurunan sebesar 73,73 persen dibandingkan per 31 Desember 2020. Hal ini disebabkan adanya *refocussing* anggaran dan realokasi pagu anggaran. Adanya pengurangan anggaran untuk belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan ini diikuti dengan penurunan realisasi belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan. Realisasi Belanja Modal JIJ per 31 Desember 2021

mencapai 99,79 persen dari Anggaran Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp7.085.558.000,00.

Adapun Anggaran dan Realisasi Belanja Modal JIJ Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi per 31 Desember 2021 per Unit Kerja Eselon I dapat dilihat pada tabel berikut:

*Anggaran dan Realisasi Belanja Modal JIJ  
Per 31 Desember 2021*

*(Dalam Rupiah)*

Kode	Eselon I	Estimasi Anggaran	Realisasi	Realisasi Anggaran (%)
067.07	Ditjen PPKTrans	7.085.558.000,00	7.070.375.900,00	99,79
<b>JUMLAH</b>		<b>7.085.558.000,00</b>	<b>7.070.375.900,00</b>	<b>99,79</b>

Adapun Perbandingan Rincian Belanja Modal JIJ Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi per 31 Desember 2021 dan 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

*Perbandingan Rincian Belanja Modal JIJ per Jenis Belanja  
Per 31 Desember 2021 dan 2020*

*(Dalam Rupiah)*

URAIAN JENIS BELANJA	31 DES 2021	31 DES 2020	Naik (Turun) %
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	5.929.025.900,00	17.516.344.935,00	(66,15)
Belanja Modal Irigasi	1.141.350.000,00	4.380.494.672,00	(73,94)
Belanja Modal Jaringan	-	5.014.388.000,00	(100,00)
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>7.070.375.900,00</b>	<b>26.911.227.607,00</b>	<b>(73,73)</b>
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>7.070.375.900,00</b>	<b>26.911.227.607,00</b>	<b>(73,73)</b>

Belanja modal jalan dan jembatan sebesar Rp5.929.025.900,00 terdapat pada:

1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Mamasa sebesar Rp1.038.073.500,00
2. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Konawe sebesar Rp552.512.000,00
3. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Wajo sebesar Rp855.343.000,00, serta
4. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian Kab. Luwu Timur sebesar Rp3.483.097.400,00.

Belanja modal irigasi sebesar Rp1.141.350.000,00 terdapat di Satker Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Konawe.

**5) Belanja Modal Lainnya**

Belanja Modal Lainnya  
Rp11.009.575.225,00

Realisasi Belanja Modal Lainnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp11.009.575.225,00 dan Rp468.491.000,00 atau mengalami kenaikan sebesar 2250,01 persen dibandingkan periode 31 Desember 2020 hal ini disebabkan adanya kenaikan anggaran Belanja Modal lainnya pada tahun 2021 dibandingkan tahun sebelumnya. Adanya kenaikan pagu anggaran belanja modal lainnya diikuti kenaikan realisasi belanjanya.

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2021 mencapai 78,97 persen dari anggaran Belanja Modal Lainnya Tahun 2021 sebesar Rp13.941.872.000,00.

Adapun Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Lainnya Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi per 31 Desember 2021 per Unit Kerja Eselon I dapat dilihat pada tabel berikut:

*Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Lainnya  
Per 31 Desember 2021*

*(Dalam Rupiah)*

Kode	Eselon I	Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran
067.07	Ditjen PPKTrans	11.596.017.000,00	8.674.551.961,00	74,81
067.09	BPSDM	19.124.000,00	19.000.000,00	99,35
067.10	Sekretariat Jenderal	128.771.000,00	127.202.124,00	98,78
067.11	BPI	2.197.960.000,00	2.188.821.140,00	99,58
<b>JUMLAH</b>		<b>13.941.872.000,00</b>	<b>11.009.575.225,00</b>	<b>78,97</b>

Perbandingan Rincian Belanja Modal Lainnya Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi per 31 Desember 2021 dan 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

*Perbandingan Rincian Belanja Modal Lainnya per Jenis Belanja  
Per 31 Desember 2021 dan 2020*

*(Dalam Rupiah)*

URAIAN JENIS BELANJA	31 DES 2021	31 DES 2020	Naik (Turun) %
Belanja Modal Lainnya	1.740.856.124,00	2.000.000,00	86,942,81
Belanja Modal Lainnya - Penanganan Pandemi Covid-19	6.467.852.511,00	-	100,00
Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/ atau Aset Lainnya	2.811.303.978,00	466.491.000,00	502,65
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>11.020.012.613,00</b>	<b>468.491.000,00</b>	<b>2.252,24</b>
Pengembalian Belanja Modal Lainnya	10.437.388,00	-	100,00
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>11.009.575.225,00</b>	<b>468.491.000,00</b>	<b>2.250,01</b>

Realisasi belanja modal lainnya sebesar Rp11.009.575.225,00 terdiri dari:

- Ditjen PPKTrans sebesar Rp8.674.551.961,00 yaitu sebesar Rp6.467.852.511,00 merupakan belanja modal lainnya – penanganan Pandemi Covid-19 (536118) pada Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas yang termasuk dalam PEN sektor Ketahanan Pangan dengan kegiatan bantuan sarana Produksi Pertanian. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah pembangunan jalan, saluran, *drainase*, dan gorong-gorong. Kemudian sisanya sebesar Rp2.206.699.450,00 merupakan belanja modal lainnya pada satker pusat yang merupakan kegiatan renovasi gedung C;
- BPSDM sebesar Rp19.000.000,00 merupakan kegiatan belanja peralatan dan mesin dalam renovasi berupa penutup jendela yang akan di transfer keluar ke Sekretariat Jenderal dikarenakan gedung tersebut milik Sekretariat Jenderal.
- Sekretariat Jenderal sebesar Rp127.202.124,00 terdiri dari pembelian bahan Perpustakaan Kemendesa PDTT sebesar Rp114.732.124,00 dan pengadaan *software windows*, *software anti-virus* dan *Microsoft* Rp12.470.000,00;
- BPI sebesar Rp2.188.821.140,00 terdiri atas Pengembangan nilai asset berupa software pengembangan email institusi sebesar Rp1.590.875.000,00 serta sebesar Rp597.946.140,00 merupakan belanja untuk pekerjaan renovasi ruang kerja Puspadu, Pusdaing, Pusdatin, Pusbangjak, dan ruang rapat, ruang tunggu, ruang Kepala Badan, serta ruang Sekretariat.

**C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA****ASET LANCAR**

Nilai Aset Lancar Per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp186.728.507.133,00 dan Rp51.861.532.791,00.

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Rincian Aset Lancar Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi per 31 Desember 2021 dan 2020 tersaji sebagai berikut:

*Rincian Aset Lancar  
Per 31 Desember 2021 dan 2020*

*(Dalam Rupiah)*

No.	Aset Lancar	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	10.716.000,00	-
2	Kas Lainnya dan Setara Kas	74.353.492,00	219.087.387,00
3	Piutang Bukan Pajak	1.157.977.401,00	1.381.596.736,00
4	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak	(101.957.578,00)	(56.448.233,00)
5	Piutang Bukan Pajak (Netto)	1.056.019.823,00	1.325.148.503,00
6	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	145.767.100,00	160.767.100,00
7	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	(11.686.710,00)	(8.796.710,00)
8	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (Netto)	134.080.390,00	151.970.390,00
9	Persediaan	185.453.337.428,00	50.165.326.511,00
	<b>Jumlah</b>	<b>186.728.507.133,00</b>	<b>51.861.532.791,00</b>

**C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran**

*Kas di Bendahara Pengeluaran  
Rp10.716.000,00*

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/ Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Kementerian Desa,

PDT, dan Transmigrasi per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp10.716.000,00 dan Rp0,00. Kas di Bendaharaan Pengeluaran sudah direkonsiliasi oleh KPPN dengan Berita Acara Rekonsiliasi.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 dan 2020 per unit kerja Eselon I dapat dilihat pada tabel berikut:

*Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per Eselon I  
Per 31 Desember 2021 dan 2020*

*(Dalam Rupiah)*

Unit Kerja	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Ditjen PPKTrans	10.716.000,00	-
<b>Jumlah</b>	<b>10.716.000,00</b>	<b>-</b>

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran ini terdapat pada satker Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Subulussalam. Saldo ini terjadi karena keterlambatan bendahara dalam menyetorkan UP ke kas negara. UP disetorkan pada tanggal 13 Januari 2022. (Bukti Terlampir)

### C.2 Kas Lainnya dan Setara Kas

*Kas Lainnya dan  
Setara Kas  
Rp74.353.492,00*

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp74.353.492,00 dan Rp219.087.387,00. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

*Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per Eselon I  
Per 31 Desember 2021 dan 2020*

*(Dalam Rupiah)*

Unit Kerja	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Ditjen PDP	180.400,00	219.016.071,00
Ditjen PEID	24.233.200,00	-
Ditjen PPKTrans	-	70.716,00
Ditjen PKTrans	-	600,00
BPSDM	49.939.892,00	-
<b>Jumlah</b>	<b>74.353.492,00</b>	<b>219.087.387,00</b>

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas pada Ditjen PDP sebagai berikut:

1. Kas Lainnya senilai Rp219.016.071,00 per 31 Desember 2021 yang terdiri dari Kas Lainnya di Kementerian Negara/ Lembaga dari Hibah yaitu sisa anggaran pada rekening yang berasal penerimaan hibah yang diterima langsung dari *United Nations Children's Fund (UNICEF)* sebesar Rp194.441.469,00 per tanggal 31 Desember 2020 yang merupakan pengembalian dari Pengesahan Hibah Langsung Unicef yang telah dilakukan pengembalian berdasarkan Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung (SP4HL) nomor 80000 tanggal 16 Juni 2021 sebesar Rp154.552.978,00 dan nomor 80001 tanggal 16 Juni 2021 sebesar Rp39.888.491,00 dan sebesar Rp24.574.602,00 yang terdiri dari:
  - a) Penerimaan bunga jasa giro pada rekening hibah langsung luar negeri sebesar Rp24.574.102,00 yang penerimaannya tidak memerlukan pengesahan dari kppn, yang sudah dilakukan pengembalian ke *UNICEF* pada tanggal 14 April 2021
  - b) Saldo rekening sebesar Rp500,00 pada Satuan Kerja Aktif Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2020, yang merupakan kekurangan penarikan atas pembayaran honor tenaga pendamping yang sudah di bayarkan pada tanggal 25 Februari 2021.
2. Penambahan saldo kas lainnya dan setara kas per 31 Desember 2021 sebesar Rp180.400,00 dijelaskan sebagai berikut:
  - a) Transfer masuk atas sisa kas pada rekening satuan kerja dekonsentrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat (350150) sebesar Rp400 yang di karenakan kekurangan penarikan atas pembayaran honor perjalanan dinas kepada salah satu pegawainya. Dilakukan transfer masuk dari satuan kerja

dekonsentrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat (350150) ke Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan (350456) dikarenakan pada tahun 2022 satuan kerja dekonsentrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat (350150) sudah menjadi satuan kerja inaktif

- b) Transfer masuk atas sisa kas pada rekening satuan kerja dekonsentrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau (350425) sebesar Rp180.000 yang di karenakan kekurangan penarikan atas pembayaran honor perjalanan dinas kepada salah satu pegawainya. Dilakukan transfer masuk dari satuan kerja dekonsentrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau (350425) ke Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan (350456) dikarenakan pada tahun 2022 satuan kerja dekonsentrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau (350425) sudah menjadi satuan kerja inaktif.

Rincian kas lainnya dan setara kas pada Ditjen PEID sebesar Rp24.233.200,00 sebagai berikut:

1. Kas Lainnya dan Setara Kas pada Satker Ditjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (350453) sebesar Rp1.327.350,00 merupakan Uang Pajak Bendahara yang belum disetor (berupa PPh 21, PPh 22 dan PPN)
2. Kas Lainnya dan Setara Kas pada Satker Dekonsentrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur (670408) sebesar Rp8.100.750,00 merupakan Retur Uang Perdin, Honor dan

Sewa Kendaraan Kegiatan.

3. Kas Lainnya dan Setara Kas pada Satker Dekonsentrasi Provinsi Papua (670409) sebesar Rp14.805.100,00 merupakan Retur Honor Petugas Kebersihan selama 4 bulan.

Kas lainnya dan setara kas pada Ditjen PPKTrans per 31 Desember 2020 sebesar Rp70.716,00 terdapat di satker Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Tojo Una-una merupakan kesalahan pencatatan pada penarikan uang di Bank untuk pembayaran honor pejabat penandatanganan SPM sebesar Rp70.000,00 dan bunga rekening sebesar Rp715,78 (dilakukan pembulatan dalam sistem Aplikasi SAIBA) dan dilakukan jurnal penyesuaian. Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas ini telah dilakukan jurnal penyesuaian sehingga saldonya Rp0,00.

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas yang terdapat pada Ditjen PKTrans per 31 Desember 2020 sebesar Rp600,00 terdapat di Satuan Kerja 350303 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Muna. Hal ini berawal karena terjadinya selisih antara BKU dan Rekening Koran sebesar Rp600,00 yang disebabkan karena kekeliruan dalam penulisan nilai uang pada cek Giro oleh Bendahara Pengeluaran yang terjadi saat transaksi penarikan uang pada tanggal 06 Nopember 2020 sebesar Rp51.530.000,00 seharusnya sebesar Rp51.530.600,00. Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas ini telah dilakukan jurnal penyesuaian sehingga saldonya Rp0,00.

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas yang terdapat pada BPSDM sebesar Rp49.939.892,00 merupakan sisa kas Satker Balai Pekanbaru yang terlambat disetorkan berupa pajak yang sudah dipungut dari transaksi di bulan Desember namun pajak tersebut baru disetorkan pada bulan Januari 2022. Sisa

Pajak tersebut sudah dikembalikan ke kas negara pada tanggal 23 Januari 2022 dengan Nomor NTB 000000783614 NTPN 1FE5200NLE7EH20S.

### C.3 Piutang Bukan Pajak

*Piutang Bukan Pajak  
Rp1.157.977.401,00*

Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp1.157.977.401,00 dan Rp1.381.596.736,00 yang merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan dan belum diselesaikan pembayaran atau serah terimanya pada akhir tahun anggaran per tanggal neraca.

Rincian Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2021 dan 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

*Rincian Piutang Bukan Pajak  
Per 31 Desember 2021 dan 2020*

*(Dalam Rupiah)*

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Ditjen PPKTrans	410.784.790,00	580.656.805,00
BPSDM	230.500.000,00	230.500.000,00
Sekretariat Jenderal	516.692.611,00	570.439.931,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.157.977.401,00</b>	<b>1.381.596.736,00</b>

Rincian Piutang Bukan Pajak pada Ditjen PPKTrans sebesar Rp410.784.790,00 merupakan kekurangan volume pekerjaan fisik atas pemeriksaan BPK Tahun 2020 dengan rincian Satker sebagai berikut:

*Rincian Piutang Bukan Pajak  
Ditjen PPKTrans  
Per 31 Desember 2021*

*(Dalam Rupiah)*

NO	KODE SATKER	NAMA SATKER	JUMLAH
1	067.07.350285	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN WAJO	112.869.373,00
2	067.07.350307	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN KONAWA	127.148.767,00
3	067.07.418191	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. SIDRAP	30.887.817,00
4	067.07.419124	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KAB. MUNA	139.878.833,00
<b>Total</b>			<b>410.784.790,00</b>

Rincian Piutang Negara Bukan Pajak yang terdapat pada BPSDM Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp230.500.000,00 merupakan Temuan BPK TA 2020 pada satker atas Kurang Volume Hasil Pemeriksaan Fisik Belanja Modal Peralatan dan Mesin berupa Layar Film/Film (Videotron) sebesar Rp199.000.000,00 dan Note Book sebesar Rp31.500.000,00 pada BPSDM. Sehubungan dengan hal tersebut, Pihak ketiga diwajibkan untuk membayar pengembalian ke Negara atas Temuan tersebut sebesar Rp230.500.000,00. Namun, sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, belum dilakukan pembayaran.

Piutang pada Setjen per 31 Desember 2021 sebesar Rp516.692.611,00 dengan rincian pada tabel berikut:

*Rincian Piutang Bukan Pajak  
Sekretariat Jenderal  
Per 31 Desember 2021 dan 2020*

*(Dalam Rupiah)*

NAMA SATKER	TA 2021	TA 2020
Piutang Pujasera, Kantin dan FC Nur Kholiq Masa Kontrak 26/1/2018 s.d. 26/1/2020	465.080.882,00	495.707.270,00
Piutang Pujasera, Kantin Masa Kontrak 1/2/2020 s.d. 1/2/2021	-	65.070.711,00
Piutang Pujasera, Kantin Masa Kontrak 2/2/2021 s.d. 2/2/2022	33.737.562,00	-
Piutang Bagi Hasil PT Ardas Tahun 2020	-	9.661.950,00
Piutang Sewa Gedung dan Bangunan untuk café oleh CV Latere dan Usaha Gita Sabela	17.874.167,00	-
<b>JUMLAH</b>	<b>516.692.611,00</b>	<b>570.439.931,00</b>

Penjelasan Mutasi Piutang Sekjen sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut:

1. Piutang Pujasera Piutang Pujasera, Kantin dan FC Nur Kholiq Masa Kontrak 26/1/2018 s.d. 26/1/2020; saldo per 2020 adalah sebesar Rp495.707.270,00. Pada Tahun 2021 terdapat jurnal koreksi penambahan pencatatan piutang FC Nur Kholiq sebesar Rp226.287,00 akibat kesalahan perhitungan termin yang awalnya tercatat 3/7/2021 seharusnya 2/1/2021. Selanjutnya selama tahun 2021

- terdapat penerimaan pembayaran piutang pujasera dan kantin sebesar Rp20.600.000,00 dan pelunasan piutang FC Nur Kholiq sebesar Rp10.252.675,00. Sehingga saldo akhir Piutang per 31 Desember 2021 menjadi sebesar Rp465.080.882,00;
2. Piutang Pujasera, Kantin Masa Kontrak 1/2/2020 s.d. 1/2/2021. Saldo per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp65.070.711,00. Pada Tahun 2021 terdapat jurnal koreksi penambahan pencatatan piutang sebesar Rp128.646,00 akibat kesalahan pencatatan nominal sewa Pujasera atas nama Moh Ali (Nomor Kontrak 53/UM.01.05/X/2020) dan Wongso (Nomor Kontrak 54/UM.01.05/X/2020) pada tahun 2020 yang awalnya dicatat Rp3.108.119,00 per satu tahun menjadi Rp3.178.503,00. Selanjutnya terdapat pengakuan piutang tahun 2021 sebesar Rp6.143.405,00. Namun demikian, selama tahun 2021, piutang ini telah dilunasi dengan jumlah sebesar Rp71.342.762,00 sehingga saldo Piutang per 31 Desember 2021 menjadi Rp0,00;
  3. Piutang Pujasera, Kantin Masa Kontrak 2/2/2021 s.d. 2/2/2022, saldo per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp0,00. Pada tahun 2021 terdapat pengakuan piutang sebesar Rp70.793.122,00 dan baru dilakukan pelunasan sebesar Rp37.055.560,00. Hal ini menyebabkan saldo Piutang per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp33.737.562,00;
  4. Piutang Bagi Hasil PT Ardas Tahun 2020; saldo per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp9.661.950,00 dan sudah dilakukan pelunasan sebesar Rp9.661.950,00 pada tanggal 11 Mei 2021 dengan nomor NTPN CFE9B2G4UTMRK8MU sehingga saldo Piutang per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp0,00;
  5. Piutang Sewa Gedung dan Bangunan untuk café oleh CV Latere dan Usaha Gita Sabela sebesar Rp17.874.167,00.

#### C.4 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak

*Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak (Rp101.957.401,00)*

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp101.957.401,00 dan Rp56.448.233,00. Penyisihan piutang tak tertagih-piutang bukan pajak pada masing-masing Unit Kerja Eselon I per 31 Desember 2021 dan 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

*Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih  
Piutang bukan pajak - per UKE-1  
Per 31 Desember 2021 dan 2020*

*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Ditjen PPKTrans	2.053.923,00	2.903.284,00
BPSDM	1.152.500,00	1.152.500,00
Sekretariat Jenderal	98.751.155,00	52.392.449,00
<b>Total</b>	<b>101.957.578,00</b>	<b>56.448.233,00</b>

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih berdasarkan kategori piutang disajikan sebagai berikut:

*Rincian Penyisihan Piutang Tak tertagih – Piutang Bukan Pajak  
Per 31 Desember 2021*

*(Dalam Rupiah)*

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
<b>Piutang Bukan Pajak</b>			
Lancar	692.896.519,00	0,50%	3.464.482,60
Kurang Lancar	465.080.882,00	10%	46.508.088,20
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
<b>Jumlah</b>	<b>1.157.977.401,00</b>		<b>49.972.570,80</b>
<b>Bagian Lancar TP/TGR</b>			
Lancar		0,50%	
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan		50%	-
Macet		100%	-
<b>Jumlah</b>	-		-
<b>Bagian Lancar TPA</b>			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan		50%	-
Macet		100%	-
<b>Jumlah</b>	-		-
Penyisihan Setjen Tahun 2020			52.754.997,21
<b>Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih</b>	<b>1.157.977.401,00</b>		<b>102.727.568,01</b>

### C.5 Piutang Bukan Pajak (Netto)

Piutang Bukan Pajak  
(netto)  
Rp1.056.019.823,00

Piutang bukan pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya.

Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp1.056.019.823,00 dan Rp1.325.148.503,00. Nilai Piutang Bukan Pajak (Netto) berasal dari selisih Piutang Bukan Pajak (Bruto) dikurangi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak.

Perbandingan Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

*Rincian Piutang Bukan Pajak (Netto)  
Per 31 Desember 2021 dan 2020*

*(Dalam Rupiah)*

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Ditjen PPKTrans	408.730.867,00	577.753.521,00
BPSDM	229.347.500,00	229.347.500,00
Sekretariat Jenderal	417.941.456,00	518.047.482,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.056.019.823,00</b>	<b>1.325.148.503,00</b>

### C.6 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Bagian Lancar  
Tagihan TP/TGR  
Rp145.767.100,00

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp145.767.100,00 dan Rp160.767.100,00. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian nilai bagian lancar TP/TGR per 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Bagian Lancar TP/TGR  
Per 31 Desember 2021 dan 2020*

*(Dalam Rupiah)*

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan	87.967.100,00	87.967.100,00
Bagian Lancar TGR	57.800.000,00	72.800.000,00
	<b>145.767.100,00</b>	<b>160.767.100,00</b>

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp145.767.100,00 terdapat pada Ditjen PPKTrans yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Temuan atas hilangnya kendaraan dinas roda 4 atas pegawai dengan inisial RP. Pencatatan atas hilangnya kendaraan dinas roda 4 sesuai dengan atensi temuan hasil audit surat Itjen No.Rhs.232/PW.03.01/VII/2019 pada Ditjen PPKTrans Tanggal 30 Juli 2019. Saldo bagian lancar TGR per 31 Desember 2020 sebesar Rp72.800.000,00 merupakan piutang yang harus dibayarkan atas temuan tersebut sesuai dengan *Time Line* di SKTJM dimana untuk periode Oktober sampai dengan Desember 2020 sebesar Rp22.000.000,00 dan sudah dilakukan penyetoran ke kas negara sebesar Rp15.000.000,00 dengan akun 425791 (pendapatan penyelesaian tuntutan ganti kerugian negara terhadap pegawai negeri bukan bendahara/pejabat lain) yang disetorkan tanggal bayar 22 Desember 2021. Dengan demikian saldo Bagian Lancar TGR per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp57.800.000,00;
2. Piutang TP di Direktorat Pelayanan Pertanahan Transmigrasi Ditjen Pembangunan Kawasan Transmigrasi 067.08.350463 yang merupakan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Nomor 15/HP/XVI/01/2011 dan telah dilakukan jurnal transfer keluar dari 067.08.350463 dan jurnal transfer masuk ke 067.07.350467 di tahun 2021 sebesar Rp87.967.100,00.

### C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar

Penyisihan Piutang  
Tak Tertagih – Piutang  
Lancar Lancar  
Rp11.686.710,00

Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp11.686.710,00 dan Rp8.796.710,00. Estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan

Piutang Tak Tertagih berdasarkan kategori piutang disajikan sebagai berikut:

*Rincian Penyisihan Piutang Tak tertagih – Bagian Lancar  
TP/TGR*

*Per 31 Desember 2021*

*(Dalam Rupiah)*

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
<b>Piutang Bukan Pajak</b>			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
<b>Jumlah</b>	-	-	-
<b>Bagian Lancar TP/TGR</b>			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	87.967.100,00	10%	8.796.710,00
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
<b>Jumlah</b>	<b>87.967.100,00</b>	-	<b>8.796.710,00</b>
<b>Bagian Lancar TPA</b>			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
<b>Jumlah</b>	-	-	-
Bagian Lancar TGR Ditjen PPKTrans	57.800.000,00	5%	2.890.000,00
<b>Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih</b>	<b>145.767.100,00</b>	-	<b>11.686.710,00</b>

### C.8 Bagian Lancar Tagihan TP/TGR (Netto)

Bagian Lancar Tagihan (Netto)  
Rp134.080.390,00

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto) per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp134.080.390,00 dan Rp151.970.390,00.

*Rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR (Netto)*

*Per 31 Desember 2021*

*(Dalam Rupiah)*

No.	Kualitas	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Bersih
1	Lancar	-	-	-
2	Kurang Lancar	145.767.100,00	11.686.710,00	134.080.390,00
3	Diragukan	-	-	-
4	Macet	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>145.767.100,00</b>	<b>11.686.710,00</b>	<b>134.080.390,00</b>

### C.9 Persediaan

Persediaan  
Rp185.453.337.428,00

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Nilai Persediaan per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-

masing sebesar Rp185.453.337.428,00 dan Rp50.165.326.511,00. Nilai Persediaan ini meningkat akibat kenaikan anggaran dan realisasi persediaan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi. Adapun nilai persediaan pada masing-masing Unit Kerja Eselon I di lingkup Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi per 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut:

*Rincian Persediaan pada Unit Eselon I  
Per 31 Desember 2021 dan 2020*

*(Dalam Rupiah)*

<b>Kode</b>	<b>Uraian</b>	<b>31 Desember 2021</b>	<b>31 Desember 2020</b>
067.02	Inspektorat Jenderal	25.948.400,00	72.404.400,00
067.03	Ditjen PDP	16.559.540.037,00	17.747.104.431,00
067.04	Ditjen PEID	1.448.858.000,00	1.447.172.500,00
067.05	Ditjen PDTu	-	1.487.945.568,00
067.06	Ditjen PPDT	2.454.991.718,00	418.493.589,00
067.07	Ditjen PPKTrans	164.628.017.569,00	21.124.466.289,00
067.08	Ditjen PKTRans	-	7.628.793.837,00
067.09	BPSDM	62.402.950,00	63.737.025,00
067.10	Setjen	187.828.104,00	175.208.872,00
067.11	BPI	85.750.650,00	-
<b>JUMLAH</b>		<b>185.453.337.428,00</b>	<b>50.165.326.511,00</b>

Di antara saldo persediaan per 31 Desember 2021 sebagaimana disajikan pada tabel rincian di atas, terdapat Persediaan yang berasal dari Belanja Barang Persediaan – Penanganan Pandemi *Covid-19* sebesar Rp206.677.620,00 yang terdiri dari Satker Pusat Ditjen PDP sebesar Rp204.577.620,00 dan Balai Latihan Masyarakat Jogjakarta sebesar Rp2.100.000,00. Belanja ini menghasilkan persediaan konsumsi seperti masker, handsanitizer, dan lain – lain.

Adapun rincian mutasi/perubahan nilai Persediaan per 31 Desember 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

*Mutasi/Perubahan Persediaan  
Per 31 Desember 2021*

*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	NILAI
<b>Saldo Awal</b>	<b>15.207.528.375,00</b>
<b>Mutasi tambah:</b>	<b>392.977.161.396,00</b>
Pembelian	256.568.274.334,00
Reklas Masuk	117.171.909.492,00
Transfer Masuk	19.130.706.761,00
Hasil Opname Fisik kurang	106.270.809,00
<b>Mutasi kurang:</b>	<b>222.731.352.343,00</b>
Reklas Keluar	117.171.920.940,00
Penyerahan kepada Masyarakat	60.719.588.253,00
Pemakaian	25.585.897.960,00
Transfer Keluar	19.130.706.761,00
Hasil Opname Fisik Lebih	123.238.429,00
<b>Saldo Akhir</b>	<b>185.453.337.428,00</b>

Penjelasan Mutasi Tambah Persediaan berasal dari:

1. Pembelian sebesar Rp392.977.161.396,00 yang terdapat pada Itjen sebesar Rp1.883.657.100,00, Ditjen PDP sebesar Rp5.292.432.995,00, Ditjen PEID sebesar Rp3.476.067.670,00, Ditjen PPDT sebesar Rp9.097.391.490,00, Ditjen PPKTrans sebesar Rp225.277.260.246,00, Ditjen PKTrans sebesar Rp28.155.000,00, BPSDM sebesar Rp4.766.009.919,00, Setjen sebesar Rp4.773.527.766,00 dan BPI sebesar Rp1.973.772.148,00;
2. Reklas Masuk sebesar Rp117.171.909.492,00 yang terdapat pada Ditjen PDP sebesar Rp2.140.249.000,00 dan Ditjen PPKTrans sebesar Rp115.031.660.492,00;
3. Transfer Masuk sebesar Rp19.130.706.761,00 yang terdapat pada Ditjen PPDT sebesar Rp1.487.945.568,00 dan Ditjen PKTrans sebesar Rp17.642.761.193,00;
4. Hasil Opname Fisik sebesar Rp106.270.809,00 yang terdapat pada Itjen sebesar Rp800.000,00, Ditjen PPKTrans sebesar Rp30.000,00, Ditjen PKTrans sebesar Rp2.019.000,00 dan Setjen sebesar Rp103.421.809,00;

Penjelasan Mutasi Kurang Persediaan:

1. Reklas Keluar sebesar Rp117.171.920.940,00 yang terdapat pada Ditjen PDP sebesar Rp2.140.249.000,00 dan Ditjen PPKTrans sebesar Rp115.031.671.940,00;
2. Penyerahan Kepada Masyarakat sebesar Rp60.719.588.253,00 yang terdapat pada Ditjen PDP sebesar Rp3.337.102.624,00, Ditjen PPDT sebesar Rp4.748.146.900,00 dan Ditjen PPKTrans sebesar Rp52.634.338.729,00;
3. Pemakaian sebesar Rp25.585.897.960,00 yang terdapat pada Itjen sebesar Rp1.930.913.100,00, Ditjen PDP sebesar Rp3.142.894.765,00, Ditjen PEID sebesar Rp3.474.382.170,00 Ditjen PPDT sebesar Rp3.800.692.029,00, Ditjen PPKTrans sebesar Rp1.639.456.740,00, Ditjen PKTrans sebesar Rp200.955.750,00, BPSDM sebesar Rp4.767.343.994,00, Setjen sebesar Rp4.741.091.914,00 dan BPI sebesar Rp1.888.021.498,00;
4. Transfer Keluar sebesar Rp9.511.958.965,00 yang terdapat pada Ditjen PDTu sebesar Rp1.487.945.568,00, Ditjen PPKTrans sebesar Rp10.184.749.106,00 dan Ditjen PKTrans sebesar Rp7.458.012.087,00;
5. Hasil Opname Fisik sebesar Rp123.238.429,00 terdapat pada Setjen.

Adapun rincian persediaan per akun pada periode 31 Desember 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

*Rincian Persediaan per Akun  
Per 31 Desember 2021*

*(Dalam Rupiah)*

Akun	Uraian	31 Desember 2022
117111	Barang Konsumsi	592.884.844,00
117113	Bahan Untuk Pemeliharaan	240.000,00
117122	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada	76.551.508.733,00
117123	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada	8.227.612.100,00
117124	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada	23.186.668.744,00
117125	Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada	64.004.705.520,00
117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke	10.698.192.889,00
117129	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses	2.191.308.758,00
117199	Persediaan Lainnya	215.840,00
<b>JUMLAH</b>		<b>185.453.337.428,00</b>

**ASET TETAP**

Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Aset Tetap pada Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp1.971.067.943.029,00 dan Rp1.997.934.495.703,00. Adapun Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 2020 terdiri dari:

*Rincian Aset Tetap  
Per 31 Desember 2021 dan 2020  
(Dalam Rupiah)*

URAIAN	31 Desember 2021	31 Desember 2020	NAIK (TURUN) %
Tanah	701.074.345.474,00	677.750.355.000,00	3,44
Peralatan dan Mesin	401.220.950.084,00	380.004.557.930,00	5,58
Gedung dan Bangunan	603.103.929.447,00	579.626.324.551,00	4,05
Jalan, Irigasi dan Jaringan	857.833.129.797,00	808.949.560.937,00	6,04
Aset Tetap Lainnya	115.537.418.571,00	121.688.849.932,00	(5,06)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	17.670.622.284,00	30.177.239.114,00	(41,44)
Akumulasi Penyusutan	(725.372.452.628,00)	(600.262.391.761,00)	20,84
<b>Jumlah</b>	<b>1.971.067.943.029,00</b>	<b>1.997.934.495.703,00</b>	<b>(1,34)</b>

**C.10 Tanah**

Tanah  
Rp701.074.345.474,00

Nilai aset tetap berupa Tanah per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar dan Rp701.074.345.474,00 dan Rp677.750.355.000,00. Terdapat kenaikan Tanah sebesar Rp23.313.990.474,00 atau sebesar 3,44 persen dari 2020. Rincian aset Tanah per 31 Desember 2021 dan 2020 per Unit Kerja Eselon I dapat dilihat pada tabel berikut:

*Rincian Aset Tanah per Unit Eselon I  
Per 31 Desember 2021 dan 2020*

*(Dalam Rupiah)*

Kode	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Naik/Turun	
				Nilai	%
067.09	BPSDM	596.815.490.474,00	573.491.500.000,00	23.323.990.474,00	4,07
067.10	Setjen	104.258.855.000,00	104.258.855.000,00	0,00	-
<b>JUMLAH</b>		<b>701.074.345.474,00</b>	<b>677.750.355.000,00</b>	<b>23.323.990.474,00</b>	<b>3,44</b>

Rincian mutasi/perubahan nilai Tanah per 31 Desember 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

*Mutasi/Perubahan Tanah  
Per 31 Desember 2021*

*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	NILAI
<b>Saldo Awal</b>	<b>677.750.355.000,00</b>
<b>Mutasi tambah:</b>	<b>121.031.105.444,00</b>
Transfer Masuk	97.707.114.970,00
Penambahan Saldo awal	23.313.990.474,00
Pengembangan Nilai Aset	10.000.000,00
<b>Mutasi kurang:</b>	<b>97.707.114.970,00</b>
Transger Keluar	83.390.800.000,00
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	14.316.314.970,00
<b>Saldo Akhir</b>	<b>701.074.345.474,00</b>

Adapun rincian mutasi tambah sebagai berikut:

1. Transfer Masuk sebesar Rp97.707.114.970,00 yang terdiri dari Ditjen PPDT sebesar Rp854.180.000,00, Ditjen PPKTrans sebesar Rp13.462.134.970,00 dan juga pada BPSDM sebesar Rp83.390.800.000,00;
2. Penambahan Saldo Awal sebesar Rp23.313.990.474,00 berasal dari Balai Latihan Masyarakat Makassar;
3. Pengembangan Nilai Aset sebesar Rp10.000.000,00 terdapat pada Balai Latihan Masyarakat Ambon.

Adapun rincian mutasi kurang sebagai berikut:

1. Transfer Keluar terdapat pada BPSDM sebesar Rp83.390.800.000,00 pada satker Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
2. Reklasifikasi dari aset tetap ke aset lainnya sebesar Rp14.316.314.970,00 yang terdapat pada Ditjen PPDT sebesar Rp854.180.000,00 dan Ditjen PPKTrans sebesar Rp13.462.134.970,00.

Rincian Aset Tanah yang dimiliki Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi pada masing-masing satker per 31 Desember 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

*Daftar Aset Tanah pada masing-masing Satker  
Per 31 Desember 2021*

*(Dalam Rupiah)*

NAMA SATKER	Nilai
Balai Latihan Masyarakat Ambon	886.564.000,00
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	83.390.800.000,00
Balai Pengkajian dan Penerapan Teknik Produksi Bengkulu	172.830.565.000,00
Balai Besar Pelatihan Masy Desa, PDT & Trans Yogyakarta	68.599.991.000,00
Balai Pelatihan Masy Desa, PDT & Trans Makassar	86.270.943.474,00
Balai Pelatihan Masy Desa, PDT & Trans Banjarmasin	41.462.575.000,00
Balai Pelatihan Masy Desa, PDT & Trans Denpasar	129.778.125.000,00
Balai Pelatihan Masy Desa, PDT & Trans Pekanbaru	13.595.927.000,00
Sekretariat Jenderal KDPDTT	104.258.855.000,00
<b>Jumlah Tanah</b>	<b>701.074.345.474,00</b>

### C.11 Peralatan dan Mesin

*Peralatan dan Mesin  
Rp401.220.950.084,00*

Nilai perolehan aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp401.220.950.084,00 dan Rp380.004.557.930,00. Terdapat kenaikan sebesar Rp21.216.392.154,00 atau 5,58 persen dibandingkan 2020.

Perbandingan rincian nilai Peralatan dan Mesin pada Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Desa, PDT, dan

Transmigrasi per 31 Desember 2021 dan 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

*Rincian Peralatan dan Mesin Menurut Unit Kerja Eselon I  
Per 31 Desember 2021 dan 2020*

*(Dalam Rupiah)*

Kode	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Naik/Turun	
				Nilai	%
067.02	Itjen	10.291.495.003,00	9.571.517.853,00	719.977.150,00	7,52
067.03	Ditjen PDP	17.877.916.195,00	16.012.080.120,00	1.865.836.075,00	11,65
067.04	Ditjen PEID	21.289.993.024,00	17.822.737.970,00	3.467.255.054,00	19,45
067.05	Ditjen PDTu	-	14.796.323.956,00	(14.796.323.956,00)	(100,00)
067.06	Ditjen PPDT	27.870.743.592,00	14.702.755.950,00	13.167.987.642,00	89,56
067.07	Ditjen PPKTrans	80.245.452.285,00	54.207.571.777,00	26.037.880.508,00	48,03
067.08	Ditjen PKTrans	732.147.090,00	31.369.495.844,00	(30.637.348.754,00)	(97,67)
067.09	BPSDM	66.920.513.772,00	102.654.425.177,00	(35.733.911.405,00)	(34,81)
067.10	Setjen	123.087.736.743,00	118.867.649.283,00	4.220.087.460,00	3,55
067.11	BPI	52.904.952.380,00	-	52.904.952.380,00	100,00
<b>JUMLAH</b>		<b>401.220.950.084,00</b>	<b>380.004.557.930,00</b>	<b>21.216.392.154,00</b>	<b>5,58</b>

Adapun mutasi nilai aset Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

*Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin  
Per 31 Desember 2021*

*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	NILAI
<b>Saldo Awal</b>	<b>380.004.557.930,00</b>
<b>Mutasi tambah:</b>	<b>181.382.916.129,00</b>
Transfer Masuk	140.381.975.156,00
Pembelian	24.050.113.143,00
Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	10.536.375.697,00
Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	2.313.999.689,00
Reklasifikasi Masuk	1.236.280.000,00
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	1.128.162.520,00
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	547.010.000,00
Saldo Awal	478.631.500,00
Transaksi Normalisasi BMN	699.568.424,00
Pengembangan Nilai Aset	10.800.000,00
<b>Mutasi kurang:</b>	<b>160.166.523.975,00</b>
Transfer Keluar	112.989.567.018,00
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	35.608.534.108,00
Transaksi Normalisasi BMN	9.243.538.482,00
Reklasifikasi Keluar	1.236.280.000,00
Penghapusan	716.829.000,00
Hibah (Keluar)	333.410.400,00
Koreksi Pencatatan	19.066.500,00
Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola	17.408.667,00
Usulan Barang Hibah DK/TP (semester II dokumen TAYL)	1.889.800,00
<b>Saldo Akhir</b>	<b>401.220.950.084,00</b>
Akumulasi Penyusutan	333.662.679.508,00
<b>Nilai Buku</b>	<b>67.558.270.576,00</b>

Adapun rincian mutasi tambah sebagai berikut:

1. Transfer Masuk sebesar Rp140.381.975.156,00 yang terdapat pada Itjen sebesar Rp181.398.000,00, Ditjen PDP

- sebesar Rp17.399.000,00, Ditjen PEID sebesar Rp550.590.000,00, Ditjen PPDT sebesar Rp26.151.023.293,00, Ditjen PPKTrans sebesar Rp51.069.524.642,00, BPSDM sebesar Rp11.591.535.309,00, Setjen sebesar Rp2.393.420.232,00, dan BPI sebesar Rp48.427.084.680,00;
2. Pembelian sebesar Rp24.050.113.143,00 yang terdapat pada Itjen sebesar Rp538.579.150,00, Ditjen PDP sebesar Rp1.848.437.075,00, Ditjen PEID sebesar Rp2.959.188.054,00, Ditjen PPKTrans sebesar Rp1.420.109.200,00, BPSDM sebesar Rp3.396.699.500,00, Setjen sebesar Rp6.151.518.664,00, dan BPI sebesar Rp7.735.581.500,00;
  3. Perolehan Hasil Tindak Lanjut Normalisasi sebesar Rp10.536.375.697,00 yang terdapat pada Ditjen PPKTrans sebesar Rp2.282.351.150,00, Ditjen PKTrans sebesar Rp634.755.400,00, BPSDM sebesar Rp1.504.865.500,00 dan BPI sebesar Rp6.114.403.647,00;
  4. Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap sebesar Rp2.313.999.689,00 yang terdapat pada BPSDM sebesar Rp149.128.000,00 dan Setjen sebesar Rp2.164.871.689,00;
  5. Reklasifikasi Masuk sebesar Rp1.236.280.000,00 terdapat pada Ditjen PEID;
  6. Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas sebesar Rp1.128.162.520,00 terdapat pada Setjen;
  7. Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP sebesar Rp547.010.000,00 yang terdapat pada Ditjen PPKTrans;
  8. Saldo Awal sebesar Rp478.631.500,00 yang terdapat pada Ditjen PPKTrans sebesar Rp19.066.500,00 dan Ditjen PKTrans sebesar Rp459.565.000,00;
  9. Transaksi Normalisasi BMN sebesar Rp699.568.424,00 terdapat pada Ditjen PKTrans;
  10. Pengembangan Nilai Aset sebesar Rp10.800.000,00 terdapat pada Setjen;

Adapun rincian mutasi kurang sebagai berikut:

1. Transfer Keluar sebesar Rp112.989.567.018,00 yang terdapat pada Ditjen PEID sebesar Rp36.979.000,00, Ditjen PDTu sebesar Rp14.796.323.956,00, Ditjen PPDT sebesar Rp2.195.671.300,00, Ditjen PPKTrans sebesar Rp14.247.800.447,00, Ditjen PKTrans sebesar Rp32.376.525.244,00, BPSDM sebesar Rp48.785.677.071,00 dan Setjen Rp550.590.000,00;
2. Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya sebesar Rp35.608.534.108,00 yang terdapat pada Ditjen PPDT sebesar Rp10.781.364.351,00, Ditjen PPKTrans sebesar Rp13.248.908.137,00, BPSDM sebesar Rp1.806.008.508,00, Setjen sebesar Rp6.514.539.312,00 dan BPI sebesar Rp3.257.713.800,00;
3. Transaksi Normalisasi BMN sebesar Rp9.243.538.482,00 yang terdapat pada Ditjen PPDT sebesar Rp6.000.000,00, Ditjen PPKTrans sebesar Rp1.446.630.700,00, BPSDM sebesar Rp1.676.504.135,00 dan BPI sebesar Rp6.114.403.647,00;
4. Reklasifikasi Keluar sebesar Rp1.236.280.000,00 terdapat pada Ditjen PEID;
5. Hibah (Keluar) sebesar Rp333.410.400,00 terdapat pada Ditjen PPKTrans;
6. Penghapusan sebesar Rp716.829.000,00 yang terdapat pada Ditjen PEID sebesar Rp5.544.000,00, Ditjen PPKTrans Rp2.475.000,00 dan BPSDM sebesar Rp107.950.000,00, dan Setjen sebesar Rp600.860.000,00;
7. Koreksi Pencatatan sebesar Rp19.066.500,00 terdapat pada Ditjen PPKTrans;
8. Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola sebesar Rp17.408.667,00 terdapat pada Setjen;
9. Usulan Barang Hibah DK/TP (Semenster II Dokumen TAYL) sebesar Rp1.889.800,00 terdapat pada Ditjen PPKTrans;

### C.12 Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan  
Rp603.103.929.447,00

Nilai Aset Tetap berupa Gedung dan bangunan per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah Rp603.103.929.447,00 dan Rp579.626.324.551,00. Terdapat kenaikan nilai aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp 23.477.604.896,00 atau 4,05 persen dibandingkan tahun 2020.

Perbandingan rincian nilai Gedung dan Bangunan yang dimiliki Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi Per 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut:

*Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan per Eselon I  
Per 31 Desember 2021 dan 2020*

*(Dalam Rupiah)*

Kode	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Naik/Turun	
				Nilai	%
067.03	Ditjen PEID	-	501.063.950,00	(501.063.950,00)	(100,00)
067.07	Ditjen PPKTRans	189.666.210.059,00	150.016.650.896,00	39.649.559.163,00	26,43
067.08	Ditjen PKTRans	3.607.709.000,00	26.436.417.713,00	(22.828.708.713,00)	(86,35)
067.09	BPSDM	131.342.415.739,00	125.344.432.192,00	5.997.983.547,00	4,79
067.10	Setjen	278.487.594.649,00	277.327.759.800,00	1.159.834.849,00	0,42
<b>JUMLAH</b>		<b>603.103.929.447,00</b>	<b>579.626.324.551,00</b>	<b>23.477.604.896,00</b>	<b>4,05</b>

Adapun rincian mutasi/perubahan Aset Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 sebagai berikut:

*Mutasi/Perubahan Gedung dan Bangunan  
Per 31 Desember 2021*

*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	NILAI
<b>Saldo Awal</b>	<b>579.626.324.551,00</b>
<b>Mutasi tambah:</b>	<b>261.382.427.410,00</b>
Transfer Masuk	228.946.341.955,00
Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	11.734.449.600,00
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	10.201.852.821,00
Transaksi Normalisasi BMN	3.611.495.050,00
Reklasifikasi Masuk	3.266.156.850,00
Pengembangan Melalui KDP	1.733.888.285,00
Penerimaan Aset Tetap Renovasi	1.110.212.849,00
Saldo Awal	778.030.000,00
<b>Mutasi kurang:</b>	<b>237.904.822.514,00</b>
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	117.656.655.115,00
Transfer Keluar	111.398.974.840,00
Reklasifikasi Keluar	3.811.280.559,00
Transaksi Normalisasi BMN	2.903.751.000,00
Hibah (Keluar)	999.451.000,00
Usulan Barang Hibah DK/TP	504.850.000,00
Usulan Barang Hibah DK/TP (semester II dokumen)	455.610.000,00
Hibah Keluar (semester II dokumen TAYL)	174.250.000,00
<b>Saldo Akhir</b>	<b>603.103.929.447,00</b>
Akumulasi Penyusutan	68.547.830.901,00
<b>Nilai Buku</b>	<b>534.556.098.546,00</b>

Adapun rincian mutasi tambah sebagai berikut:

1. Transfer Masuk sebesar Rp228.946.341.955,00 yang terdapat pada Ditjen PPDT sebesar Rp6.128.420.021,00, Ditjen PPKTrans sebesar Rp210.932.333.718,00 dan BPSDM sebesar Rp11.885.588.216,00;
2. Perolehan Hasil Tindak Lanjut Normalisasi sebesar Rp11.734.449.600,00 yang terdapat pada Ditjen PPKTrans sebesar Rp4.140.976.600,00, Ditjen PKTrans sebesar Rp3.936.016.500,00, BPSDM sebesar Rp3.657.456.500,00;
3. Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP sebesar Rp10.201.852.821,00 terdapat pada Ditjen PPKTrans sebesar Rp7.946.593.350,00 dan BPSDM sebesar Rp2.255.259.471,00;
4. Transaksi Normalisasi BMN sebesar Rp3.611.495.050,00 yang terdapat pada Ditjen PDP sebesar Rp3.786.050,00 dan Ditjen PKTrans sebesar Rp3.607.709.000,00;
5. Reklasifikasi Masuk sebesar Rp3.266.156.850,00 yang terdapat pada Ditjen PPKTrans sebesar Rp534.959.350,00 dan BPSDM sebesar Rp2.731.197.500,00;
6. Pengembangan Melalui KDP sebesar Rp1.733.888.285,00 yang terdapat pada BPSDM sebesar Rp1.684.266.285,00

- dan Setjen sebesar Rp49.622.000,00;
7. Penerimaan Aset Tetap Renovasi sebesar Rp1.110.212.849,00 terdapat pada Setjen;
  8. Saldo Awal sebesar Rp778.030.000,00 terdapat pada Ditjen PKTrans;

Adapun rincian mutasi keluar sebagai berikut:

1. Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya sebesar Rp117.656.655.115,00 yang terdapat pada Ditjen PPDT sebesar Rp6.128.420.021,00, Ditjen PPKTrans sebesar Rp111.380.747.094,00 dan BPSDM sebesar Rp147.488.000,00;
2. Transfer Keluar sebesar Rp111.398.974.840,00 yang terdapat pada Ditjen PPKTrans sebesar Rp68.362.922.411,00, Ditjen PKTrans sebesar Rp31.150.464.213,00 dan BPSDM sebesar Rp11.885.588.216,00;
3. Reklasifikasi Keluar sebesar Rp3.811.280.559,00 yang terdapat pada Ditjen PPKTrans sebesar Rp534.959.350,00 dan BPSDM sebesar Rp3.276.321.209,00;
4. Transaksi Normalisasi BMN sebesar Rp2.903.751.000,00 yang terdapat pada Ditjen PPKTrans sebesar Rp1.997.364.000,00 dan BPSDM sebesar Rp906.387.000,00;
5. Hibah (Keluar) sebesar Rp999.451.000,00 terdapat pada Ditjen PPKTrans;
6. Usulan Barang Hibah DK/TP sebesar Rp504.850.000,00 terdapat pada Ditjen PDP;
7. Usulan Barang Hibah DK/TP (Semester II Dokumen TAYL) sebesar Rp455.610.000,00 terdapat pada Ditjen PPKTrans;
8. Hibah Keluar (Semester II Dokumen TAYL) sebesar Rp174.250.000,00 terdapat pada Ditjen PPKTrans;

### C.13 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan  
Rp857.833.129.797,00

Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp857.833.129.797,00 dan Rp808.949.560.937,00. Terdapat kenaikan nilai aset Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp48.883.568.860,00 atau 6,04 persen dibandingkan 2020.

Perbandingan nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi Per 31 Desember 2021 dan 2020 dapat dilihat pada berikut:

*Rincian Aset Tetap JIJ per Unit Kerja Eselon I  
Per 31 Desember 2021 dan 2020*

*(Dalam Rupiah)*

Kode	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Naik/Turun	
				Nilai	%
067.03	Ditjen PDP	738.709.450,00	2.164.271.375,00	(1.425.561.925,00)	(65,87)
067.07	Ditjen PPKTrans	822.282.454.975,00	463.904.966.254,00	358.377.488.721,00	77,25
067.08	Ditjen PKTRans	13.770.764.537,00	321.839.122.473,00	(308.068.357.936,00)	(95,72)
067.09	BPSDM	13.402.132.593,00	19.273.084.543,00	(5.870.951.950,00)	(30,46)
067.10	Setjen	1.768.116.292,00	1.768.116.292,00	-	-
067.11	BPI	5.870.951.950,00	-	5.870.951.950,00	100,00
<b>JUMLAH</b>		<b>857.833.129.797,00</b>	<b>808.949.560.937,00</b>	<b>48.883.568.860,00</b>	<b>6,04</b>

Terdapat Aset Jalan, Irigasi, dan Jalanan berupa Jalan, Saluran, Drainase, dan gorong – gorong sebesar Rp6.467.862.511,00 pada Ditjen PPKTrans satker Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas. Aset JIJ ini merupakan pembelian dari belanja modal lainnya – penanganan Covid – 19 yang termasuk dalam PEN sektor ketahanan Pangan dengan kegiatan bantuan sarana Produksi Pertanian.

Adapun mutasi/perubahan nilai aset Jalan, Irigasi dan Jaringan Per 31 Desember 2021 sebagai berikut:

*Mutasi/Perubahan Jalan, Irigasi dan Jaringan  
Per 31 Desember 2021*

*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	NILAI
<b>Saldo Awal</b>	<b>808.949.560.937,00</b>
<b>Mutasi tambah:</b>	<b>900.254.735.075,00</b>
Transfer Masuk	822.000.339.121,00
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	38.728.931.385,00
Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	22.070.979.113,00
Saldo Awal	13.296.595.594,00
Transaksi Normalisasi BMN	3.111.108.612,00
Penyelesaian Pembangunan Langsung	799.523.000,00
Reklasifikasi Masuk	177.314.250,00
Pengembangan Nilai Aset	69.944.000,00
<b>Mutasi kurang:</b>	<b>851.371.166.215,00</b>
Transfer Keluar	640.661.759.757,00
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	182.395.860.364,00
Hibah (Keluar)	12.364.468.450,00
Hibah Keluar (semester II dokumen semester I)	6.284.333.336,00
Usulan Barang Hibah DK/TP (semester II dokumen TAYL)	4.256.537.300,00
Transaksi Normalisasi BMN	1.928.170.542,00
Hibah Keluar (semester II dokumen TAYL)	1.869.300.000,00
Usulan Barang Hibah DK/TP	1.432.871.000,00
Reklasifikasi Keluar	177.314.250,00
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	551.216,00
<b>Saldo Akhir</b>	<b>857.833.129.797,00</b>
Akumulasi Penyusutan	314.423.172.477,00
<b>Nilai Buku Akhir</b>	<b>543.409.957.320,00</b>

Adapun rincian mutasi tambah sebagai berikut:

1. Transfer Masuk sebesar Rp822.000.339.121,00 yang terdapat pada Ditjen PPDT sebesar Rp6.135.669.450,00, Ditjen PPKTrans sebesar Rp809.993.717.721,00, dan BPI sebesar Rp5.870.951.950,00;
2. Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP sebesar Rp38.728.931.385,00 terdapat pada Ditjen PPKTrans;
3. Perolehan Hasil Tindak Lanjut Normalisasi sebesar Rp22.070.979.113,00 yang terdapat pada Ditjen PPKTrans sebesar Rp4.773.794.725,00 dan Ditjen PKTrans sebesar Rp17.297.184.388,00;
4. Saldo Awal sebesar Rp13.296.595.594,00 terdapat pada Ditjen PKTrans;

5. Transaksi Normalisasi BMN sebesar Rp3.111.108.612,00 yang terdapat pada Ditjen PDP sebesar Rp7.309.075,00 dan Ditjen PKTrans sebesar Rp3.103.799.537,00;
6. Penyelesaian Pembangunan Langsung sebesar Rp799.523.000,00 terdapat pada Ditjen PPKTrans;
7. Reklasifikasi Masuk sebesar Rp177.314.250,00 terdapat pada Ditjen PPKTrans;
8. Pengembangan Nilai Aset sebesar Rp69.944.000,00 terdapat pada Ditjen PPKTrans;

Adapun rincian mutasi keluar sebagai berikut:

1. Transfer Keluar sebesar Rp640.661.759.757,00 yang terdapat pada Ditjen PPKTrans sebesar Rp293.024.870.352,00, Ditjen PKTrans sebesar Rp341.765.937.455,00 dan BPSDM sebesar Rp5.870.951.950,00;
2. Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya sebesar Rp182.395.860.364,00 yang terdapat pada Ditjen PPDT sebesar Rp6.135.669.450,00 dan Ditjen PPKTrans sebesar Rp176.260.190.914,00;
3. Hibah (Keluar) sebesar Rp12.364.468.450,00 terdapat pada Ditjen PPKTrans;
4. Hibah Keluar (semester II dokumen semester I) sebesar Rp6.284.333.336,00 terdapat pada Ditjen PPKTrans;
5. Usulan Barang Hibah DK/TP (semester II dokumen TAYL) sebesar Rp4.256.537.300,00 terdapat pada Ditjen PPDT;
6. Transaksi Normalisasi BMN sebesar Rp1.928.170.542,00 terdapat pada Ditjen PKTrans;
7. Hibah Keluar (semester II dokumen TAYL) sebesar Rp1.836.650.000,00 terdapat pada Ditjen PPKTrans;
8. Usulan Barang Hibah DK/TP sebesar Rp1.432.871.000,00 terdapat pada Ditjen PDP;
9. Reklasifikasi Keluar sebesar Rp177.314.250,00 terdapat pada Ditjen PPKTrans;

10. Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas sebesar Rp551.216,00 terdapat pada Ditjen PPKTrans.

#### C.14 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya  
Rp115.537.418.571,00

Nilai Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp115.537.418.571,00 dan Rp121.688.849.932,00. Terdapat penurunan nilai Aset Tetap Lainnya sebesar Rp6.151.431.361,00 atau 5,06 persen dibandingkan 31 Desember 2021. Perbandingan rincian nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi per 31 Desember 2021 dan 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

*Rincian Aset Tetap Lainnya per Unit Kerja Eselon I  
Per 31 Desember 2021 dan 2020*

*(Dalam Rupiah)*

Kode	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Naik/Turun	
				Nilai	%
067.02	Inspektorat Jenderal	49.875.000,00	49.875.000,00	-	-
067.03	Ditjen PDP	409.076.760,00	409.076.760,00	-	-
067.04	Ditjen PEID	466.516.450,00	466.516.450,00	-	-
067.06	Ditjen PPDT	1.878.310.000,00	1.878.310.000,00	-	-
067.07	Ditjen PPKTrans	111.364.180.813,00	10.946.610.600,00	100.417.570.213,00	<b>90,17</b>
067.08	Ditjen PKTRans	-	106.499.500.198,00	(106.499.500.198,00)	<b>(100,00)</b>
067.09	BPSDM	501.958.424,00	561.724.924,00	(59.766.500,00)	<b>(11,91)</b>
067.10	Setjen	810.713.124,00	877.236.000,00	(66.522.876,00)	<b>(8,21)</b>
/067.11	BPI	56.788.000,00	-	56.788.000,00	<b>100,00</b>
<b>JUMLAH</b>		<b>115.537.418.571,00</b>	<b>121.688.849.932,00</b>	<b>(6.151.431.361,00)</b>	<b>(5,06)</b>

Adapun rincian mutasi/perubahan nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

*Mutasi/Perubahan Aset Tetap Lainnya  
Per 31 Desember 2021*

*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	NILAI
<b>Saldo Awal</b>	<b>121.688.849.932,00</b>
<b>Mutasi tambah:</b>	<b>214.145.539.031,00</b>
Transfer Masuk	201.450.701.867,00
Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	5.333.309.443,00
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	3.425.525.910,00
Penyelesaian Pembangunan Langsung	2.815.981.978,00
Reklasifikasi Masuk	493.266.709,00
Saldo Awal	469.225.000,00
Pembelian	143.206.124,00
Pengembangan Nilai Aset	14.322.000,00
<b>Mutasi kurang:</b>	<b>220.296.970.392,00</b>
Transfer Keluar	165.869.666.245,00
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	36.900.176.971,00
Hibah Keluar (semester II dokumen TAYL)	6.174.552.000,00
Transaksi Normalisasi BMN	5.455.309.443,00
Hibah Keluar (semester II dokumen semester I)	2.672.223.000,00
Hibah (Keluar)	2.192.213.246,00
Koreksi Pencatatan	1.022.392.099,00
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	10.437.388,00
<b>Saldo Akhir</b>	<b>115.537.418.571,00</b>
Akumulasi Penyusutan	8.738.769.742,00
<b>Nilai Buku Akhir</b>	<b>106.798.648.829,00</b>

Adapun rincian mutasi tambah sebagai berikut:

1. Transfer Masuk sebesar Rp201.450.701.867,00 yang terdapat pada Ditjen PPKTrans sebesar Rp201.391.713.867,00, Setjen sebesar Rp2.200.000,00 dan BPI sebesar Rp56.788.000,00;
2. Perolehan Hasil Tindak Lanjut Normalisasi sebesar Rp5.333.309.443,00 yang terdapat pada Ditjen PPKTrans sebesar Rp5.003.325.398,00 dan BPSDM sebesar Rp329.984.045,00;
3. Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP sebesar Rp3.425.525.910,00 yang terdapat pada Ditjen PPKTrans;
4. Penyelesaian Pembangunan Langsung sebesar Rp2.815.981.978,00 yang terdapat pada Ditjen PPKTrans sebesar Rp2.202.775.838,00, BPSDM sebesar Rp19.000.000,00 dan BPI sebesar Rp594.206.140,00;
5. Reklasifikasi Masuk sebesar Rp493.266.709,00 terdapat pada BPSDM;

6. Saldo Awal sebesar Rp469.225.000,00 terdapat pada Ditjen PKTrans;
7. Pembelian sebesar Rp143.206.124,00 yang terdapat pada Ditjen PPKTrans sebesar Rp3.779.000,00 dan Setjen sebesar Rp139.427.124,00;
8. Pengembangan Nilai Aset sebesar Rp14.322.000,00 yang terdapat pada Ditjen PPKTrans sebesar Rp10.582.000,00 dan BPSDM sebesar Rp3.740.000,00.

Adapun rincian mutasi keluar sebagai berikut:

1. Transfer Keluar sebesar Rp165.869.666.245,00 yang terdapat pada Ditjen PPKTrans sebesar Rp58.876.132.297,00, Ditjen PKTrans sebesar Rp105.824.333.099,00, BPSDM sebesar Rp571.254.709,00, dan BPI 597.946.140,00;
2. Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya sebesar Rp36.900.176.971,00 yang terdapat pada Ditjen PPKTrans sebesar Rp36.691.248.471,00, BPSDM sebesar Rp778.500,00 dan Setjen sebesar Rp208.150.000,00;
3. Hibah Keluar (semester II dokumen TAYL) sebesar Rp6.174.552.000,00 terdapat pada Ditjen PPKTrans;;
4. Transaksi Normalisasi BMN sebesar Rp5.455.309.443,00 yang terdapat pada Ditjen PKTrans sebesar Rp5.125.325.398,00 dan BPSDM sebesar Rp329.984.045,00;
5. Hibah Keluar (semester II Dokumen semester I) sebesar Rp2.672.223.000,00 terdapat pada Ditjen PPKTrans;
6. Hibah (Keluar) sebesar Rp2.192.213.246,00 terdapat pada Ditjen PPKTrans;
7. Koreksi Pencatatan sebesar Rp1.022.392.099,00 terdapat pada Ditjen PKTrans;
8. Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas sebesar Rp10.437.388,00 terdapat pada Ditjen PPKTrans.

Pada Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi nilai Aset Tetap Renovasi per 31 Desember 2021 sebesar Rp120.467.051.882,00 dengan rincian per UKE-I sebagai berikut:

*Rincian Aset Tetap Renovasi per Unit Kerja Eselon I  
Per 31 Desember 2021*

*(Dalam Rupiah)*

<b>Kode</b>	<b>Nama UKE I</b>	<b>Jumlah</b>
067.03	Ditjen PDP	36.355.000,00
067.04	Ditjen PEID	466.516.450,00
067.06	Ditjen PPDT	1.878.310.000,00
067.07	Ditjen PPKTrans	111.216.212.288,00
067.09	BPSDM	329.984.045,00
	<b>Total</b>	<b>113.927.377.783,00</b>

1. Aset tetap renovasi Ditjen PDP per 31 Desember 2021 sebesar Rp36.355.000,00 atas perubahan belanja pemeliharaan untuk dikapitalisasikan menjadi aset Ditjen PDP terkait pembuatan grill selokan area belakang gedung Ditjen PDP;
2. Aset Tetap Renovasi Ditjen PEID per 31 Desember 2021 sebesar Rp466.516.450,00 merupakan renovasi gedung/bangunan Tahun 2016 yang digunakan oleh Ditjen PKP. Aset tersebut merupakan milik Kementerian Dalam Negeri yang digunakan oleh Ditjen PKP sesuai dengan Surat Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 011/4812/SJ Tanggal 26 Agustus 2015 kepada Sekretariat Jenderal Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi perihal Penggunaan Gedung Kantor Eks. Ditjen Dukcapil Jalan TMP Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan, sedangkan alih status Bangunan/ Gedung tersebut dari Kementerian Dalam Negeri ke Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi masih dalam proses;
3. Aset Tetap Renovasi Ditjen PPDT per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.878.310.000,00 merupakan pekerjaan renovasi

gedung dan bangunan sebesar Rp1.596.000.000,00 yang berlokasi di Jalan Abdul Muis No. 7 Jakarta Pusat milik Kementerian Sekretariat Negara yang dipakai untuk pelaksanaan pemerintahan oleh Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi serta pekerjaan perencanaan dan pengawasannya sebesar Rp84.560.000,00 dan adanya penambahan Aset Tetap Renovasi pada Ditjen PPDT merupakan renovasi ruang tunggu tamu menjadi cafeteria. Pengerjaan renovasi tersebut sesuai dengan kontrak No. 019/SPK/SATKER-PPK.I/XI/2017 tanggal 1 November 2017 dengan nilai kontrak Rp197.750.000,00. Aset Tetap Lainnya merupakan Aset Tetap dalam Renovasi Gedung yang saat ini sedang diproses pelaporan atas renovasi gedung kepada Sekretariat Negara;

4. Aset Tetap Renovasi pada Ditjen PPKTrans per 31 Desember 2021 sebagai berikut:

*Rincian Aset Tetap Renovasi per Satker  
Ditjen PPKTrans per 31 Desember 2021*

*(Dalam Rupiah)*

No.	Kode Satker	Nama Satker	Nilai
1	067.07.069393	DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK PROVINSI ACEH	919.983.499,00
2	067.07.350120	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK KAB. ACEH UTARA	599.200.000,00
3	067.07.350172	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SUMATERA SELATAN	58.261.000,00
4	067.07.350183	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI LAMPUNG	534.750.000,00
5	067.07.350189	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN BARAT	108.713.000,00
6	067.07.350288	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. LUWU UTARA	19.000.000,00
7	067.07.350289	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KAB. LUWU TIMUR	672.412.600,00
8	067.07.350304	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. KONAWA SELATAN	8.053.690.600,00
9	067.07.350396	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. HALMAHERA TIMUR	158.300.000,00
10	067.07.350430	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN FAK-FAK	1.379.636.000,00
11	067.07.350467	DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	95.460.008.288,00
12	067.07.417757	DINAS NAKERTRANS KAB. BULUNGAN	3.137.422.301,00
13	067.07.419109	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL KAB. POL	114.835.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>111.216.212.288,00</b>

5. Aset Tetap Renovasi BPSDM per 2020 sebesar Rp329.984.045,00 adalah renovasi gedung Balai Besar Pelatihan Masyarakat Desa, PPDT dan Transmigrasi Jakarta milik instansi Kementerian Ketenagakerjaan RI, sudah ditindaklanjuti oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Desa,

PDT, dan Transmigrasi dengan mengajukan permohonan penyerahan Aset Tetap dalam Renovasi kepada Sekretariat Jenderal Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi melalui surat Nomor: 686/SJ-KDPPDPT/05/2017 Tanggal 17 Mei 2017, pada tanggal pelaporan masih dalam proses penyelesaian.

### C.15 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan  
Rp17.670.622.284,00

Nilai Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp17.670.622.284,00 dan Rp30.177.239.114,00. Terdapat penurunan nilai aset Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp12.506.616.830,00 atau 41,44 persen dibandingkan 2020.

Perbandingan nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Unit Kerja Eselon I di Lingkup Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi Per 31 Desember 2021 dan 2020 dapat dilihat pada berikut:

*Rincian Aset Tetap KDP pada Unit Kerja Eselon I  
Per 31 Desember 2021 dan 2020*

*(Dalam Rupiah)*

Kode	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Naik/Turun	
				Nilai	%
067.07	Ditjen PPKTrans	17.617.172.284,00	10.948.042.433,00	6.669.129.851,00	<b>60,92</b>
067.08	Ditjen PKTRans	-	19.075.916.681,00	(19.075.916.681,00)	<b>(100,00)</b>
067.09	BPSDM	53.450.000,00	153.280.000,00	(99.830.000,00)	<b>(65,13)</b>
<b>JUMLAH</b>		<b>17.670.622.284,00</b>	<b>30.177.239.114,00</b>	<b>(12.506.616.830,00)</b>	<b>(41,44)</b>

Adapun rincian mutasi/perubahan nilai aset Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

*Mutasi/Perubahan Konstruksi Dalam Pengerjaan  
Per 31 Desember 2021*

*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	NILAI
<b>Saldo Awal</b>	<b>30.177.239.114,00</b>
<b>Mutasi tambah:</b>	<b>63.740.667.311,00</b>
Pengembangan KDP	38.667.714.711,00
Transfer Masuk KDP	21.428.275.740,00
Perolehan/Penambahan KDP	3.644.676.860,00
<b>Mutasi kurang:</b>	<b>76.247.284.141,00</b>
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	52.903.320.116,00
Transfer Keluar KDP	21.428.275.740,00
Pengembangan Melalui KDP	1.733.888.285,00
Penghapusan/Penghentian KDP (semester II dokumen semester I)	181.800.000,00
<b>Saldo Akhir</b>	<b>17.670.622.284,00</b>

Terdapat KDP pada Laporan Keuangan Kemendesa PPDTT dengan uraian sebagai berikut:

1. KDP Ditjen PPKTrans senilai Rp17.617.172.284,00 diuraikan sebagai berikut:

No	Uraian Satker	Tanah dalam pengerjaan	peralatan dan mesin dlm pengerjaan	gedung dan bangunan dlm pengerjaan	jalan, irigasi dan jaringan dlm pengerjaan	Aset Tetap Lainnya dlm pengerjaan	KDP
1	Dinas Nakertrans Kab. Halmahera Selatan	-	-	19.782.000,00	603.290.000,00	2.179.522.000,00	2.802.594.000,00
2	Dinas Nakertrans Kab. Lima Puluh Kota	27.720.000,00	-	265.665.958,00	876.016.881,00	-	1.169.402.839,00
3	Dinas Nakertrans Kab. Pesisir Selatan	-	-	-	463.361.920,00	-	463.361.920,00
4	Dinas Nakertrans Kab. Aceh Selatan	-	-	543.719.080,00	599.255.685,00	-	1.142.974.765,00
5	Dinas Nakertrans Kab. Bolaang Mongondow Timur	-	-	-	179.232.300,00	-	179.232.300,00
6	Dinas Nakertrans Kab. Donggala	-	59.351.800,00	584.102.400,00	74.397.800,00	-	717.852.000,00
7	Dinas Nakertrans Kab. Sidrap	-	-	-	8.089.083.015,00	-	8.089.083.015,00
8	Dinas Nakertrans Prov. Bengkulu	-	-	-	702.612.351,00	-	702.612.351,00
9	Dinas Nakertrans Kab. Takalar	-	-	-	202.805.000,00	-	202.805.000,00
10	Dinas Nakertrans Kab. Kolaka Timur	-	-	-	109.494.994,00	-	109.494.994,00
11	Dinas Nakertrans Kab. Luwu Timur	-	-	2.037.759.100,00	-	-	2.037.759.100,00
	<b>Jumlah</b>	<b>27.720.000,00</b>	<b>59.351.800,00</b>	<b>3.451.028.538,00</b>	<b>11.899.549.946,00</b>	<b>2.179.522.000,00</b>	<b>17.617.172.284,00</b>
<b>Total Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp17.617.172.284,00</b>							

- Konstruksi Dalam Pengerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Simeuleu sebesar Rp179.670.000,00 sudah selesai dikerjakan tetapi karena lanjutan KDP nya tahun 2021 menggunakan akun 526, telah dilakukan koreksi ke aset sehingga menjadi aset definitif pada Laporan Keuangan Audited 2021;
- Konstruksi Dalam Pengerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Kuala sebesar Rp59.382.000,00 sudah selesai dikerjakan tetapi karena

lanjutan KDP nya tahun 2021 menggunakan akun 526, telah dilakukan koreksi ke aset sehingga menjadi aset definitif pada Laporan Keuangan Audited 2021;

- Konstruksi Dalam Pengerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sidrap sebesar Rp2.457.543.015,00 sudah selesai dikerjakan tetapi karena lanjutan KDP nya tahun 2021 menggunakan akun 526, telah dilakukan koreksi ke aset sehingga menjadi aset definitif pada Laporan Keuangan Audited 2021;
- Konstruksi Dalam Pengerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Luwu Timur sebesar Rp1.106.669.500,00 sudah selesai dikerjakan tetapi karena lanjutan KDP nya tahun 2021 menggunakan akun 526, telah dilakukan koreksi ke aset sehingga menjadi aset definitif pada Laporan Keuangan Audited 2021;
- Konstruksi Dalam Pengerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muna sebesar Rp702.896.255,00 sudah selesai dikerjakan tetapi karena lanjutan KDP nya tahun 2021 menggunakan akun 526, telah dilakukan koreksi ke aset sehingga menjadi aset definitif pada Laporan Keuangan Audited 2021;
- Konstruksi Dalam Pengerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bima sebesar Rp3.109.000.000,00 sudah selesai dikerjakan tetapi karena lanjutan KDP nya tahun 2021 menggunakan akun 526, telah dilakukan koreksi ke aset sehingga menjadi aset definitif pada Laporan Keuangan Audited 2021;
- Konstruksi Dalam Pengerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumba Timur sebesar Rp60.000.000,00 sudah selesai dikerjakan tetapi karena lanjutan KDP nya tahun 2021 menggunakan akun 526, telah dilakukan koreksi ke aset sehingga menjadi aset definitif pada Laporan Keuangan Audited 2021;

- Konstruksi Dalam Pengerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Timor Tengah Utara sebesar Rp3.888.746.000,00 sudah selesai dikerjakan tetapi karena lanjutan KDP nya tahun 2021 menggunakan akun 526, telah dilakukan koreksi ke aset sehingga menjadi aset definitif pada Laporan Keuangan Audited 2021;
- Konstruksi Dalam Pengerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Merauke sebesar Rp92.964.900,00 sudah selesai dikerjakan tetapi karena lanjutan KDP nya tahun 2021 menggunakan akun 526, telah dilakukan koreksi ke aset sehingga menjadi aset definitif pada Laporan Keuangan Audited 2021;;
- Konstruksi Dalam Pengerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Utara sebesar Rp3.577.407.000,00 sudah selesai dikerjakan tetapi karena lanjutan KDP nya tahun 2021 menggunakan akun 526, telah dilakukan koreksi ke aset sehingga menjadi aset definitif pada Laporan Keuangan Audited 2021;
- Konstruksi Dalam Pengerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Fak – Fak sebesar Rp105.059.700,00 sudah selesai dikerjakan tetapi karena lanjutan KDP nya tahun 2021 menggunakan akun 526, telah dilakukan koreksi ke aset sehingga menjadi aset definitif pada Laporan Keuangan Audited 2021;
- Konstruksi Dalam Pengerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov Sulawesi Barat sebesar Rp590.010.916,00 sudah selesai dikerjakan tetapi karena lanjutan KDP nya tahun 2021 menggunakan akun 526, telah dilakukan koreksi ke aset sehingga menjadi aset definitif pada Laporan Keuangan Audited 2021;
- Konstruksi Dalam Pengerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mamuju Utara sebesar Rp966.928.599,00 sudah selesai dikerjakan tetapi karena lanjutan KDP nya tahun 2021 menggunakan akun 526,

telah dilakukan koreksi ke aset sehingga menjadi aset definitif pada Laporan Keuangan Audited 2021;

- Konstruksi Dalam Pengerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kolaka Timur sebesar Rp109.494.994,00 awalnya sudah direncanakan lanjutannya pada Tahun 2021, akan tetapi dananya terkena *refocusing* dan sampai saat ini belum ada tindak lanjut penyelesaiannya;
- Konstruksi Dalam Pengerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu sebesar Rp702.612.351,00 awalnya sudah direncanakan lanjutan pada Tahun 2021, akan tetapi dananya terkena *refocusing* dan sampai saat ini belum ada tindak lanjut penyelesaiannya;
- Konstruksi Dalam Pengerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan sebesar Rp463.361.920,00, berupa Pekerjaan Pembangunan Embung KTM Lunang Silaut tahun 2019. Terjadi pemutusan kontrak dikarenakan rekanan tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya sampai dengan batas waktu penyelesaian 31 Desember 2019 (pekerjaan belum 100%). Di tahun 2021 tidak dapat dilanjutkan karena satker tidak mendapat anggaran. Akan dikoordinasikan dengan Teknis dan APIP apakah pembangunan Embung tersebut akan dilanjutkan kembali atau dihentikan permanen;
- Konstruksi Dalam Pengerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan sebesar Rp2.802.594.000,00 Dihentikan Permanen Tahun 2019. Pekerjaan pembangunan jembatan tersebut terkena wan prestasi, dan fisiknya tidak fungsional karena bangunannya miring, akan berkoordinasi dengan APIP agar dihentikan permanen karena kalau dilanjutkan tidak akan fungsional;
- Konstruksi Dalam Pengerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Selatan sebesar Rp1.142.974.765,00. KDP tersebut merupakan

pembangunan fisik pada Tahun 2015, pada saat itu terjadi proses hukum yang mengakibatkan penghentian pekerjaan. Pada Tahun 2021 Bupati Aceh Selatan berkoordinasi dengan Ditjen PPKTrans apakah KDP tersebut bisa di fungsionalkan oleh Ditjen PPKTrans dengan melanjutkan pembangunan KDP tersebut. Untuk saat ini Ditjen PPKTrans meminta APIP untuk cek lapangan terhadap KDP tersebut apakah akan dilanjutkan lagi atau di pindah KDP tersebut ke Pemerintah Daerah untuk dilanjutkan pembangunannya oleh pemerintah daerah;

- Konstruksi Dalam Pengerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp1.169.402.839,00. Pembangunan KDP tersebut terjadi pada tahun 2012 dan 2013, dan terjadi proses hukum atas KDP tersebut. Sampai saat ini belum dilakukan cek fisik dilapangan oleh APIP untuk menghapus KDP tersebut dikarenakan KDP tersebut tidak fungsional;
- Konstruksi Dalam Pengerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Donggala sebesar Rp717.852.000,00. Pembangunan KDP tersebut terjadi pada tahun 2019, pada saat pembangunan sudah ditarik uang muka 20%. Setelah diperiksa ternyata lokasi tersebut tidak masuk kawasan transmigrasi yang ditetapkan oleh SK Menteri dan tidak ada redesain RTSP (Rencana Teknis Satuan Permukiman Transmigrasi), karena pergeseran tempat tersebut maka perlu ada redesain. dikarenakan hal tersebut maka dinas tidak melanjutkan lagi pembangunan tersebut;
- Konstruksi Dalam Pengerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Takalar sebesar Rp202.805.000,00. Pembangunan KDP tersebut pada Tahun 2016, da terdapat kasus hukum pada saat KDP tersebut dibangun. Akan dikoordinasikan dengan APIP untuk diputuskan apakah KDP tersebut bisa untuk

- dihentikan permanen karena tidak fungsional;
- Konstruksi Dalam Pengerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebesar Rp179.232.300,00. Pembangunan KDP tersebut pada Tahun 2012, pada saat itu pembangunan dihentikan karena ada pemotongan anggaran, tetapi sampai saat ini belum dilanjutkan lagi pembangunannya;
2. Aset KDP BPSDM per 31 Desember 2020 senesar Rp153.280.000,00 yang terbagi menjadi 2 pekerjaan yaitu *Caffe Gedung Utama* dan *Home Stay* terdapat pada Balai Latihan Masyarakat Denpasar. Adapun rincian aset KDP sebagai berikut:
- Aset KDP berupa *Home Stay* sebesar Rp53.450.000,00 sesuai dengan DIPA Nomor:DIP-067-09.2.350485/2020 tanggal 5 Desember 2019 dimana terdapat Belanja Modal Pembangunan Gedung dan Bangunan senilai Rp3.797.782.000,00 namun pada tahun 2020 hanya terealisasi sebesar Rp53.450.000,00 berupa Perencanaan Pembuatan Home Stay senilai Rp53.450.000,00 dengan Kontrak Nomor SPK Nomor:22.2/K05/KU.02.02/III/2020 tanggal 2 Maret 2020 yang dilaksanakan oleh PT. Dafrosa alamat jalan Gandapura No.15 Denpasar dengan jangka waktu pengerjaan selama 45 hari dari tanggal 02 Maret s.d. 15 April 2020. Sehubungan dengan adanya pandemi Covid-19, anggaran belanja modal gedung dan bangunan direalokasi untuk menangani pandemi sehingga pembangunan di BPPMDDTT Denpasar tahun 2020 tertunda;
  - Aset KDP *Caffe Gedung Utama* sebesar Rp99.830.000,00 sesuai dengan DIPA Nomor:DIP-067-09.2.350485/2020 tanggal 5 Desember 2019 dimana terdapat Belanja Modal Pembangunan Gedung dan Bangunan senilai Rp3.797.782.000,00 dengan Kontrak Nomor SPK

Nomor:22.2/K06/KU.02.02/III/2020 yang dilaksanakan oleh CV. Permata Konsultan Jalan WR. Supratman Gang II No. 9 Denpasar dengan jangka waktu pengerjaan selama 45 hari dari tanggal 02 Maret s.d. 15 April 2020. Sehubungan dengan adanya pandemi Covid-19, anggaran belanja modal gedung dan bangunan direalokasi untuk menangani pandemi sehingga pembangunan di BPPMDDTT Denpasar tahun 2020 tertunda. Pada tahun 2021 pengerjaan *Caffe* Gedung Utama telah dilanjutkan dan selesai.

Sehingga saldo KDP BPSDM per 31 Desember 2021 sebesar Rp53.450.000,00 berupa *Home Stay* yang sampai saat ini belum dilanjutkan.

### C.16 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan  
Aset Tetap  
(Rp725.372.452.628,00)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 2021 dan 2020 adalah masing-masing (Rp725.372.452.628,00) dan (Rp600.262.391.761,00).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021.

#### Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per 31 Desember 2021

(Dalam Rupiah)

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	401.220.950.084,00	333.662.679.508,00	67.558.270.576,00
2	Gedung dan Bangunan	603.103.929.447,00	68.547.830.901,00	534.556.098.546,00
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	857.833.129.797,00	314.423.172.477,00	543.409.957.320,00
4	Aset Tetap Lainnya	115.537.418.571,00	8.738.769.742,00	106.798.648.829,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.977.695.427.899,00</b>	<b>725.372.452.628,00</b>	<b>1.252.322.975.271,00</b>

### C.17 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Rp30.714.287,00

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp30.714.287,00 dan Rp32.714.287,00. Rincian Piutang Tagihan TP/TGR sebagai berikut:

Rincian Piutang Tagihan TP/TGR per Eselon I  
Per 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Rupiah)

Kode	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Naik/Turun	
				Nilai	%
067.07	Ditjen PPKTrans	30.714.287,00	30.714.287,00	-	-
067.09	BPSDM	-	2.000.000,00	(2.000.000,00)	(100,00)
<b>JUMLAH</b>		<b>30.714.287,00</b>	<b>32.714.287,00</b>	<b>(2.000.000,00)</b>	<b>(6,11)</b>

Piutang TP/TGR per 31 Desember 2021 Pada Ditjen PPKTrans sebesar Rp30.714.287,00 merupakan Pencatatan atas hilangnya kendaraan dinas roda 4 sesuai dengan atensi temuan hasil audit surat itjen No.Rhs.232/PW.03.01/VII/2019 Ditjen PPKTrans Tanggal 30 Juli 2019, dimana piutang jangka panjang yang harus dibayarkan sesuai dengan *Time Line* di SKTJM sebesar Rp30.714.287,00 merupakan piutang jangka Panjang yang harus dibayarkan atau dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yaitu bulan Juli tahun 2022.

Pada BPSDM Penyelesaian Pembayaran Tagihan Tuntutan Ganti Rugi atas motor hilang Honda GL Pro III Nomor Polisi B 5793 JQ atas nama pegawai Bapak Istianto, S.Pd, Untuk pembayaran TGR sebesar Rp4.900.000,00 telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali:

1. Pada tanggal 21 April 2020 sebesar Rp1.000.000,00 dengan No. NTPN DDB298N3DEAR86OP;
2. Pada tanggal 13 Mei 2020 sebesar Rp1.000.000,00

dengan No. NTPN 043CB1JNEPQEVDE5;

3. Tanggal 22 Desember 2020 sebesar Rp900.000,00 dengan No. NTPN 5CE492G4UL21BNN8;

4. Tanggal 31 Maret 2021 sebesar Rp2.000.000,00 dengan No. NTPN 8AEF32G4UTHDQC04.

Dengan demikian saldo Piutang Tuntutan TP/TGR pada BPSDM per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00 (Nihil)

### C.18 Penyisihan Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Penyisihan Piutang Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Rp1.535.714,00)

Saldo Penyisihan Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah (Rp1.535.714,00) dan Rp0,00.

Rincian Penyisihan Piutang Tak tertagih – Piutang TP/TGR Per 31 Desember 2021

(Dalam Rupiah)

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
<b>Piutang Bukan Pajak</b>			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
<b>Jumlah</b>	-	-	-
<b>Bagian Lancar TP/TGR</b>			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
<b>Jumlah</b>	-	-	-
<b>Bagian Lancar TPA</b>			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
<b>Jumlah</b>	-	-	-
Penyisihan PPKTrans	30.714.287,00	5,00%	1.535.714,35
<b>Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih</b>	<b>30.714.287,00</b>		<b>1.535.714,35</b>

### C.19 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (NETTO)

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (NETTO) Rp29.178.573,00

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto) per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp29.178.573,00 dan Rp0,00.

*Rincian Tuntutan Tagihan TP/TGR (Netto)  
Per 31 Desember 2021*

*(Dalam Rupiah)*

No.	Kualitas	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Bersih
1	Lancar	-	-	-
2	Kurang Lancar	145.767.100,00	11.686.710,00	134.080.390,00
3	Diragukan	-	-	-
4	Macet	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>145.767.100,00</b>	<b>11.686.710,00</b>	<b>134.080.390,00</b>

### C.20 Aset Tak Berwujud

*Aset Tak Berwujud  
Rp9.304.684.004,00*

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah Rp9.304.684.004,00 dan Rp7.737.984.754,00. Aset Tak Berwujud mengalami kenaikan sebesar Rp1.566.699.250,00 atau 20,25 persen dibandingkan 2020.

Rincian Aset Tak Berwujud yang dimiliki Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi per 31 Desember 2021 dan 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

*Rincian Aset Tak Berwujud per Unit Kerja Eselon I  
Per 31 Desember 2021 dan 2020*

*(Dalam Rupiah)*

Kode	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Naik/Turun	
				Nilai	%
067.03	Ditjen PDP	658.899.100,00	658.899.100,00	-	-
067.05	Ditjen PDTu	-	852.370.000,00	(852.370.000,00)	(100,00)
067.06	Ditjen PPDT	852.370.000,00	-	852.370.000,00	100,00
067.07	Ditjen PPKTrans	1.808.464.000,00	-	1.808.464.000,00	100,00
067.08	Ditjen PKTRans	-	1.788.464.000,00	(1.788.464.000,00)	(100,00)
067.09	BPSDM	117.500.000,00	2.584.041.654,00	(2.466.541.654,00)	(95,45)
067.10	Setjen	1.866.680.000,00	1.854.210.000,00	12.470.000,00	0,67
067.11	BPI	4.000.770.904,00	-	4.000.770.904,00	100,00
<b>JUMLAH</b>		<b>9.304.684.004,00</b>	<b>7.737.984.754,00</b>	<b>1.566.699.250,00</b>	<b>20,25</b>

Rincian Aset Tak Berwujud berdasarkan jenisnya dapat dilihat pada tabel berikut:

*Rincian Aset Tak Berwujud  
Berdasarkan Jenisnya Per 31 Desember 2021*

*(Dalam Rupiah)*

No.	Uraian	Nilai
1	Software Komputer	8.692.894.004,00
2	ATB Lainnya	611.790.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>9.304.684.004,00</b>

Daftar Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2021 sebesar Rp7.689.959.004,00 menurut jenisnya pada Masing-Masing Unit Kerja Eselon I dapat dilihat pada tabel berikut:

*Rincian Aset Tak Berwujud per Eselon I  
Per 31 Desember 2021*

*(Dalam Rupiah)*

No	UKE-I	ATB Software	ATB Lainnya	Jumlah
1	Ditjen PDP	658.899.100,00	-	658.899.100,00
2	Ditjen PPDT	852.370.000,00	-	852.370.000,00
3	Ditjen PPKTrans	1.196.674.000,00	-	1.196.674.000,00
4	BPSDM	117.500.000,00	611.790.000,00	729.290.000,00
5	Setjen	1.866.680.000,00		1.866.680.000,00
6	BPI	4.000.770.904,00		4.000.770.904,00
<b>Jumlah</b>		<b>8.692.894.004,00</b>	<b>611.790.000,00</b>	<b>9.304.684.004,00</b>

Mutasi Aset Tak Berwujud Per 31 Desember 2021 sebagai berikut:

*Daftar Mutasi Aset Tak Berwujud  
Per 31 Desember 2021*

*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	NILAI
<b>Saldo Awal</b>	<b>7.737.984.754,00</b>
<b>Mutasi tambah:</b>	<b>6.928.493.904,00</b>
Transfer Masuk	5.120.729.904,00
Pengembangan Nilai Aset	1.590.875.000,00
Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	135.071.000,00
Reklasifikasi Masuk	67.500.000,00
Pembelian	12.470.000,00
Saldo Awal	1.848.000,00
<b>Mutasi kurang:</b>	<b>5.361.794.654,00</b>
Transfer Keluar	5.100.729.904,00
Transaksi Normalisasi BMN	115.071.000,00
Reklasifikasi Keluar	67.500.000,00
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	49.000.000,00
Penghapusan	27.645.750,00
Koreksi Pencatatan	1.848.000,00
<b>Saldo Akhir</b>	<b>9.304.684.004,00</b>
Amortisasi	6.875.195.022,00
<b>Nilai Buku Akhir</b>	<b>2.429.488.982,00</b>

Adapun rincian mutasi tambah sebagai berikut:

1. Mutasi Tambah yang berasal dari Transfer Masuk sebesar Rp5.120.729.904,00 terdapat pada Ditjen PPDT sebesar Rp852.370.000,00, Ditjen PPKTrans sebesar Rp1.808.464.000,00, BPSDM sebesar Rp50.000.000,00 dan BPI sebesar Rp2.409.895.904,00
2. Mutasi Tambah yang berasal dari Pengembangan Nilai Aset sebesar Rp1.590.875.000,00 terdapat pada BPI
3. Mutasi Tambah yang berasal dari Perolehan Hasil Tindak Lanjut Normalisasi sebesar Rp135.071.000,00 terdapat pada Ditjen PPKTrans
4. Mutasi Tambah yang berasal dari Reklasifikasi Masuk pada sebesar Rp67.500.000,00 terdapat pada BPSDM
5. Mutasi Tambah yang berasal dari Pembelian sebesar Rp12.470.000,00 terdapat pada Setjen
6. Mutasi Tambah yang berasal dari Saldo Awal sebesar Rp1.848.000,00 terdapat pada Ditjen PPKTrans

Adapun rincian mutasi keluar sebagai berikut:

1. Mutasi Keluar yang berasal dari Transfer Keluar terdapat sebesar Rp5.100.729.904,00 terdapat pada Ditjen PDTu sebesar Rp852.370.000,00, Ditjen PKTrans sebesar Rp1.788.464.000,00 dan BPSDM sebesar Rp2.459.895.904
2. Mutasi Keluar yang berasal dari Transaksi Normalisasi BMN sebesar Rp115.071.000,00 terdapat pada Ditjen PPKTrans
3. Mutasi Keluar yang berasal dari Reklasifikasi Keluar sebesar Rp67.500.000,00 terdapat pada BPSDM
4. Mutasi Keluar yang berasal dari Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya sebesar Rp49.000.000,00 terdapat pada Ditjen PPKTrans sebesar Rp20.000.000,00 dan BPSDM sebesar Rp29.000.000,00
5. Mutasi Keluar yang berasal dari Penghapusan sebesar Rp27.645.750,00 terdapat pada BPSDM

6. Mutasi Keluar yang berasal dari Koreksi Pencatatan sebesar Rp1.848.000,00

### C.21 Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain  
Rp1.428.971.979.371,00

Aset Lain-lain per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah Rp1.428.971.979.371,00 dan Rp1.550.857.892.252,00. Aset Lain-lain adalah Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi serta dalam proses penghapusan dari BMN. Terdapat penurunan nilai Aset Lain- Lain per 31 Desember 2021 sebesar Rp121.885.912.881,00 atau 7,86 persen dibandingkan 2020. Perbandingan rincian nilai Aset Lain- Lain yang dimiliki Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi per 31 Desember 2021 dan 2020 dapat dilihat pada berikut.

#### Rincian Aset Lain- Lain per Unit Kerja Eselon I Per 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Rupiah)

Kode	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Naik/Turun	
				Nilai	%
067.01	Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal	9,00	9,00	-	-
067.02	Itjen	81.485.600,00	81.485.600,00	-	-
067.03	Ditjen PPMD / PDP	271.412.030,00	3.489.229.155,00	(3.217.817.125,00)	(92,22)
067.04	Ditjen PKP / PEID	29.780.259.403,00	32.444.972.403,00	(2.664.713.000,00)	(8,21)
067.05	Ditjen PDTu	-	23.899.633.822,00	(23.899.633.822,00)	(100,00)
067.06	Ditjen PDT / PPD	472.033.745.621,00	448.146.111.799,00	23.887.633.822,00	5,33
067.07	Ditjen PKP2Trans / PPKTrans	914.754.970.440,00	809.378.643.962,00	105.376.326.478,00	13,02
067.08	Ditjen PKTrans	(18.110.620.627,00)	195.817.878.613,00	(213.928.499.240,00)	(109,25)
067.09	BPSDM	2.014.282.378,00	5.684.913.135,00	(3.670.630.757,00)	(64,57)
067.10	Sejjen	28.012.206.517,00	31.915.023.754,00	(3.902.817.237,00)	(12,23)
067.11	BPI	134.238.000,00	-	134.238.000,00	100,00
JUMLAH		1.428.971.979.371,00	1.550.857.892.252,00	(121.885.912.881,00)	(7,86)

Terdapat Aset Tetap yang Tidak digunakan Dalam Operasional Pemerintahan pada satker null (067.01.190132) Akun 166111 sebesar Rp9,00.

Adapun rincian mutasi/perubahan nilai Aset Lain- Lain per 31 Desember 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

*Mutasi/Perubahan Aset Lain- Lain  
Per 31 Desember 2021*

*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	NILAI
<b>Saldo Awal</b>	<b>1.550.857.892.252,00</b>
<b>Mutasi tambah:</b>	<b>386.950.247.163,00</b>
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	386.926.541.528,00
Transaksi Normalisasi BMN (BMN Yang Dihentikan)	23.705.635,00
<b>Mutasi kurang:</b>	<b>508.836.160.044,00</b>
Transfer Keluar (BMN yang dihentikan)	377.290.848.058,00
Hibah Keluar (BMN yang dihentikan)	60.191.258.440,00
Transaksi Normalisasi BMN (BMN Yang Dihentikan)	31.787.601.789,00
Koreksi Pencatatan (BMN yang dihentikan)	15.599.837.364,00
Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (BMN Yang Dihentikan)	6.992.842.541,00
Hibah Keluar BMN yang Dihentikan (semester II dokumen semester I)	6.431.648.773,00
Penghapusan (BMN yang dihentikan)	5.089.288.000,00
Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	2.313.999.689,00
Hibah Keluar BMN yang Dihentikan (semester II dokumen TAYL)	2.100.872.125,00
Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola - BMN yang Dihentikan (semester I dokumen TAYL)	1.037.934.265,00
Penghapusan BMN yang Dihentikan (semester I dokumen TAYL)	29.000,00
<b>Saldo Akhir</b>	<b>1.428.971.979.371,00</b>
Akumulasi Penyusutan	<b>821.092.218.569,00</b>
<b>Nilai Buku Akhir</b>	<b>607.879.760.802,00</b>

Adapun rincian mutasi tambah sebagai berikut:

1. Mutasi Tambah berasal dari Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya sebesar Rp386.926.541.528,00 yang terdapat pada Ditjen PPDT sebesar Rp23.899.633.822,00, Ditjen PPKTrans sebesar Rp351.063.229.586,00, BPSDM sebesar Rp1.983.275.008,00, Setjen sebesar Rp6.722.689.312,00 dan BPI sebesar Rp3.257.713.800,00
2. Mutasi Tambah Transaksi Normalisasi BMN (BMN Yang Dihentikan) sebesar Rp23.705.635,00 terdapat pada BPSDM

Adapun rincian mutasi keluar sebagai berikut:

1. Transfer Keluar (BMN yang dihentikan) sebesar Rp377.290.848.058,00 terdapat pada Ditjen PDTu sebesar Rp23.899.633.822,00, Ditjen PPKTrans sebesar

- Rp178.956.964.986,00, Ditjen PKTrans sebesar  
Rp171.310.773.450,00 dan BPSDM sebesar  
Rp3.123.475.800,00
2. Hibah Keluar (BMN yang Dihentikan) sebesar  
Rp60.191.258.440,00 terdapat pada Ditjen PDP sebesar  
Rp3.206.722.000,00, Ditjen PEID sebesar  
Rp2.664.713.000,00, Ditjen PPKTrans sebesar  
Rp54.319.823.440,00
3. Transaksi Normalisasi BMN (BMN yang Dihentikan) sebesar  
Rp31.787.601.789,00 yang terdapat pada Ditjen PDP  
sebesar Rp11.095.125,00, Ditjen PPDT sebesar  
Rp12.000.000,00, Ditjen PPKTrans sebesar  
Rp3.488.650.384,00, Ditjen PKTrans sebesar  
Rp28.188.950.946,00 dan Setjen sebesar Rp86.905.334,00
4. Koreksi Pencatatan (BMN yang dihentikan) sebesar  
Rp15.599.837.364,00 yang terdapat pada Ditjen PPKTrans  
sebesar Rp12.900.000,00, Ditjen PKTrans sebesar  
Rp14.428.774.844,00 dan Setjen sebesar  
Rp1.158.162.520,00
5. Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (BMN yang  
Dihentikan) sebesar Rp6.992.842.541,00 yang terdiri dari  
BPSDM sebesar Rp815.209.800,00 dan Setjen sebesar  
Rp6.177.632.741,00
6. Hibah Keluar BMN yang Dihentikan (Semester II Dokumen  
Semester I) sebesar Rp6.431.648.773,00 terdapat pada  
Ditjen PPKTrans
7. Penghapusan (BMN yang Dihentikan) sebesar  
Rp5.089.288.000,00 terdiri dari Ditjen PPKTrans sebesar  
Rp376.043.400,00, BPSDM sebesar Rp1.589.768.800,00  
dan BPI sebesar Rp3.123.475.800,00
8. Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap sebesar  
Rp2.313.999.689,00 terdiri dari BPSDM sebesar  
Rp149.128.000,00 dan Setjen sebesar Rp2.164.871.689,00
9. Hibah Keluar BMN yang Dihentikan (Semester II Dokumen

- TAYL) sebesar Rp2.100.872.125,00 terdapat pada Ditjen PPKTrans
10. Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola – BMN yang Dihentikan (Semester II Dokumen TAYL) sebesar Rp1.052.596.093,00 yang terdapat pada Setjen
11. Penghapusan BMN yang Dihentikan (Semester I Dokumen TAYL) sebesar Rp29.000,00 terdapat pada BPSDM

### C.22 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

*Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya  
(Rp827.967.413.591,00)*

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar (Rp827.967.413.591,00) dan (Rp852.115.441.671,00). Rincian akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

*Rincian Akumulasi dan Amortisasi Aset Lainnya  
Per 31 Desember 2021*

*(Dalam Rupiah)*

No.	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
1	ATB Software Komputer	8.692.894.004,00	6.875.195.022,00	1.817.698.982,00
2	ATB Lainnya	611.790.000,00		611.790.000,00
	Jumlah	9.304.684.004,00	6.875.195.022,00	2.429.488.982,00
3	Aset Lain-lain	1.428.971.979.371,00	821.092.218.569,00	607.879.760.802,00
	Jumlah	1.438.276.663.375,00	827.967.413.591,00	610.309.249.784,00

### C.23 Utang kepada Pihak Ketiga

*Utang kepada Pihak Ketiga  
Rp4.356.743.309,00*

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp4.356.743.309,00 dan Rp16.440.891.026,00. Utang kepada Pihak Ketiga mengalami penurunan sebesar Rp12.084.147.717,00 atau 73,50 persen dari tahun 2020. Adapun rincian Utang Kepada Pihak Ketiga pada Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi per 31 Desember 2021 dan 2020 dijelaskan sebagai berikut:

*Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga  
Per 31 Desember 2021 dan 2020*

*(Dalam Rupiah)*

Kode	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Naik/Turun	
				Nilai	%
067.03	Ditjen PDP	180.400,00	2.545.460.613,00	(2.545.280.213,00)	(99,99)
067.04	Ditjen PEID	2.394.399.107,00	-	2.394.399.107,00	100,00
067.06	Ditjen PPDT	1.144.263.304,00	4.357.312.149,00	(3.213.048.845,00)	(73,74)
067.07	Ditjen PPKTrans	-	70.716,00	(70.716,00)	(100,00)
067.08	Ditjen PKTRans	-	9.538.047.548,00	(9.538.047.548,00)	(100,00)
067.09	BPSDM	93.152.423,00	-	93.152.423,00	100,00
067.10	Setjen	724.748.075,00	-	724.748.075,00	100,00
<b>JUMLAH</b>		<b>4.356.743.309,00</b>	<b>16.440.891.026,00</b>	<b>(12.084.147.717,00)</b>	<b>(73,50)</b>

Utang Kepada Pihak Ketiga Ditjen PDP Per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.545.460.613,00 diuraikan sebagai berikut:

1. Belanja barang yang masih harus dibayar sebesar Rp2.520.886.011,00 yang merupakan sisa gagal bayar tahun 2018 pada Direktorat Pengembangan Usaha Ekonomi Desa yang belum terbayar, jumlah tersebut berasal dari hasil Reviu KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) sebesar Rp1.425.849.395,00 dan Reviu APIP sebesar Rp1.095.036.616,00. Namun karena adanya perubahan Nomenklatur pada Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi pada Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi dimana Ditjen PPMD berubah menjadi Ditjen PDP, dan dalam SOTK yang baru, Direktorat Pengembangan Usaha Ekonomi Desa yang semula di Ditjen PPMD, saat ini masuk ke dalam Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Ditjen PEID/350453). Sehingga sudah dilakukan transfer keluar sisa gagal bayar pada tahun 2018 sebesar Rp2.520.886.011,00 ke Ditjen PEID (350453) berdasarkan Surat Sekretaris Direktorat Jenderal PEID Nomor 1421/KU.06.05/IX/2021 tanggal 21 September 2021

- perihal Pengalokasian Gagal Bayar Tahun 2018 dan Berita Acara Serah Terima Berkas Gagal Bayar TA 2018 Direktorat Pengembangan Usaha Ekonomi Desa Nomor 700/KU.06.05/IX/2021 tanggal 27 September 2021;
2. Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya sebesar Rp24.574.602,00 terdiri dari penerimaan bunga jasa giro pada rekening hibah langsung luar negeri sebesar Rp24.574.102,00 yang penerimaannya tidak memerlukan pengesahan dari kppn yang sudah disetor pada tanggal 14 April 2021 dan saldo rekening sebesar Rp500,00 pada Satuan Kerja Aktif Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2020, yang merupakan kekurangan penarikan atas pembayaran honor tenaga pendamping yang sudah dibayarkan pada tanggal 25 Februari 2021;
  3. Transfer masuk Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya sebesar Rp180.400 saldo rekening satuan kerja dekonsentrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat (350150) sebesar Rp400 yang di karenakan kekurangan penarikan atas pembayaran honor perjalanan dinas kepada salah satu pegawainya dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau (350425) sebesar Rp180.000 yang di karenakan kekurangan penarikan atas pembayaran honor perjalanan dinas kepada salah satu pegawainya. Dilakukan transfer masuk ke Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan dikarenakan satuan kerja dekonsentrasi tersebut sudah menjadi satker inaktif di tahun 2022.

Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga Ditjen PEID sebesar Rp2.394.399.107,00 dijelaskan sebagai berikut:

1. Transfer Masuk dari Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan (350456) kepada Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi (350453) pada Bulan September Tahun Anggaran 2021 yaitu sebesar Rp2.520.886.011,00. Pada tgl 10 November 2021 telah dibayar oleh Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebesar Rp149.392.754,00 dengan No SPM 30208 dan No SP2D 211331303011227 sehingga masih tersisa utang sebesar Rp2.371.493.257,00;

2. Utang Kepada Pihak Ketiga pada Satuan Kerja Dekonsentrasi Nusa Tenggara Timur (670408) berupa Perjalanan Dinas, Honor dan Sewa Kendaraan Kegiatan sebesar Rp8.100.750,00;
3. Utang Kepada Pihak Ketiga pada Satker Dekonsentrasi Provinsi Papua (670409) berupa Honor Petugas Kebersihan selama 4 bulan sebesar Rp14.805.100,00. Pada Tanggal 24 Februari 2022 telah dibayarkan kepada penerima dengan inisial AAR.

Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya Ditjen PPDT per 1 Januari 2021 sebesar Rp4.357.312.304,00 merupakan hasil Laporan Hasil Verifikasi BPKP No.LAP-150/D204/1/2016 Tanggal 27 Oktober 2016 Hal Laporan Hasil Verifikasi Tahan Ketiga atas Tunggalan Tahun 2015 Dalam Revisi Dipa pada Satker Ditjen PPDT Tahun 2016. Namun pada tahun 2021 terdapat koreksi atas utang Verifikasi BPKP yang diuraikan sebagai berikut:

1. Koreksi Utang ke IPB atas Kegiatan Bantuan Stimulan Pengembangan Sumber Daya Hayati Berbasis Daratan di Kab. Musirawas dikoreksi senilai Rp192.617.845,00 yang terdiri dari koreksi volume senilai Rp73.516.345,00 dan koreksi keterlambatan senilai Rp119.101.500,00;
2. Koreksi Utang ke PT. Mutaira Teknotama atas Pekerjaan Pengadaan 5 Paket Peternakan Modern di Kab. Pandeglang senilai Rp3.020.431.000,00, yang terdiri dari koreksi volume senilai Rp2.661.120.000,00 dan koreksi

keterlambatan senilai Rp359.311.000,00.

Adapun Rincian Utang Pihak Ketiga PPDT sebagai berikut:

*Rincian Utang Pihak Ketiga PPDT  
Per 31 Desember 2021*

*(Dalam Rupiah)*

NO	NAMA KEGIATAN	NAMA REKANAN	NILAI HUTANG	NILAI DIBAYARKAN	KURANG BAYAR	KOREKSI	NETTO
1	Pekerjaan Pengadaan 5 Peternakan Modern (Paket 2) di Kabupaten Pandeglang		3.593.110.000,00	-	3.593.110.000,00	(3.020.431.000,00)	572.679.000,00
2	Bantuan Stimulan Pengembangan Sumber Daya Hayati Berbasis Daratan di		696.500.000,00	-	696.500.000,00	(192.617.845,00)	503.882.155,00
3	Bantuan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Kab. Morowali	KPB Bantuan Rehabilitasi Rumah	68.584.500,00	68.584.000,00	500,00		500,00
4	Bantuan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Kab. Morowali	KPB Bantuan Rehabilitasi Rumah	175.374.000,00	175.374.000,00	-		-
5	Bantuan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Desa Bangka Ajang Kec. Rahong Utara Kab.	KPPD Tubung Walang	100.000.000,00	100.000.000,00	-		-
6	Bantuan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Desa Baoliduli Kec. Ilieape Timur Kec.	OMS Bersama Bakti	40.000.000,00	40.000.000,00	-		-
7	Bantuan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Desa Jorong Sikiliar Kec. Sungai Aur Kab.	OMS Sikiliang Saiyo	135.000.000,00	67.500.000,00	67.500.000,00		67.500.000,00
8	Pekerjaan Jasa Konsultansi Data Base Kebutuhan Peningkatan Sarana dan Prasarana Infotel (Paket-40)	PT. Insan Mandiri Konsultansi	376.084.000,00	376.084.000,00	-		-
9	Jasa Konsultansi Supervisi Sarana dan Prasarana Infotel	PT. Maxitech Utama Indonesia	1.959.612.000,00	1.959.612.000,00	-		-
10	Pekerjaan Bantuan Pembangunan Jalan Lingkar Kalukubula - Mpanau	PT. Pakarena Mitra Sejati	1.065.842.636,00	1.065.842.000,00	636,00		636,00
11	Pelunasan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Ekonomi Kapal Penangkap		656.965.000,00	656.964.915,00	85,00		85,00
12	Pelunasan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Ekonomi Kapal Penangkap		643.889.000,00	643.688.072,00	200.928,00		200.928,00
13	Bantuan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Ds. Sungai Kuruyit Barat Kec. Sangir Balai Jango	Balai Jango Sepakat	63.000.000,00	63.000.000,00	-		-
<b>TOTAL</b>			<b>9.573.961.136,00</b>	<b>5.216.648.987,00</b>	<b>4.357.312.149,00</b>	<b>(3.213.048.845,00)</b>	<b>1.144.263.304,00</b>

Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga pada Ditjen PPKTrans sebesar Rp70.716,00 terdapat di satker Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Tojo Una-una merupakan kesalahan pencatatan pada penarikan uang di Bank untuk pembayaran honor pejabat penandatanganan SPM sebesar Rp70.000,00 dan bunga rekening sebesar Rp715,78 (dilakukan pembulatan dalam sistem Aplikasi SAIBA) dan dilakukan jurnal penyesuaian. Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas ini telah dilakukan jurnal penyesuaian sehingga saldonya Rp0,00.

Utang Pihak Ketiga sebesar Rp9.538.046.948,00 yang terdapat pada Ditjen PKTrans diuraikan sebagai berikut:

*Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga  
Ditjen PKTrans  
Per 31 Desember 2020*

No.	Kode Satker	Nama Satker	Nilai
1	350289	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab. Luwu Timur	5.499.715.200,00
2	350450	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Simeulue	930.788.848,00
3	670787	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Buol	3.107.542.900,00
<b>Jumlah</b>			<b>9.538.046.948,00</b>

- Utang kepada Pihak Ketiga yang terdapat di Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kab. Luwu Timur sebesar Rp5.499.715.200,00 merupakan sisa pembayaran 70% dari nilai kontrak untuk pengerjaan fisik dan 80% dari nilai kontrak untuk biaya supervisi yang harus di bayarkan pada Tahun Anggaran 2021 atas penyelesaian pekerjaan fisik dan biaya supervisi untuk Pengerjaan Pembangunan Jembatan Bangunan Atas (Lanjutan) di Mahalona yang pengerjaannya telah diselesaikan 100% pada Tahun 2020 yang pembayarannya tertunda dikarenakan adanya *refocusing* akibat Pandemi *Covid-19* di Tahun 2020. Sudah terbayar di tahun 2021 sebesar Rp5.499.715.200,00 dan sudah dikoreksi pada Laporan Audited 2021;
- Utang Kepada Pihak Ketiga yang terdapat di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Simeulue sebesar Rp930.788.848,00 merupakan sisa pembayaran 70% dari nilai kontrak untuk pengerjaan fisik terhadap Peningkatan Jalan Poros UPT I Sigulai yang pengerjaannya telah diselesaikan 100% pada Tahun 2020 namun pembayarannya tertunda dikarenakan adanya *refocusing* akibat Pandemi *Covid-19* di Tahun 2020. Sudah terbayar di tahun 2021 sebesar Rp930.788.848,00 dan sudah dikoreksi pada Laporan Audited 2021;

3. Utang kepada Pihak Ketiga yang terdapat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Buol sebesar Rp3.107.542.900,00 merupakan sisa pembayaran 70% dari nilai kontrak yang harus di bayarkan pada Tahun Anggaran 2021 atas penyelesaian pekerjaan fisik dan biaya supervisi untuk Peningkatan Jembatan KTM/KPB Air Terang (30 Meter) Bangunan Bawah/Tahap I Lokasi Kecamatan Tiloan yang pengerjaanya telah diselesaikan 100% pada Tahun 2020 yang pembayarannya tertunda dikarenakan adanya pemotongan anggaran akibat penanganan *Covid-19* di Tahun 2020. Sudah terbayar di tahun 2021 sebesar Rp3.106.991.684,00 masih ada sisa kontrak sebesar Rp551.216,00 merupakan sisa kontrak di drainase Rp551.000,00 dan Rp216,00 sisa dari pagu jembatan dan sudah dikoreksi pada Laporan Audited 2021.

Utang Kepada Pihak Ketiga pada BPSDM sebesar Rp93.152.423,00 terbagi menjadi dua yaitu:

1. Pada Balai Latihan Masyarakat Pekanbaru sebesar Rp49.939.892,00 merupakan utang potongan pajak oleh bendahara pengeluaran yang belum disetorkan ke rekening kas negara;
2. Tagihan listrik dan telepon bulan Desember 2021 yang dibayarkan pada Januari tahun 2022 sebesar Rp43.212.531,00.

Utang Kepada Pihak Ketiga pada Setjen sebesar Rp724.748.075,00 merupakan tagihan listrik bulan Desember 2021 sebesar Rp669.425.482,00, tagihan langganan telepon sebesar Rp3.748.638,00, dan tagihan langganan air sebesar Rp51.573.955,00 yang dibayarkan pada bulan Januari 2022.

**C.24 Pendapatan Diterima Dimuka**

Pendapatan Diterima Dimuka  
Rp759.320.242,00

Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp759.320.242,00 dan Rp817.445.416,00. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/ jasa belum diserahkan. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari jasa konsultasi akuntansi yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun. Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp817.446.416,00 per 2020 yang terdapat pada Setjen dengan rincian sebagai berikut:

Nama Rekanan	Setoran 2020	Akrual 2019	Akrual 2020	PDD 2020
CV Latere	36.112.000,00	-	15.447.911,11	20.664.088,89
PT Dayamitra Telekomunikasi	70.000.000,00	23.916.666,67	35.000.000,00	11.083.333,33
Usaha Café Gita Sabela	11.310.000,00	-	3.361.583,33	7.948.416,67
Warung Kopi Manaek Sinaga	4.000.000,00	-	1.333.333,33	2.666.666,67
PT BRI	109.734.000,00	-	45.722.500,00	64.011.500,00
PT BNI	446.946.000,00	-	60.476.474,51	386.469.525,49
ATM BRI	4.403.642,00	-	4.379.177,32	24.464,68
Usaha Foto Copy Nur Kholiq	26.948.000,00	-	5.763.877,78	21.184.122,22
PT Antara Persada Sukses	39.587.000,00	-	10.721.479,17	28.865.520,83
PT Telekomunikasi Seluler	70.000.000,00	-	25.472.222,22	44.527.777,78
Gedung Makarti	353.000.000,00	-	123.000.000,00	230.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.172.040.642,00</b>	<b>23.916.666,67</b>	<b>330.678.558,78</b>	<b>817.445.415,55</b>

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka tahun 2021 sebesar Rp759.320.242,00 sebagai berikut:

Nama Rekanan	PDD 2020	Akrual 2021	Setoran 2021	Akrual 2021	PDD 2021
CV Latere	20.664.088,89	20.664.088,89	15.046.667,00	15.046.667,00	-
PT Dayamitra Telekomunikasi	11.083.333,33	11.083.333,33	299.932.000,00	68.040.129,63	231.891.870,37
Usaha Café Gita Sabela	7.948.416,67	7.948.416,67	2.827.500,00	2.827.500,00	-
Warung Kopi Manaek Sinaga	2.666.666,67	2.666.666,67	-	-	-
PT BRI	64.011.500,00	64.011.500,00	-	-	-
PT BNI	386.469.525,49	149.120.074,14	-	-	237.349.451,34
ATM BRI	24.464,68	24.464,68	-	-	-
Usaha Foto Copy Nur Kholiq	21.184.122,22	13.474.000,00	-	-	7.710.122,22
PT Antara Persada Sukses	28.865.520,83	19.793.500,00	-	-	9.072.020,83
PT Telekomunikasi Seluler	44.527.777,78	35.000.000,00	-	-	9.527.777,78
CV Amoor	-	-	36.000.000,00	36.000.000,00	-
Gedung Makarti	230.000.000,00	85.000.000,00	118.769.000,00	-	263.769.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>817.445.415,55</b>	<b>408.786.044,38</b>	<b>472.575.167,00</b>	<b>121.914.296,63</b>	<b>759.320.241,55</b>

Pendapatan Diterima Dimuka Gedung Makarti yang awalnya sebesar Rp 230.000.000,00 berkurang sebesar Rp 85.000.000,00 merupakan pengajuan pengembalian biaya sewa Gedung Makarti yang tidak terlaksana kegiatannya pada tahun 2020 akibat Pandemi COVID-19 oleh penyewa dan sudah dikembalikan ke rekening berdasarkan SKTB yang telah diajukan ke KPPN Jakarta VI melalui Surat Pengajuan Nomor S-324-S-329/KU.08.05/XI/2021 tanggal 24 November 2021

### **C.25 Uang Muka Dari KPPN**

*Uang Muka KPPN  
Rp10.716.000,00*

Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2021 dan 2020 masing – masing sebesar Rp10.716.000,00 dan Rp0,00 merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Saldo Uang Muka dari KPPN terdapat pada Ditjen PPKTrans satker Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Subulussalam. Saldo ini terjadi karena keterlambatan bendahara dalam menyetorkan UP ke kas negara. UP disetorkan pada tanggal 13 Januari 2022.

### **C.26 Utang Jangka Pendek Lainnya**

*Utang Jangka Pendek  
Lainnya  
Rp1.327.350,00*

Utang jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 masing – masing sebesar Rp1.327.350,00 dan Rp0,00. Utang jangka pendek ini merupakan Pajak PPh 21, PPh 22 dan PPN pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (350453) yang disetorkan pada tanggal 1 Januari 2022 dengan NTB

000000048829 NTPN 6D37C4ER1JAUEBAJ.

### **C.27 Ekuitas**

#### *Ekuitas*

*Rp2.763.006.771.618,00*

Ekuitas per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp2.763.006.771.618,00 dan Rp2.739.050.841.674,00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

**D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL****D.1 Pendapatan-LO**

Pendapatan  
Rp1.899.336.545,00

Jumlah Pendapatan-LO pada Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1.899.336.545,00 dan Rp1.259.876.614,00.

Rincian Pendapatan-LO pada periode 31 Desember 2021 per jenis pendapatan dapat dilihat pada tabel berikut:

*Rincian Pendapatan-LO per jenis pendapatan  
Per 31 Desember 2021*

*(Dalam Rupiah)*

<b>Akun</b>	<b>Uraian</b>	<b>Nilai</b>
425119	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	526.976.180,00
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	657.961.299,00
425699	Pendapatan Jasa Lainnya	276.997.097,00
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	13.142,00
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	251.595.418,00
425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	3.992.552,00
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	181.800.857,00
<b>Jumlah Nilai Perolehan per 30 September 2021</b>		<b>1.899.336.545,00</b>

Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya sebesar Rp526.976.180,00 berasal dari BPSDM di satuan kerja Balai Pengkajian dan Penerapan Teknik Produksi Bengkulu (350480).

Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan sebesar Rp657.961.299,00 merupakan pendapatan dari sewa Gedung Makarti, lahan parkir, pujasera, kantin dan *fotocopy* yang terdapat pada satuan kerja Sekretariat Jenderal (350088).

Pendapatan Jasa Lainnya sebesar Rp276.997.097,00 terdapat pada satuan kerja Sekretariat Jenderal (350088) berupa lelang Peralatan dan Mesin Tahun 2021.

Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) sebesar Rp13.142,00 terdapat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

(350153) senilai Rp3.720,00, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Rote Ndao (350368) senilai Rp6.768,00, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bengkulu Utara (350383) senilai Rp411,00, Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Papua Barat (350427) senilai Rp149,00, dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Timor Tengah Utara (670789) senilai Rp2.094,00.

Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah sebesar Rp251.595.418,00 yang berasal dari satuan kerja Ditjen PEID (350453) sebesar Rp3.000.000,00, Ditjen PPDT (350454) sebesar Rp831.215,00, Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Transmigrasi Mamuju Utara (340341) sebesar Rp58.048.388,00, Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas (350217) sebesar Rp82.226.481,00, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah (350226) sebesar Rp199.940,00, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Sigi (350274) sebesar Rp2.659.488,00, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan (350282) sebesar Rp307.750,00, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumba Timur (350356) sebesar Rp2.235.342,00, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan (418272) sebesar Rp16.298.691,00, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Gorontalo Utara (419027) sebesar Rp2.414.535,00, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Singkil (419089) sebesar Rp3.841.822,00, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tojo Una-Una (419106) sebesar Rp14.234.716,00, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Timor Tengah Utara (670789) sebesar Rp9.806.500,00, Balai Latihan Masyarakat Jayapura (255164) sebesar Rp1.300.000,00, dan satuan kerja BPSDM (350475) sebesar Rp54.190.550,00.

Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji sebesar Rp3.992.552,00 terdapat pada satuan kerja BPI (670892)

karena kelebihan tunjangan jabatan struktural.

Pendapatan Anggaran Lain-lain sebesar Rp181.800.857,00 terdapat pada satuan kerja Ditjen PDTu (350455) senilai Rp381,00 berasal dari potongan pembayaran belanja pegawai atas kekurangan gaji kenaikan pangkat Bulan Oktober 2020 a.n Ronny Leo, dkk sesuai SPP Nomor 00004 tanggal 11 Januari 2021, pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau (140934) senilai Rp181.800.000,00 terjadi akibat putus kontrak pengerjaan KDP Peralatan dan Mesin, dan satuan kerja BPI (670892) senilai Rp476,00 yang terjadi karena Kenaikan Gaji Berkala Tahun 2021.

Adapun Rincian Pendapatan-LO pada periode 31 Desember 2021 dan 2020 per Unit Kerja Eselon I dapat dilihat pada tabel berikut:

*Rincian Pendapatan-LO per Unit Kerja Eselon I  
Per 31 Desember 2021 dan 2020*

*(Dalam Rupiah)*

Kode	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
067.03	Ditjen PDP	3.720,00	13.421.809,00
067.04	Ditjen PEID	3.000.000,00	68.703.620,00
067.05	Ditjen PDTu	381,00	920.762,00
067.06	Ditjen PPDT	831.215,00	-
067.07	Ditjen PPKTrans	374.083.075,00	115.382.378,00
067.08	Ditjen PKTrans	-	33.108.604,00
067.09	BPSDM	582.466.730,00	307.236.950,00
067.10	Setjen	934.958.396,00	721.102.491,00
067.11	BPI	3.993.028,00	-
<b>JUMLAH</b>		<b>1.899.336.545,00</b>	<b>1.259.876.614,00</b>

Terjadinya kenaikan PNBPN dikarenakan oleh peningkatan harga jual komoditi tanaman perkebunan yaitu kelapa sawit dan karet yang terjadi karena kenaikan harga CPO di pasar internasional sehingga pendapatan pada BP2TP Bengkulu mengalami kenaikan. Selain itu kenaikan PNBPN juga disebabkan oleh meningkatnya lelang Peralatan dan Mesin pada Sekretariat Jenderal.

## D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai  
Rp253.339.847.313,00

Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp253.339.847.313,00 dan Rp253.454.101.379,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai pada periode 31 Desember 2021 dan 2020 per jenis Beban Pegawai dapat dilihat pada tabel berikut:

*Rincian jenis Beban Pegawai  
Per 31 Desember 2021 dan 2020  
(Dalam Rupiah)*

Akun	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
511111	Beban Gaji Pokok PNS	98.129.091.700,00	95.686.362.270,00
511111	Pengembalian Beban Gaji Pokok PNS	(25.066.380,00)	(22.239.200,00)
511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	1.667.575,00	1.490.251,00
511119	Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	(15.873,00)	(24.136,00)
511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	6.073.140.188,00	6.120.318.264,00
511122	Beban Tunj. Anak PNS	1.443.451.390,00	1.460.989.108,00
511122	Pengembalian Beban Tunj. Anak PNS	-	(1.065.000,00)
511123	Beban Tunj. Struktural PNS	9.096.263.050,00	9.961.065.000,00
511123	Pengembalian Beban Tunj. Struktural PNS	(38.237.100,00)	-
511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	5.779.399.000,00	3.159.222.000,00
511124	Pengembalian Beban Tunj. Fungsional PNS	(24.087.628,00)	(1.478.922,00)
511125	Beban Tunj. PPh PNS	695.454.017,00	587.058.585,00
511126	Beban Tunj. Beras PNS	4.824.620.400,00	4.050.233.340,00
511127	Beban Tunj. Kemahalan PNS	119.350.000,00	114.240.000,00
511129	Beban Uang Makan PNS	16.287.126.000,00	16.174.204.000,00
511129	Pengembalian Beban Uang Makan PNS	(948.900,00)	(2.036.300,00)
511151	Beban Tunjangan Umum PNS	2.308.050.000,00	2.516.865.000,00
511151	Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS	(70.552.426,00)	(20.876.372,00)
511323	Beban Tunj. Struktural Pejabat Negara	427.905.000,00	463.810.200,00
512211	Beban Uang Lembur	625.351.000,00	1.154.241.000,00
512211	Pengembalian Beban Uang Lembur	-	-
512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	107.705.834.084,00	112.217.952.150,00
512411	Pengembalian Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	(17.947.784,00)	(166.229.859,00)
<b>JUMLAH</b>		<b>253.339.847.313,00</b>	<b>253.454.101.379,00</b>

Terdapat penurunan beban uang lembur yang terjadi karena adanya penyesuaian jam kerja dan penyesuaian sistem kerja pegawai selama Pandemi COVID-19 yang memberikan kebijakan pembatasan pegawai yang masuk kantor. Hal ini menyesuaikan jumlah angka kasus COVID-19 yang terjadi pada Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi sehingga diberlakukan kebijakan *work from office* (WFO) dan *work from home* (WFH). Hal ini sesuai dengan SE Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi pada Masa PPKM Darurat COVID-19 di Wilayah Jawa dan Bali dan SE Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi pada Masa PPKM Mikro COVID-19.

Rincian Beban Pegawai pada periode 31 Desember 2021 dan 2020 menurut Unit Kerja Eselon I dapat dilihat pada tabel berikut:

*Rincian Beban Pegawai per Unit Kerja Eselon I  
Per 31 Desember 2021 dan 2020*

*(Dalam Rupiah)*

Kode	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
067.02	Inspektorat Jenderal	18.831.293.420,00	17.081.596.948,00
067.03	Ditjen PDP	25.439.231.945,00	23.148.645.448,00
067.04	Ditjen PEID	23.994.327.353,00	19.853.973.118,00
067.05	Ditjen PDTu	3.385.611.245,00	18.559.105.820,00
067.06	Ditjen PPDPT	21.029.340.168,00	20.113.473.346,00
067.07	Ditjen PPKTrans	31.971.963.291,00	28.474.336.675,00
067.08	Ditjen PKTrans	4.561.611.511,00	26.033.334.435,00
067.09	BPSDM	59.005.567.707,00	60.869.462.351,00
067.10	Sekretariat Jenderal	43.898.127.905,00	39.320.173.238,00
067.10	BPI	21.222.772.768,00	-
<b>JUMLAH</b>		<b>253.339.847.313,00</b>	<b>253.454.101.379,00</b>

Terdapat peningkatan yang signifikan pada Beban Pegawai milik satuan kerja BPI karena menjadi satuan kerja dan UKE I baru di Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi sesuai dengan Permendesa Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi. Penurunan yang signifikan pada Ditjen PDTu dan Ditjen PKTrans juga disebabkan adanya likuidasi yang terjadi akibat perubahan Organisasi dan Tata Kerja yang baru di Lingkungan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi.

### D.3 Beban Persediaan

*Beban Persediaan  
Rp25.558.272.980,00*

Beban Persediaan pada periode 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp25.558.272.980,00 dan Rp13.234.223.405,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Rincian Beban Persediaan menurut Akun pada periode 31 Desember 2021 dan 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

*Rincian Perbandingan Beban Persediaan menurut Akun  
Per 31 Desember 2021 dan 2020*

*(Dalam Rupiah)*

Akun	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
593111	Beban Persediaan konsumsi	25.335.287.720,00	12.955.177.105,00
593131	Beban Persediaan bahan baku	8.335.500,00	5.223.000,00
593149	Beban Persediaan lainnya	214.649.760,00	273.823.300,00
<b>JUMLAH</b>		<b>25.558.272.980,00</b>	<b>13.234.223.405,00</b>

Beban persediaan bahan baku sebesar Rp8.335.500,00 berasal dari:

1. Satuan kerja BPSDM (350475) berupa semen, cat dinding, paku, baut, econo plast, dan skrup sebesar Rp2.219.000,00
2. Balai Latihan Masyarakat Makasar (350483) berupa

baterai sebesar Rp2.394.500,00

3. Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (350484) sebesar Rp2.135.000,00 berupa tinta printer
4. Balai Latihan Masyarakat Denpasar (350485) sebesar Rp602.000,00 berupa klip binder
5. Balai Latihan Masyarakat Pekanbaru (350486) sebesar Rp985.000,00 berupa cat

Beban persediaan lainnya sebesar Rp214.649.760,00 berasal dari:

1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau (350152) sebesar Rp11.109.500,00 berupa obat-obatan yang diserahkan ke masyarakat
2. Balai Latihan Masyarakat Jayapura (255164) sebesar Rp7.740.000,00 berupa alat rapid test
3. Satuan kerja BPSDM (350475) sebesar Rp4.000.000,00 berupa alat rapid test
4. BP2TP Bengkulu (350480) sebesar Rp186.172.500,00 berupa pupuk, KCL, bayleton, kleen up, prevathon, bayfolan, delse, dan benlox
5. BBLM Yogyakarta (350482) sebesar Rp4.920.000,00 berupa handsoap, antiseptik, hand sanitizer, alkohol, wipol, antis, dan disinfektan
6. Satuan kerja Sekretariat Jenderal (350088) senilai Rp707.760,00 berupa alat kebersihan berupa deterjen dan sikat wc sebesar Rp209.960,00

Terdapat jurnal koreksi karena penyesuaian *stock opname* persediaan akibat *update* aplikasi persediaan pada Sekretariat Jenderal (350088) sebesar Rp497.800,00

Rincian Beban Persediaan pada masing-masing Unit Kerja Eselon I pada periode 31 Desember 2021 dan 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

*Rincian Beban Persediaan per Unit Kerja Eselon I  
Per 31 Desember 2021 dan 2020*

*(Dalam Rupiah)*

Kode	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
067.02	Inspektorat Jenderal	1.930.113.100,00	954.845.500,00
067.03	Ditjen PDP	3.142.024.765,00	2.162.502.474,00
067.04	Ditjen PEID	3.474.382.170,00	1.844.757.580,00
067.05	Ditjen PDTu	-	974.364.731,00
067.06	Ditjen PPDT	3.800.692.029,00	1.225.262.861,00
067.07	Ditjen PPKTrans	1.639.572.740,00	586.417.786,00
067.08	Ditjen PKTrans	198.936.750,00	1.002.440.022,00
067.09	BPSDM	4.724.393.394,00	712.605.543,00
067.10	Sekretariat Jenderal	4.760.748.534,00	3.771.026.908,00
067.11	BPI	1.887.409.498,00	-
<b>JUMLAH</b>		<b>25.558.272.980,00</b>	<b>13.234.223.405,00</b>

Terdapat peningkatan yang signifikan Beban Persediaan pada satuan kerja BPI yang merupakan satuan kerja dan UKE I baru di Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi sesuai dengan Permendesa Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi. Selain itu adanya penggabungan 5 UKE II yang bergabung dengan satuan kerja BPSDM menyebabkan peningkatan beban persediaan secara drastis. Pada Ditjen PPDT juga mengalami kenaikan yang signifikan dikarenakan anggaran belanja persediaan konsumsi yang mengalami peningkatan dari anggaran tahun 2020 sehingga lebih banyak anggaran belanja barang konsumsi yang direalisasikan.

Penurunan yang signifikan pada Ditjen PDTu dan Ditjen PKTrans disebabkan adanya likuidasi yang terjadi akibat perubahan Organisasi dan Tata Kerja yang baru di Lingkungan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi.

#### **D.4 Beban Barang dan Jasa**

*Beban Barang dan Jasa  
Rp1.986.396.103.325,00*

Beban Barang dan Jasa pada periode 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1.986.396.103.325,00 dan Rp1.907.198.462.580,00. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan

aset tetap.

Rincian Beban Barang dan Jasa menurut akun pada periode 31 Desember 2021 dan 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

*Rincian Beban Barang dan Jasa menurut Akun  
Per 31 Desember 2021 dan 2020  
(Dalam Rupiah)*

Akun	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
521111	Beban Keperluan Perkantoran	81.588.037.663,00	59.723.711.300,00
521111	Pengembalian Beban Keperluan Perkantoran	(10.978.314,00)	(8.952.000,00)
521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	33.432.750,00	300.284.341,00
521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	403.230.880,00	332.880.421,00
521114	Pengembalian Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Surat	(324.800,00)	-
521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	13.862.704.000,00	18.299.561.000,00
521115	Pengembalian Beban Honor Operasional Satuan Kerja	(890.000,00)	(4.795.000,00)
521119	Beban Barang Operasional Lainnya	6.504.310.500,00	6.112.510.506,00
521119	Pengembalian Beban Barang Operasional Lainnya	(316.878,00)	(557.450,00)
521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	9.671.399.987,00	9.551.637.282,00
521131	Pengembalian Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	(16.008.000,00)
521211	Beban Bahan	48.514.110.210,00	31.967.479.605,00
521211	Pengembalian Beban Bahan	(106.007.406,00)	(33.587.272,00)
521212	Beban Barang Transito	-	2.997.000,00
521213	Beban Honor Output Kegiatan	19.461.002.000,00	20.091.625.000,00
521213	Pengembalian Beban Honor Output Kegiatan	(22.030.000,00)	(4.725.000,00)
521218	Beban dalam Rangka Refund Dana PHLN	2.378.907.600,00	193.981.875,00
521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	21.126.667.643,00	19.727.822.387,00
521219	Pengembalian Beban Barang Non Operasional Lainnya	(16.020.175,00)	(20.304.975,00)
521231	Beban Barang Pemberian Penghargaan dalam bentuk uang	195.000.000,00	-
521241	Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	4.929.309.575,00	1.022.411.655,00
522111	Beban Langganan Listrik	8.845.891.101,00	8.513.003.543,00
522112	Beban Langganan Telepon	696.021.336,00	521.524.617,00
522113	Beban Langganan Air	384.302.454,00	421.128.317,00
522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	8.738.323.021,00	7.921.166.128,00
522121	Beban Jasa Pos dan Giro	7.484.550,00	97.583.250,00
522131	Beban Jasa Konsultan	51.704.611.514,00	15.394.485.573,00
522131	Pengembalian Beban Jasa Konsultan	-	-
522141	Beban Sewa	40.881.317.491,00	44.353.572.773,00
522141	Pengembalian Beban Sewa	(22.884.000,00)	-
522151	Beban Jasa Profesi	13.392.305.120,00	8.973.631.468,00
522151	Pengembalian Beban Jasa Profesi	(113.995.000,00)	(81.615.000,00)
522162	Beban Jasa Kepada BLU yang berada dalam Kementerian Negara/Lembaga Lain	-	3.617.862.000,00
522191	Beban Jasa Lainnya	1.639.255.148.847,00	1.646.425.410.036,00
522191	Pengembalian Beban Jasa Lainnya	(578.155.206,00)	(32.242.037,00)
522192	Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	14.600.242.525,00	3.667.490.487,00
522192	Pengembalian Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	(73.601.123,00)	-
595112	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	167.545.460,00	167.488.750,00
<b>JUMLAH</b>		<b>1.986.396.103.325,00</b>	<b>1.907.198.462.580,00</b>

Terjadi penurunan beban penambah daya tahan tubuh yang signifikan karena penggunaan akun khusus COVID-19 untuk pembelian penambah daya tahan tubuh seperti vitamin, susu, dan madu. Terjadi peningkatan yang signifikan pada beban barang non operasional-penanganan Pandemi COVID-19 akibat terjadinya *refocussing* anggaran yang ditujukan untuk penanganan Pandemi COVID-19.

Beban barang operasional – Penanganan Pandemi COVID-19 digunakan untuk pengadaan masker, hand sanitizer, vitamin, zoom meeting, video conference, disinfeksi ruangan, biaya perawatan, antiseptik, cairan disinfektan, hazmat, paket data internet, dan swab tes dalam rangka perjalanan dinas dalam negeri.

Beban barang non operasional – Penanganan Pandemi COVID-19 digunakan untuk pengadaan multivitamin penambah daya tahan tubuh, paket data, dan pengadaan swab tes.

Beban jasa – Penanganan Pandemi COVID-19 digunakan untuk pengadaan swab tes, penyemprotan disinfektan, tenaga kesehatan, dan zoom meeting.

Beban barang pemberian penghargaan dalam bentuk uang sebesar Rp195.000.000,00 berasal dari UKE I BPI untuk pemberian dana pembinaan pemenang Lomba Gelar Teknologi Tepat Guna Nasional ke XXII.

Beban dalam rangka refund dana PHLN merupakan tindak lanjut temuan BPKP milik satuan kerja Ditjen PDP (350456) senilai Rp197.907.600,00 merupakan pengembalian dana loan IBRD-8217 yang tidak boleh terpakai tetapi terlanjur dicairkan (*ineligible*). Beban dalam rangka refund dana PHLN milik satuan kerja BPSDM (350475) senilai Rp2.181.000.000,00 merupakan tindak lanjut temuan BPKP yaitu pembayaran penyelesaian refund of *ineligible expenditures* pinjaman/hibah luar negeri Bank Dunia Tahun 2018 untuk Loan IBRD 8217 ID terkait pembayaran honor pelatih kegiatan TA 2018.

Beban aset ekstrakomtabel peralatan dan mesin terdapat di 4 satuan kerja yaitu:

1. Inspektorat Jenderal (350452) sebesar Rp3.316.050,00 berupa microphone sebanyak 1 unit senilai Rp721.050,00, kabel sebanyak 2 unit senilai Rp400.000,00, bracket standing peralatan sebanyak 1 unit senilai Rp900.000,00, dan microphone/wireless mic sebanyak 2 buah senilai Rp1.295.000,00
2. Ditjen PDP (350456) sebesar Rp11.880.000,00 berupa pengadaan kursi tamu sebanyak 12 buah
3. Balai Latihan Masyarakat Denpasar (350485) sebesar Rp91.350.000,00 berupa pembelian kursi besi/metal sebanyak 60 buah senilai Rp58.800.000,00, pengadaan meja rapat sebanyak 30 buah senilai Rp29.700.000,00, dan pengadaan peralatan studio audio lainnya sebanyak 3 unit senilai Rp2.850.000,00
4. Sekretariat Jenderal (350088) sebesar Rp60.999.410,00 berupa pengadaan stopwatch sebanyak 10 buah senilai Rp4.520.000,00, pengadaan microphone table stand sebanyak 2 buah senilai Rp840.000,00, pengadaan audio mixing portable sebanyak 2 buah senilai Rp926.660,00, pengadaan voice recorder sebanyak 10 buah senilai Rp7.920.000,00, pengadaan lighting stand tripod sebanyak 3 buah senilai Rp1.256.400,00, pengadaan clip on sebanyak 3 buah senilai Rp514.350,00, pengadaan peralatan studio video dan film lainnya sebanyak 4 unit senilai Rp3.035.000,00, dan pengadaan HT sebanyak 121 buah senilai Rp41.987.000,00

Terdapat jurnal koreksi atas penggunaan akun Belanja Barang Non Operasional-Penanganan Pandemi COVID-19 yang membentuk aset yang seharusnya diserahkan kepada masyarakat pada Dinas Transmigrasi Kab. Kapuas (350217) sebesar Rp76.338.130.330,00.

Adapun Rincian Beban Barang dan Jasa menurut Unit Kerja Eselon I pada periode 31 Desember 2021 dan 2020

dapat dilihat pada tabel berikut:

*Rincian Beban Barang dan Jasa menurut Unit Kerja Eselon I  
Per 31 Desember 2021 dan 2020*

*(Dalam Rupiah)*

Kode	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
067.02	Inspektorat Jenderal	7.274.707.784,00	6.862.866.442,00
067.03	Ditjen PDP	87.336.325.094,00	1.642.188.006.858,00
067.04	Ditjen PEID	68.846.759.761,00	18.173.107.162,00
067.05	Ditjen PDTu	312.300.000,00	12.654.059.383,00
067.06	Ditjen PPDT	22.629.435.051,00	15.923.540.692,00
067.07	Ditjen PPKTrans	76.161.905.716,00	38.521.523.536,00
067.08	Ditjen PKTrans	856.608.799,00	44.589.127.118,00
067.09	BPSDM	1.595.513.533.635,00	46.252.335.606,00
067.10	Sekretariat Jenderal	93.916.827.084,00	82.033.895.783,00
067.11	BPI	33.547.700.401,00	-
<b>JUMLAH</b>		<b>1.986.396.103.325,00</b>	<b>1.907.198.462.580,00</b>

Terdapat peningkatan yang signifikan Beban Barang dan Jasa pada satuan kerja BPI yang merupakan satuan kerja dan UKE I baru di Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi sesuai dengan Permendesa Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi. Selain itu adanya penggabungan UKE II P3MD yang bergabung dengan satuan kerja BPSDM menyebabkan peningkatan Beban Barang dan Jasa secara drastis karena tusunya yang membayarkan honor tenaga pendamping desa di seluruh Indonesia sebanyak 34.000 orang. Pada Ditjen PPKTrans juga mengalami peningkatan yang signifikan karena adanya *refocussing* anggaran ke anggaran Penanganan Pandemi COVID-19.

Penurunan yang signifikan pada Ditjen PDTu dan Ditjen PKTrans disebabkan adanya likuidasi yang terjadi akibat perubahan Organisasi dan Tata Kerja yang baru di Lingkungan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi.

#### **D.5 Beban Pemeliharaan**

*Beban Pemeliharaan  
Rp43.154.768.245,00*

Beban Pemeliharaan pada periode 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp43.154.768.245,00 dan

Rp33.200.161.942,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Rincian Beban Pemeliharaan pada periode 31 Desember 2021 dan 2020 menurut jenis akun dapat dilihat pada tabel berikut ini:

*Rincian Beban Pemeliharaan Menurut Akun  
Per 31 Desember 2021 dan 2020*

*(Dalam Rupiah)*

Akun	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	23.287.934.821,00	15.280.430.921,00
523111	Pengembalian Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	(21.824.981,00)	(1.020.000,00)
523113	Beban Asuransi Gedung dan Bangunan	20.481.137,00	-
523114	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19	-	38.393.360,00
523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	-	1.887.679.300,00
523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	18.609.947.855,00	15.002.583.179,00
523121	Pengembalian Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	(14.643.886,00)	-
523129	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	481.083.474,00	115.186.394,00
523133	Beban Pemeliharaan Jaringan	634.854.575,00	730.953.609,00
523199	Beban Pemeliharaan Lainnya	112.342.650,00	89.896.300,00
593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	39.740.000,00	53.252.379,00
593114	Beban Persediaan suku cadang	4.852.600,00	2.806.500,00
<b>JUMLAH</b>		<b>43.154.768.245,00</b>	<b>33.200.161.942,00</b>

Beban asuransi gedung dan bangunan merupakan asuransi Gedung A Kementerian Desa PDTT Jalan TMP Kalibata oleh Sekretariat Jenderal (350088).

Beban pemeliharaan lainnya sebesar Rp112.342.650,00 terdapat pada satuan kerja:

1. Ditjen PPKTrans (350467) sebesar Rp110.298.150,00 yang merupakan pemeliharaan kendaraan
2. Ditjen PKTrans (350457) sebesar Rp56.500,00 yang merupakan pemeliharaan gedung berupa perlengkapan toilet
3. Balai Besar Latihan Masyarakat Yogyakarta (350482) sebesar Rp1.988.000,00 yang merupakan pemeliharaan jaringan pipa pengairan

Adapun perbandingan Beban Pemeliharaan menurut Unit Kerja Eselon I per 31 Desember 2021 dan 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

*Beban Pemeliharaan Menurut Unit Kerja Eselon I  
Per 31 Desember 2021 dan 2020*

*(Dalam Rupiah)*

Kode	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
067.02	Inspektorat Jenderal	396.845.618,00	453.838.591,00
067.03	Ditjen PDP	2.224.754.956,00	1.471.439.475,00
067.04	Ditjen PEID	2.950.053.241,00	1.471.180.961,00
067.05	Ditjen PDTu	-	1.134.532.799,00
067.06	Ditjen PPDT	1.305.407.702,00	212.662.210,00
067.07	Ditjen PPKTrans	1.969.743.053,00	2.891.556.513,00
067.08	Ditjen PKTrans	8.309.500,00	1.364.672.850,00
067.09	BPSDM	6.577.150.091,00	7.241.494.178,00
067.10	Sekretariat Jenderal	23.296.181.004,00	16.958.784.365,00
067.11	BPI	4.426.323.080,00	-
<b>JUMLAH</b>		<b>43.154.768.245,00</b>	<b>33.200.161.942,00</b>

Terdapat peningkatan yang signifikan Beban Pemeliharaan pada satuan kerja BPI yang merupakan satuan kerja dan UKE I baru di Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi sesuai dengan Permendesa Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi. Peningkatan yang signifikan terjadi juga pada Ditjen PPDT karena kenaikan pagu anggaran belanja pemeliharaan. Penurunan yang signifikan pada Ditjen PDTu dan Ditjen PKTrans disebabkan adanya likuidasi yang terjadi akibat perubahan Organisasi dan Tata Kerja yang baru di Lingkungan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi.

#### **D.6 Beban Perjalanan Dinas**

*Beban Perjalanan  
Dinas  
Rp223.764.953.002,00*

Beban Perjalanan Dinas pada periode 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp223.764.953.002,00 dan Rp118.683.525.096,00. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Rincian Beban Perjalanan Dinas Menurut Akun pada periode 31 Desember 2021 dan 2020 menurut jenis akun dapat dilihat pada tabel berikut:

*Rincian Beban Perjalanan Dinas menurut Akun  
Per 31 Desember 2021 dan 2020*

*(Dalam Rupiah )*

Akun	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
524111	Beban Perjalanan Biasa	144.458.973.870,00	80.657.030.597,00
524111	Pengembalian Beban Perjalanan Biasa	(2.708.659.087,00)	(768.074.688,00)
524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	444.603.688,00	1.026.451.000,00
524113	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	(50.000,00)	(450.000,00)
524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	50.067.747.081,00	16.882.327.939,00
524114	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	(1.830.565.328,00)	(63.718.200,00)
524115	Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	5.891.602.970,00	1.851.790.000,00
524115	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	-	(600.000,00)
524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	28.484.833.165,00	19.561.860.010,00
524119	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	(1.043.533.357,00)	(851.158.962,00)
524211	Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	-	205.771.100,00
524219	Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	-	182.296.300,00
<b>JUMLAH</b>		<b>223.764.953.002,00</b>	<b>118.683.525.096,00</b>

Secara keseluruhan Beban Perjalanan Dinas mengalami peningkatan dikarenakan sudah mulai berjalannya kegiatan rapat secara *offline* baik *meeting* dalam kota maupun *meeting* luar kota. Selain itu sudah diberlakukannya perjalanan dinas luar kota meningkatkan beban perjalanan biasa. Beban perjalanan dinas Luar Negeri mengalami penurunan karena masih dibatasinya perjalanan Luar Negeri di tengah Pandemi COVID-19.

Adapun perbandingan Beban Perjalanan Dinas pada periode 31 Desember 2021 dan 2020 menurut Unit Kerja Eselon I dapat dilihat pada tabel berikut:

*Beban Perjalanan Dinas menurut Unit Kerja Eselon I  
Per 31 Desember 2021 dan 2020*

*(Dalam Rupiah)*

Kode	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
067.02	Inspektorat Jenderal	4.106.793.261,00	2.723.293.431,00
067.03	Ditjen PDP	41.483.782.798,00	39.870.305.110,00
067.04	Ditjen PEID	36.753.367.788,00	5.147.287.518,00
067.05	Ditjen PDTu	-	4.237.724.466,00
067.06	Ditjen PPDT	13.691.760.249,00	6.280.948.332,00
067.07	Ditjen PPKTrans	30.979.097.981,00	13.532.684.842,00
067.08	Ditjen PKTrans	198.957.848,00	16.463.062.625,00
067.09	BPSDM	62.033.196.380,00	12.881.986.111,00
067.10	Sekretaris Jenderal	18.371.802.386,00	17.546.232.661,00
067.11	BPI	16.146.194.311,00	-
<b>JUMLAH</b>		<b>223.764.953.002,00</b>	<b>118.683.525.096,00</b>

Terdapat peningkatan yang signifikan Beban Perjalanan Biasa pada satuan kerja BPI yang merupakan satuan kerja dan UKE I baru di Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi sesuai dengan Permendesa Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi. Penurunan yang signifikan pada Ditjen PDTu dan Ditjen PKTrans disebabkan adanya likuidasi yang terjadi akibat perubahan Organisasi dan Tata Kerja yang baru di Lingkungan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi.

#### **D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat**

*Beban Barang untuk  
Diserahkan kepada  
Masyarakat  
Rp199.388.318.51,00*

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk periode 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp199.388.318.251,00 dan Rp361.266.051.446,00. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas.

Beban Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemerintah daerah menurut akun pada

periode 31 Desember 2021 dan 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

*Rincian Beban Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda menurut Akun Per 31 Desember 2021 dan 2020*

*(Dalam Rupiah)*

Akun	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
526112	Beban Peralatan dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	-	-
526121	Beban Tanah Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang	271.500.000,00	-
526122	Beban Peralatan dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang	555.000.000,00	8.428.000.000,00
526123	Beban Gedung dan Bangunan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang	58.130.113.271,00	-
526123	Pengembalian Beban Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang	-	-
526124	Beban Jalan, Irigasi dan Jaringan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang	19.318.431.727,00	-
526124	Pengembalian Beban Jalan, Irigasi dan Jaringan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang	-	-
526311	Beban Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	-	-
526312	Beban Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah	42.385.000.000,00	225.000.000,00
526312	Pengembalian Beban Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah	(5.000,00)	-
526321	Beban Barang untuk Bantuan Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang - Penanganan Pandemi COVID-19	18.008.690.000,00	-
593121	Beban Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges	-	-
593122	Beban Persediaan Tanah Bangunan Untuk Dijual Atau Diserahkan Kepada Masyarakat	12.896.389.622,00	39.246.910.053,00
593123	Beban Persediaan Hewan dan Tanaman Untuk Dijual Atau Diserahkan Kepada Masyarakat	-	1.352.594.000,00
593124	Beban Persediaan Peralatan dan Mesin Untuk Dijual atau Diserahkan Kepada Masyarakat	6.310.944.608,00	107.159.417.508,00
593125	Beban Persediaan Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	29.091.304.234,00	159.754.515.376,00
593126	Beban Persediaan Aset Tetap Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat	-	611.133.006,00
593127	Beban Persediaan Aset Lain-lain untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	140.413.148,00	2.052.014.850,00
593128	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	12.280.536.641,00	42.436.466.653,00
<b>JUMLAH</b>		<b>199.388.318.251,00</b>	<b>361.266.051.446,00</b>

Terdapat penurunan Beban Persediaan yang Diserahkan ke Masyarakat akibat adanya Pandemi COVID-19 dimana anggaran difokuskan untuk Penanganan Pandemi COVID-19. Sebagian Beban Persediaan yang Diserahkan ke Masyarakat digunakan untuk bantuan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan perkembangan ekonomi di masa Pandemi COVID-19. Selain itu bantuan kepada masyarakat melalui pengadaan bantuan obat dan

perlengkapan kesehatan juga diadakan untuk pencegahan dan penanggulangan COVID-19.

Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat menurut Unit Kerja Eselon I lingkup KDPDPT per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Barang untuk diserahkan Kepada Masyarakat Menurut Unit Kerja Eselon I Per 31 Desember 2021 dan 2020*

*(Dalam Rupiah)*

Kode	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
067.03	Ditjen PDP	80.012.047.622,00	21.753.329.058,00
067.04	Ditjen PEID	42.079.995.000,00	129.436.579.817,00
067.05	Ditjen PDTu	-	30.887.759.331,00
067.06	Ditjen PPDT	24.316.836.900,00	114.951.286.894,00
067.07	Ditjen PPKTrans	52.979.438.729,00	4.418.275.990,00
067.08	Ditjen PKTrans	-	47.323.015.613,00
067.10	Sekretariat Jenderal	-	12.495.804.743,00
<b>JUMLAH</b>		<b>199.388.318.251,00</b>	<b>361.266.051.446,00</b>

#### **D.8 Beban Penyusutan dan Amortisasi**

*Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp165.222.108.471,00*

Beban Penyusutan dan Amortisasi pada periode 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp165.222.108.471,00 dan Rp165.317.408.367,00. Beban Penyusutan dan Amortisasi menurut akun pada periode 31 Desember 2021 dan 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

*Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Per 31 Desember 2021 dan 2020*

*(Dalam Rupiah)*

Akun	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	33.721.765.172,00	37.201.847.256,00
591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	16.576.092.770,00	14.439.122.968,00
591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	54.513.496.970,00	47.721.975.568,00
591312	Beban Penyusutan Irigasi	9.282.340.833,00	8.954.837.190,00
591313	Beban Penyusutan Jaringan	1.959.762.291,00	1.768.619.006,00
591411	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	13.331.792,00
592115	Beban Amortisasi Software	1.350.233.593,00	865.686.832,00
592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	47.818.416.842,00	54.351.987.755,00
<b>JUMLAH</b>		<b>165.222.108.471,00</b>	<b>165.317.408.367,00</b>

Sedangkan rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi menurut Unit Kerja Eselon I pada periode 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Menurut UKE-I  
Per 31 Desember 2021 dan 2020*

*(Dalam Rupiah)*

Kode	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
067.02	Inspektorat Jenderal	1.185.099.576,00	1.359.566.454,00
067.03	Ditjen PDP	2.798.635.622,00	3.245.889.071,00
067.04	Ditjen PEID	4.488.766.711,00	5.133.130.924,00
067.05	Ditjen PDTu	-	5.462.209.268,00
067.06	Ditjen PPDT	27.579.746.498,00	27.063.584.711,00
067.07	Ditjen PPKTrans	95.495.700.819,00	64.958.357.003,00
067.08	Ditjen PKTrans	97.254.124,00	23.654.118.420,00
067.09	BPSDM	11.693.803.752,00	13.923.931.322,00
067.10	Sekretariat Jenderal	16.311.576.325,00	20.516.621.194,00
067.11	BPI	5.571.525.044,00	-
<b>JUMLAH</b>		<b>165.222.108.471,00</b>	<b>165.317.408.367,00</b>

#### **D.9 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih**

*Beban Penyisihan  
Piutang Tak Tertagih  
Rp51.191.861,00*

Beban Penyisihan Tak Tertagih pada periode 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing masing sebesar Rp51.191.861,00 dan Rp62.796.885,00. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih menurut akun pada periode 31 Desember 2021 dan 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

*Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih menurut  
Akun*

*Per 31 Desember 2021 dan 2020*

*(Dalam Rupiah)*

Akun	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
594211	Beban Penyisihan Piutang PNB	46.766.147,00	49.944.391,00
594212	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	-	4.055.784,00
594411	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar	4.425.714,00	8.796.710,00
<b>JUMLAH</b>		<b>51.191.861,00</b>	<b>62.796.885,00</b>

Sedangkan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih menurut Unit Kerja Eselon I di lingkup KDPTT per 31 Desember 2021 dan 2020 dapat dilihat pada table berikut:

*Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih  
Per Unit Kerja Eselon I  
Per 31 Desember 2021 dan 2020*

*(Dalam Rupiah)*

Kode	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
067.07	Ditjen PPKTrans	4.425.714,00	2.903.284,00
067.08	Ditjen PKTrans	-	8.796.710,00
067.09	BPSDM	-	1.152.500,00
067.10	Sekretariat Jenderal	46.766.147,00	49.944.391,00
<b>Jumlah</b>		<b>51.191.861,00</b>	<b>62.796.885,00</b>

Beban penyisihan piutang tak tertagih sebesar Rp46.766.147,00 pada satuan kerja Sekretariat Jenderal (350088) merupakan pencatatan penyisihan Piutang PNBPN atas sewa gedung pugasera, kantin, dan fotocopy masa kontrak 26 Januari 2018 s.d. 26 Januari 2020 sebesar Rp46.508.088,00 dengan kategori kurang lancar 10% dan untuk Masa Kontrak 2 Februari 2021 s.d. 2 Februari 2022 sebesar Rp168.688,00 dengan kategori lancar 0,5%.

Selain itu terdapat jurnal koreksi berupa:

1. Koreksi pencatatan penyisihan Piutang PNBPN atas penerimaan yang masih harus diterima berupa sewa bangunan untuk Cafe oleh CV Latere dan Usaha Cafe Gita Sabela sebesar Rp89.371,00
2. Koreksi Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar atas penyesuaian nilai piutang pada satker pusat Ditjen PPKTrans (350467) sebesar Rp4.425.714,00

**D.10 SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL**

*Defisit Kegiatan Non  
Operasional  
Rp51.698.023.315,00*

Rincian Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional pada periode 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

*Rincian Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasional  
Per 31 Desember 2021 dan 2020*

*(Dalam Rupiah)*

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
<b>Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar</b>	<b>(55.661.107.168,00)</b>	<b>(224.982.995.804,00)</b>
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	209.807.086,00	437.368.190,00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	55.870.914.254,00	225.420.363.994,00
<b>Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional</b>	<b>3.963.083.853,00</b>	<b>27.325.473.237,00</b>
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	3.963.083.853,00	27.855.359.110,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	529.885.873,00
<b>Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional</b>	<b>(51.698.023.315,00)</b>	<b>(197.657.522.567,00)</b>

Rincian Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar per Unit Kerja Eselon I pada periode 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut:

*Rincian Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar  
Per Unit Kerja Eselon I  
Per 31 Desember 2021 dan 2020*

*(Dalam Rupiah)*

Kode	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
067.09	BPSDM	98.055.887,00	147.680.998,00
067.10	Sekretariat Jenderal	111.751.199,00	289.687.192,00
<b>Jumlah</b>		<b>209.807.086,00</b>	<b>437.368.190,00</b>

Rincian Beban Pelepasan Aset Non Lancar per Unit Kerja Eselon I pada periode 31 Desember 2021 dan 2020 dijelaskan sebagai berikut:

*Rincian Beban Pelepasan Aset Non Lancar  
Per Unit Kerja Eselon I  
Per 31 Desember 2021 dan 2020*

*(Dalam Rupiah)*

Kode	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
067.03	Ditjen PDP	3.675.999.950,00	-
067.04	Ditjen PEID	-	1.235.510.767,00
067.05	Ditjen PDTu	-	102.512.739.208,00
067.07	Ditjen PPKTrans	51.800.396.858,00	58.130.943.400,00
067.08	Ditjen PKTrans	-	62.251.008.445,00
067.09	BPSDM	196.353.017,00	1.290.162.174,00
067.10	Sekretariat Jenderal	198.164.429,00	-
<b>Jumlah</b>		<b>55.870.914.254,00</b>	<b>225.420.363.994,00</b>

Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per Unit Kerja Eselon I pada periode 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

*Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya  
Per Unit Kerja Eselon I  
Per 31 Desember 2021 dan 2020*

*(Dalam Rupiah)*

Kode	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
067.02	Inspektorat Jenderal	12.558.329,00	218.224.045,00
067.03	Ditjen PDP	1.589.797.213,00	16.897.611.644,00
067.04	Ditjen PEID	206.423.133,00	1.615.890.650,00
067.05	Ditjen PDTu	257.871.848,00	1.296.864.533,00
067.06	Ditjen PPDT	504.714.085,00	975.020.026,00
067.07	Ditjen PPKTrans	675.296.846,00	1.848.789.916,00
067.08	Ditjen PKTrans	11.435.558,00	1.048.522.946,00
067.09	BPSDM	378.211.859,00	1.251.405.848,00
067.10	Sekretariat Jenderal	262.296.190,00	2.703.029.502,00
067.11	BPI	64.478.792,00	-
<b>Jumlah</b>		<b>3.963.083.853,00</b>	<b>27.855.359.110,00</b>

Rincian Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per Unit Kerja Eselon I pada periode 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya  
Per Unit Kerja Eselon I  
Per 31 Desember 2021 dan 2020*

*(Dalam Rupiah)*

Kode	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
067.02	Inspektorat Jenderal	-	78.720.800,00
067.03	Ditjen PDP	-	6.667.095,00
067.04	Ditjen PEID	-	91.376.620,00
067.05	Ditjen PDTu	-	73.934.320,00
067.07	Ditjen PPKTrans	-	489.500,00
067.08	Ditjen PKTrans	-	4.957.000,00
067.09	BPSDM	-	1.638.441,00
067.10	Sekretariat Jenderal	-	272.102.097,00
<b>Jumlah</b>		<b>-</b>	<b>529.885.873,00</b>

#### **D.11 SURPLUS (DEFISIT) LAPORAN OPERASIONAL**

Defisit LO  
Rp2.946.674.250.218,00

Nilai Defisit Laporan Operasional pada periode 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp2.946.674.250.218,00 dan Rp3.048.814.377.053,00.

## E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

### E.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal  
Rp2.739.050.841.674,00

Nilai ekuitas awal pada tanggal 1 Januari 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp2.739.050.841.674,00 dan Rp3.438.288.220.906,00.

### E.2 Surplus (Defisit) LO

Defisit LO  
Rp2.946.674.250.218,00

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah defisit sebesar Rp2.946.674.250.218,00 dan Rp3.048.814.377.053,00.

### E.3.1 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif  
Perubahan Kebijakan  
Akuntansi/Kesalahan  
Mendasar  
Rp0,00

Transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

### E.3.2 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai  
Aset  
Rp0,00

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir. Namun demikian, pada tahun 2021 metode harga perolehan terakhir untuk persediaan diubah menjadi metode *First In First Out* (FIFO) sehingga tidak menimbulkan nilai penyesuaian nilai aset persediaan.

### E.3.3 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai  
Persediaan  
Rp0,00

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk

pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan (Rp385.159.615,00).

Rincian Koreksi Nilai Persediaan menurut Akun Per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

*Rincian Koreksi Nilai Persediaan Menurut Akun  
Per 31 Desember 2021 dan 2020*

*(Dalam Rupiah)*

Akun	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
391113	Koreksi Nilai Persediaan	-	(385.159.615,00)
<b>JUMLAH</b>		-	<b>(385.159.615,00)</b>

Sedangkan Penyesuaian Nilai Aset menurut Unit Kerja Eselon I Per 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut:

*Rincian Koreksi Nilai Persediaan Menurut UKE-I  
Per 31 Desember 2021 dan 2020*

*(Dalam Rupiah)*

Kode	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
067.08	Ditjen PKTrans	-	(385.159.615,00)
<b>JUMLAH</b>		-	<b>(385.159.615,00)</b>

### **E.3.4 Koreksi Atas Reklasifikasi**

*Koreksi atas Reklasifikasi  
(Rp116.816.479,00)*

Koreksi atas Reklasifikasi pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar (Rp116.816.479,00) dan Rp13.072.234.927,00. Koreksi ini berasal dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan mendasar pada LPE. Koreksi atas Reklasifikasi digunakan untuk menyajikan akun Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya yang dihasilkan dari transaksi Reklasifikasi Masuk dan keluar BMN dari Aplikasi Persediaan dan SIMAK BMN.

Rincian Koreksi atas Reklasifikasi pada masing-masing UKE-1 di Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

*Rincian Koreksi atas Reklasifikasi Menurut UKE-I  
Per 31 Desember 2021 dan 2020*

*(Dalam Rupiah)*

Kode	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
067.04	Direktorat Jenderal Pembangunan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	1,00	-
067.07	Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	(11.448,00)	-
067.09	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	(116.805.032,00)	121.171.488,00
067.10	Sekretariat Jenderal Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	-	12.951.063.439,00
<b>JUMLAH</b>		<b>(116.816.479,00)</b>	<b>13.072.234.927,00</b>

Koreksi atas Reklasifikasi pada beberapa Unit Kerja Eselon I dijelaskan sebagai berikut:

1. Koreksi atas reklasifikasi pada Ditjen PEID (067.04) sebesar Rp1,00 yang terdapat pada satker Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (067.04.350453) terjadi akibat perubahan kode barang pada aplikasi SIMAK-BMN berupa sedan (semula) menjadi Minibus (menjadi) sebanyak 5 unit.
2. Koreksi atas reklasifikasi pada Ditjen PPKTrans (067.07) sebesar (Rp11.448,00) yang terdapat pada satker Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur (067.07.350350) terjadi akibat transaksi reklasifikasi persediaan diserahkan kepada masyarakat/pemda.
3. Koreksi atas reklasifikasi pada BPSDM (067.09) sebesar (Rp116.805.032,00) yang terdapat pada satker Balai Latihan Masyarakat Ambon (067.09.215155) sebesar (Rp49.264.150,00) serta pada satker Balai Latihan Masyarakat Denpasar (067.09.350485) sebesar (Rp67.540.882,00) yang terjadi akibat transaksi reklasifikasi BMN.

### E.3.5 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset  
Tetap  
Rp0,00

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp20.896.734.600,00. Selisih Revaluasi Aset Tetap tersebut berasal dari penilaian ulang atas tanah, gedung, dan bangunan serta jalan, irigasi, dan jaringan berupa jalan jembatan dan bangunan air. Adapun rincian nilai selisih revaluasi aset tetap pada masing-masing Unit Kerja Eselon I di lingkup Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

*Rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap Menurut UKE-I  
Per 31 Desember 2021 dan 2020*

*(Dalam Rupiah)*

Kode	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
067.03	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	-	(211.459.500,00)
067.07	Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	-	23.212.923.336,00
067.08	Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi	-	(2.278.878.266,00)
067.09	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-	174.149.030,00
<b>JUMLAH</b>		-	<b>20.896.734.600,00</b>

### E.3.6 Koreksi Aset Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap  
Non Revaluasi  
Rp26.241.018.426,00

Koreksi Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp26.241.018.426,00 dan (Rp22.357.017.084,00). Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Rincian Koreksi Aset Non Revaluasi menurut Akun per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

*Rincian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi Menurut Akun  
Per 31 Desember 2021 dan 2020*

*(Dalam Rupiah)*

Akun	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	35.621.686.613,00	(26.415.475.759,00)
391118	Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	(9.380.668.187,00)	4.058.458.675,00
<b>JUMLAH</b>		<b>26.241.018.426,00</b>	<b>(22.357.017.084,00)</b>

Sedangkan Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi menurut Unit Kerja Eselon I per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

*Rincian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi UKE-I  
Per 31 Desember 2021 dan 2020*

*(Dalam Rupiah)*

Kode	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
067.03	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	-	3.202.006,00
067.07	Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	(11.186.526.294,00)	3.599.795.322,00
067.08	Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi	18.670.158.458,00	(17.181.090.966,00)
067.09	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	24.250.058.504,00	(185.782.836,00)
067.10	Sekretariat Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi	591.236.610,00	(8.593.140.610,00)
067.11	Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	(6.083.908.852,00)	-
<b>JUMLAH</b>		<b>26.241.018.426,00</b>	<b>(22.357.017.084,00)</b>

Koreksi Nilai aset non revaluasi sebesar Rp26.241.018.426,00 terdapat pada:

A. Ditjen PPKTrans sebesar (Rp11.186.526.294,00) terjadi pada satker:

- 1) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Aceh Barat (07.350135) sebesar (Rp1.159.395.000,00) akibat adanya asset keluar karena persetujuan hibah.
- 2) Dinas Nakertrans Kabupaten Banyuasin (07.350170) sebesar (Rp3.540.962.293,00) karena ada usulan hibah tahun 2021.
- 3) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Transmigrasi Provinsi Lampung (07.350183) sebesar

- (Rp318.360.720,00) dikarenakan transaksi normalisasi tindak lanjut Kertas Kerja Konfirmasi (K3) dampak update aplikasi SIMAK BMN dan Persediaan.
- 4) Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas (07.350217) sebesar (Rp11.991.000,00) dikarenakan transaksi normalisasi tindak lanjut Kertas Kerja Konfirmasi (K3) dampak update aplikasi SIMAK BMN dan Persediaan.
  - 5) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah (07.350265) sebesar Rp176.985.000,00 dikarenakan transaksi normalisasi tindak lanjut Kertas Kerja Konfirmasi (K3) dampak update aplikasi SIMAK BMN dan Persediaan.
  - 6) Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur (07.350289) sebesar (Rp57.598.783,00) dikarenakan transaksi normalisasi tindak lanjut Kertas Kerja Konfirmasi (K3) dampak update aplikasi SIMAK BMN dan Persediaan.
  - 7) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Keerom (07.350377) sebesar Rp175.000,00 dikarenakan transaksi normalisasi tindak lanjut Kertas Kerja Konfirmasi (K3) dampak update aplikasi SIMAK BMN dan Persediaan.
  - 8) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Utara (07.350383) sebesar (Rp25.590.919,00) dikarenakan transaksi normalisasi tindak lanjut Kertas Kerja Konfirmasi (K3) dampak update aplikasi SIMAK BMN dan Persediaan.
  - 9) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Barat (07.350436) sebesar Rp321.659.550,00 dikarenakan transaksi normalisasi tindak lanjut Kertas Kerja Konfirmasi (K3) dampak update aplikasi SIMAK BMN dan Persediaan.
  - 10) Dinas Keluarga Sejahtera, Mobduk, dan Transmigrasi Kabupaten Simeulue (07.350450) sebesar Rp147.535.000,00 dikarenakan transaksi normalisasi

tindak lanjut Kertas Kerja Konfirmasi (K3) dampak update aplikasi SIMAK BMN dan Persediaan.

- 11) Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (07.350467) sebesar (Rp2.491.189.737,00) dikarenakan transaksi normalisasi tindak lanjut Kertas Kerja Konfirmasi (K3)serta adanya persetujuan penghapusan BMN.
  - 12) Dinas Nekretrans Kabupaten Bulungan (07.417757) sebesar Rp64.941.500,00 dikarenakan transaksi normalisasi tindak lanjut Kertas Kerja Konfirmasi (K3) dampak update aplikasi SIMAK BMN dan Persediaan.
  - 13) Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Polewali Mandar (07.419109) sebesar Rp1.564.307.483,00 dikarenakan transaksi normalisasi tindak lanjut Kertas Kerja Konfirmasi (K3) dampak update aplikasi SIMAK BMN dan Persediaan.
  - 14) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buol (07.670787) sebesar (Rp5.857.041.375,00) dikarenakan jurnal koreksi persediaan dan tindak lanjut persetujuan hibah tahun 2019 yang belum dikeluarkan dari neraca.
- B. Ditjen PKTrans sebesar Rp18.670.158.458,00 terjadi pada satker:
- 1) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Aceh Barat (08.350140) sebesar (Rp122.000.000,00) dikarenakan transaksi normalisasi tindak lanjut Kertas Kerja Konfirmasi (K3) dampak update aplikasi SIMAK BMN dan Persediaan
  - 2) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten OKU Timur (08.350179) sebesar Rp1.121.438.657,00 dikarenakan transaksi normalisasi tindak lanjut Kertas Kerja Konfirmasi (K3) dampak update aplikasi SIMAK BMN dan Persediaan.
  - 3) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulang Bawang (08.350184) sebesar

- (Rp567.898.430,00) karena jurnal koreksi akumulasi penyusutan jalan dan jembatan.
- 4) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah (08.350216) sebesar Rp2.490.622.901,00 karena jurnal koreksi akumulasi penyusutan jalan dan jembatan.
  - 5) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nunukan (08.350250) sebesar Rp5.071.311.633,00 dikarenakan transaksi normalisasi tindak lanjut Kertas Kerja Konfirmasi (K3) dampak update aplikasi SIMAK BMN dan Persediaan.
  - 6) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah (08.350264) sebesar Rp101.197.090,00 dikarenakan transaksi normalisasi tindak lanjut Kertas Kerja Konfirmasi (K3) dampak update aplikasi SIMAK BMN dan Persediaan.
  - 7) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pinrang (08.350283) sebesar Rp53.420.000,00 dikarenakan transaksi normalisasi tindak lanjut Kertas Kerja Konfirmasi (K3) dampak update aplikasi SIMAK BMN dan Persediaan.
  - 8) Dinas Kesejahteraan Sosial, Transmigrasi, dan Tenaga Kerja Kabupaten Tana Toraja (08.350286) sebesar Rp1.509.611.000,00 dikarenakan transaksi normalisasi tindak lanjut Kertas Kerja Konfirmasi (K3) dampak update aplikasi SIMAK BMN dan Persediaan.
  - 9) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seram Bagian Timur (08.350315) sebesar Rp2.175.750.454,00 dikarenakan transaksi normalisasi tindak lanjut Kertas Kerja Konfirmasi (K3) dampak update aplikasi SIMAK BMN dan Persediaan.
  - 10) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Timor Tengah Utara (08.350362) sebesar Rp7.921.812.580,00 dikarenakan transaksi normalisasi tindak lanjut Kertas Kerja Konfirmasi (K3)

dampak update aplikasi SIMAK BMN dan Persediaan.

- 11) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Timur (08.350395) sebesar Rp804.344.000,00 dikarenakan transaksi normalisasi tindak lanjut Kertas Kerja Konfirmasi (K3) dampak update aplikasi SIMAK BMN dan Persediaan.
  - 12) Sekretariat Ditjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi (08.350458) sebesar (Rp2.362.625.297,00) dikarenakan transaksi normalisasi tindak lanjut Kertas Kerja Konfirmasi (K3) dampak update aplikasi SIMAK BMN dan Persediaan.
  - 13) Direktorat Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi (08.350460) sebesar Rp473.173.870,00 dikarenakan transaksi normalisasi tindak lanjut Kertas Kerja Konfirmasi (K3) dampak update aplikasi SIMAK BMN dan Persediaan.
- C. BPSDM sebesar Rp24.250.058.504,00 terjadi pada satker:
- 1) Balai Latihan Masyarakat Ambon (09.215155) sebesar Rp31.361.796,00 dikarenakan transaksi normalisasi tindak lanjut Kertas Kerja Konfirmasi (K3) dampak update aplikasi SIMAK BMN dan Persediaan.
  - 2) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (09.350475) sebesar (Rp760.840.292,00) dikarenakan transaksi normalisasi tindak lanjut Kertas Kerja Konfirmasi (K3) dampak update aplikasi SIMAK BMN dan Persediaan.
  - 3) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara (09.350477) sebesar Rp70.428.878,00 dikarenakan transaksi normalisasi tindak lanjut Kertas Kerja Konfirmasi (K3) dampak update aplikasi SIMAK BMN dan Persediaan.
  - 4) Balai Latihan Masyarakat Makassar (09.350483) sebesar Rp23.313.990.474,00 dikarenakan transaksi

koreksi saldo awal.

- 5) Balai Latihan Masyarakat Banjarmasin (09.350484) sebesar Rp8.955.600,00 dikarenakan transaksi normalisasi tindak lanjut Kertas Kerja Konfirmasi (K3) dampak update aplikasi SIMAK BMN dan Persediaan.
  - 6) Balai Latihan Masyarakat Denpasar (09.350485) sebesar Rp1.594.038,633,00 dikarenakan transaksi normalisasi tindak lanjut Kertas Kerja Konfirmasi (K3) dampak update aplikasi SIMAK BMN dan Persediaan.
  - 7) Balai Latihan Masyarakat Pekanbaru (09.350486) sebesar (Rp7.876.585,00) dikarenakan transaksi normalisasi tindak lanjut Kertas Kerja Konfirmasi (K3) dampak update aplikasi SIMAK BMN dan Persediaan.
- D. Satker Sekretariat Jenderal Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi (10.350088) sebesar Rp591.236.610,00 karena koreksi nilai asset BMN sebelum penghapusan BMN akibat adanya perubahan kondisi barang serta adanya transaksi normalisasi tindak lanjut Kertas Kerja Konfirmasi (K3) dampak update aplikasi SIMAK BMN dan Persediaan.
- E. Satker Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (11.670892) sebesar (Rp6.083.908.852,00) dikarenakan transaksi normalisasi tindak lanjut Kertas Kerja Konfirmasi (K3) dampak update aplikasi SIMAK BMN dan Persediaan.

### **E.3.7 Koreksi Lain-lain**

*Koreksi Lain-lain*  
*Rp3.254.611.865,00*

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp3.254.611.865,00 dan (Rp92.932.462.772,00). Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

Adapun rincian Koreksi lain-lain menurut Akun per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

*Rincian Koreksi Lain-Lain Menurut Akun  
Per 31 Desember 2021 dan 2020*

*(Dalam Rupiah)*

Akun	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
391119	Koreksi Lainnya	3.254.611.865,00	(92.932.462.772,00)
<b>JUMLAH</b>		<b>3.254.611.865,00</b>	<b>(92.932.462.772,00)</b>

Sedangkan Koreksi Lain-Lain menurut Unit Kerja Eselon I per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

*Rincian Koreksi Lain-Lain Menurut Unit Kerja Eselon I  
Per 31 Desember 2021 dan 2020*

*(Dalam Rupiah)*

Kode	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
067.03	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	(194.441.469,00)	(56.825.843.290,00)
067.04	Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	149.392.754,00	(27.961.832.622,00)
067.05	Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertentu	-	(8.094.653.521,00)
067.06	Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal	3.213.048.845,00	-
067.07	Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	849.361,00	105.514.287,00
067.08	Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi	-	(14.879.699,00)
067.09	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-	-
067.10	Sekretariat Jenderal Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	85.762.374,00	(140.767.927,00)
<b>JUMLAH</b>		<b>3.254.611.865,00</b>	<b>(92.932.462.772,00)</b>

Koreksi lain-lain sebesar Rp3.254.611.865,00 terdiri atas:

- Koreksi lain-lain sebesar (Rp194.441.469,00) berasal dari Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan (03.350456) karena pengembalian hibah langsung tahun anggaran yang lalu dari UNICEF yang baru dilakukan pengesahan ke KPPN pada tahun 2021, diantaranya:
  - Tahun 2020 sebesar Rp154.522.978,00 dengan nomor SP4HL 80000
  - Tahun 2020 sebesar Rp39.888.491,00 dengan nomor SP4HL 80001
- Koreksi lain-lain sebesar Rp149.392.754,00 berasal dari Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (04.350453) karena adanya pembayaran Utang Pihak Ketiga dengan Nomor SPM

30208 dan Nomor SP2D 211331303011227.

- Koreksi lain-lain sebesar Rp3.213.048.845,00 berasal dari Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (06.350454) karena koreksi nilai utang pihak ketiga lainnya yaitu:
  - Koreksi utang ke IPB atas Kegiatan Bantuan Stimulan Pengembangan Sumber Daya Hayati Berbasis Daratan di Kabupaten Musirawas dikoreksi senilai Rp192.617.845,00 yang terdiri dari koreksi volume senilai Rp73.516.345,00 dan koreksi keterlambatan senilai Rp119.101.500,00.
  - Koreksi utang ke PT. Mutiara Teknotama atas Pekerjaan Pengadaan 5 Paket Peternakan Modern di Kabupaten Pandeglang senilai Rp3.020.431.000,00 yang terdiri dari koreksi volume senilai Rp2.661.120.000,00 dan koreksi keterlambatan senilai Rp359.311.000,00.
- Koreksi lain-lain sebesar Rp849.361,00 berasal dari Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang terdiri atas Rp434.591,00 pada satker Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Konawe (07.350307) serta sebesar Rp414.770,00 pada satker Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sidrap (07.418191) akibat koreksi penyisihan piutang yang menyesuaikan piutang terbaru.
- Koreksi lain-lain sebesar Rp85.762.374,00 berasal dari Sekretariat Jenderal Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi (10.350088) karena koreksi piutang kurang catat sebesar Rp354.933,00; koreksi penyisihan piutang tahun lalu yang sudah dilunasi sebesar Rp407.440,00; serta koreksi pendapatan diterima di muka sewa Balai Makarti yang sudah dikembalikan kepada penyewa sebesar Rp85.000.000,00.

**E.4 Transaksi Antar Entitas**

Transaksi Antar Entitas  
Rp2.941.251.366.350,00

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp2.941.251.366.350,00 dan Rp2.431.282.667.765,00. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Adapun rincian Transaksi Antar Entitas menurut akun per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

*Rincian Transaksi Antar Entitas Menurut Akun  
Per 31 Desember 2021 dan 2020*

*(Dalam Rupiah)*

Akun	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	2.945.870.266.075,00	2.447.096.021.483,00
313121	Diterima dari Entitas Lain	(6.340.076.578,00)	(28.534.612.860,00)
313211	Transfer Keluar	(1.045.613.907.709,00)	(96.788.544.823,00)
313221	Transfer Masuk	1.045.726.340.602,00	90.190.438.042,00
391131	Pengesahan Hibah Langsung	2.314.965.200,00	8.856.361.855,00
391132	Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	(706.221.240,00)	(289.193.000,00)
391133	Pengesahan Hibah Langsung TAYL	-	10.752.197.068,00
<b>JUMLAH</b>		<b>2.941.251.366.350,00</b>	<b>2.431.282.667.765,00</b>

A. Ditagihkan ke Entitas Lain (313111) sebesar Rp2.945.870.266.075,00 terdapat pada satker:

1. Inspektorat Jenderal sebesar Rp33.031.876.333,00
2. Ditjen PDP sebesar Rp238.690.295.901,00
3. Ditjen PEID sebesar Rp181.059.758.867,00
4. Ditjen PDTu sebesar Rp3.697.911.245,00
5. Ditjen PPDT sebesar Rp87.322.024.660,00
6. Ditjen PPKTrans sebesar Rp384.204.117.348,00
7. Ditjen PKTrans sebesar Rp5.653.642.658,00
8. BPSDM sebesar Rp1.735.074.689.857,00
9. Setjen sebesar Rp189.895.395.858,00
10. BPI sebesar Rp87.240.553.348,00

B. Diterima dari Entitas Lain (313121) sebesar (Rp6.340.076.578,00) terdapat pada satker:

1. Inspektorat Jenderal sebesar (Rp12.558.329,00)
2. Ditjen PDP sebesar (Rp1.589.800.933,00)
3. Ditjen PEID sebesar (Rp209.423.133,00)

4. Ditjen PDTu sebesar (Rp257.872.229,00)
5. Ditjen PPDT sebesar (Rp505.545.300,00)
6. Ditjen PPKTrans sebesar (Rp1.234.251.936,00)
7. Ditjen PKTrans sebesar (Rp11.435.558,00)
8. BPSDM sebesar (Rp1.060.734.476,00)
9. Setjen sebesar (Rp1.389.982.864,00)
10. BPI sebesar (Rp68.471.820,00)

C. Pada Transfer Masuk dan Transfer Keluar terdapat selisih sebesar (Rp112.432.893,00) dengan rincian sebagai berikut:

- Adanya selisih transfer keluar transfer masuk akibat transaksi likuidasi satker inaktif bersaldo ke asset pusat Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (07.350467) sebesar (Rp57.598.455,00) dengan rincian satker sebagai berikut:

*Rincian selisih TKTM satker likuidasi  
Per 31 Desember 2021*

*(Dalam Rupiah)*

Kode Satker	Satker Keluar	Transfer Keluar	Kode Satker	Satker Masuk	Transfer Masuk	Selisih TKTM
07.350122	Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kab. Aceh Selatan	1.575.658.676,00	07.350467	Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	432.683.911,00	1.142.974.765,00
07.350263	Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kab. Banggai Kepulauan	1.909.780.500,00	07.350467	Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	1.815.954.050,00	93.826.450,00
07.350269	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Donggala	14.416.086.469,00	07.350467	Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	13.698.234.469,00	717.852.000,00
07.350279	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kependudukan, dan Capil Kab. Takalar	6.889.963.742,00	07.350467	Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	6.687.158.742,00	202.805.000,00
07.350467	Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	-	07.350467	Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	2.352.359.059,00	(2.352.359.059,00)
07.419104	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bolaang Mongondow Timur	3.353.243.630,00	07.350467	Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	3.174.011.330,00	179.232.300,00
07.419108	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kolaka Timur	3.927.266.814,00	07.350467	Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	3.817.771.820,00	109.494.994,00
07.419114	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Manokwari Selatan	3.370.189.955,00	07.350467	Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	3.521.614.860,00	(151.424.905,00)
<b>JUMLAH</b>		<b>35.442.189.786,00</b>			<b>35.499.788.241,00</b>	<b>(57.598.455,00)</b>

- Adanya selisih transfer keluar transfer masuk dari Satker Sekretariat Ditjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi (067.08.350458) ke Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (067.07.350467) sebesar (Rp58.394.122,00) berupa rincian sebagai berikut:

*Rincian selisih TKTM Ditjen PPKTrans  
Per 31 Desember 2021*

*(Dalam Rupiah)*

Kode Akun	Uraian Akun	Transfer Keluar	Transfer Masuk	Selisih TKTM
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.686.361.212,00)	(10.722.168.355,00)	35.807.143,00
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(1.185.580.670,00)	(1.362.711.420,00)	177.130.750,00
137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(11.291.654.779,00)	(11.251.323.899,00)	(40.330.880,00)
137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	(1.985.761.825,00)	(1.718.849.273,00)	(266.912.552,00)
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(1.195.141.768,00)	(1.103.646.351,00)	(91.495.417,00)
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	(48.045.559.878,00)	(48.172.966.712,00)	127.406.834,00
<b>JUMLAH</b>		<b>(74.390.060.132,00)</b>	<b>(74.331.666.010,00)</b>	<b>(58.394.122,00)</b>

- Adanya transfer keluar transfer masuk dari satker BPSDM (067.09.350475) ke Sekretariat Jenderal Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi (067.10.350088) sebesar Rp3.559.684,00 berupa akumulasi penyusutan peralatan dan mesin.
- D. Pengesahan Hibah Langsung (391131) sebesar Rp2.314.965.200,00 terdapat pada satker Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan (03.350456) karena adanya penerimaan hibah yang diterima langsung dari United Nations Children's Fund (UNICEF).
- E. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sebesar (Rp706.221.240,00) berasal dari Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang merupakan pengesahan pengembalian sisa hibah UNICEF Tahun 2020 yang belum disahkan. Adapun pengesahan pengembalian hibah langsung sebesar Rp706.221.240,00, terdiri dari:

- SP4HL 80003 sebesar Rp16.861.640,00
- SP4HL 80004 sebesar Rp24.247.000,00
- SP4HL 80005 sebesar Rp24.971.600,00
- SP4HL 80006 sebesar Rp640.141.000,00

Adapun rincian Transaksi Antar Entitas menurut Unit Kerja Eselon I per 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut:

*Rincian Transaksi Antar Entitas Menurut UKE-1  
Per 31 Desember 2021 dan 2020*

*(Dalam Rupiah)*

Kode	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
067.02	Inspektorat Jenderal	33.089.260.077,00	28.007.985.567,00
067.03	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	241.230.124.939,00	1.709.889.021.713,00
067.04	Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	178.442.538.295,00	45.098.421.839,00
067.05	Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu	(13.376.709.558,00)	36.494.367.224,00
067.06	Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	103.306.554.505,00	43.214.349.024,00
067.07	Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	885.017.409.595,00	124.392.346.428,00
067.08	Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi	(496.809.056.391,00)	137.645.756.962,00
067.09	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pemberdayaan Masyarakat Deas, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	1.711.098.121.448,00	142.450.665.362,00
067.10	Sekretariat Jenderal Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi	189.946.776.596,00	164.089.753.646,00
067.11	Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	109.306.346.844,00	-
<b>JUMLAH</b>		<b>2.941.251.366.350,00</b>	<b>2.431.282.667.765,00</b>

### E.5 Ekuitas Akhir

*Ekuitas Akhir  
Rp2.763.006.771.618,00*

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp2.763.006.771.618,00 dan Rp2.739.050.841.674,00.

**F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA****F.1 TINDAK LANJUT TEMUAN BPK-RI**

Rekapitulasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK – RI Tahun 2005 – 2020 sebagai berikut:

NO	Unit Kerja	Rekomendasi Temuan		Tindak Lanjut Sesuai				Tindak Lanjut Belum Sesuai (Sisa)			
		Butir	Rp	Butir	%	Rp	%	Butir	%	Rp	%
<b>A</b>	<b>EKS Trans</b>										
	2005-2015 Eks Trans	318	7.217.422.862,11	141	44,34%	4.919.023.035,55	68,15%	318	100,00%	2.298.399.827,00	31,85%
<b>B</b>	<b>Eks PDT</b>										
	2005-2015 Eks Trans	294	16.804.825.298,75	228	77,55%	15.653.990.500,97	93,15%	294	100,00%	1.150.834.798,00	6,85%
	<b>Total A+B</b>	<b>612</b>	<b>24.022.248.160,86</b>	<b>369</b>	<b>60,29%</b>	<b>20.573.013.536,52</b>	<b>85,64%</b>	<b>612</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.449.234.625,00</b>	<b>14,36%</b>
<b>C</b>	<b>SOTK Lama</b>										
1	Sekretariat Jenderal	88	13.904.707.542,00	45	51,14%	7.759.074.740,00	55,80%	88	100,00%	6.145.632.802,00	44,20%
2	Inspektorat Jenderal	36	820.383.116,00	32	88,89%	786.708.284,00	95,90%	36	100,00%	33.674.832,00	4,10%
3	Balilafro	56	4.402.571.741,00	44	78,57%	3.679.269.481,00	83,57%	56	100,00%	723.302.260,00	16,43%
4	Ditjen PPMD	147	4.659.741.652,00	52	35,37%	2.457.646.416,00	52,74%	147	100,00%	2.202.095.236,00	47,26%
5	Ditjen PKP	174	8.857.404.465,00	59	33,91%	6.433.172.381,00	72,63%	174	100,00%	2.424.232.084,00	27,37%
6	Ditjen PDT	153	22.603.162.239,00	54	35,29%	8.829.688.496,00	39,06%	153	100,00%	13.773.473.743,00	60,94%
7	Ditjen PDTU	112	13.341.887.357,00	56	50,00%	10.600.512.628,00	79,45%	112	100,00%	2.741.374.729,00	20,55%
8	Ditjen PKT	94	3.677.941.044,00	56	59,57%	3.204.861.641,00	87,14%	94	100,00%	473.079.403,00	12,86%
9	Ditjen PKP2T	113	17.454.346.781,00	49	43,36%	11.048.660.658,00	63,30%	113	100,00%	6.405.686.123,00	36,70%
	<b>Total C</b>	<b>973</b>	<b>89.722.145.937,00</b>	<b>447</b>	<b>45,94%</b>	<b>54.799.594.725,00</b>	<b>61,08%</b>	<b>973</b>	<b>100,00%</b>	<b>34.922.551.212,00</b>	<b>38,92%</b>
<b>D</b>	<b>SOTK Baru</b>										
1	Sekretariat Jenderal	16	31.821.833,00	0	0,00%	-	0,00%	16	100,00%	31.821.833,00	100,00%
2	Inspektorat Jenderal	12	-	0	0,00%	-	0,00%	12	100,00%	-	0,00%
3	Ditjen PDP	13	5.572.000,00	0	0,00%	4.922.000,00	88,33%	13	100,00%	650.000,00	11,67%
4	Ditjen PEID	15	15.284.500,00	1	6,67%	12.236.500,00	80,06%	15	100,00%	3.048.000,00	19,94%
5	Ditjen PPDT	14	1.445.000,00	1	7,14%	1.445.000,00	100,00%	14	100,00%	-	0,00%
6	Ditjen PPKT	23	995.477.344,00	0	0,00%	172.105.848,00	17,29%	23	100,00%	823.371.496,00	82,71%
7	BPSDM PM	27	277.916.200,00	1	3,70%	26.690.000,00	9,60%	27	100,00%	251.226.200,00	90,40%
8	BPI	12	36.620.985,00	0	0,00%	15.240.985,00	41,62%	12	100,00%	21.380.000,00	58,38%
	<b>Total D</b>	<b>132</b>	<b>1.364.137.862,00</b>	<b>3</b>	<b>2,27%</b>	<b>232.640.333,00</b>	<b>17,05%</b>	<b>132</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.131.497.529,00</b>	<b>82,95%</b>

Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi menindaklanjuti Eks Kemnakertrans dan Eks Kementerian PDT yang diperkirakan sampai dengan November 2022. Untuk tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI diperkirakan akan selesai sampai dengan Mei 2022.

**F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN****F.2.1. Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN)**

Berikut Rincian PHLN Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi:

LAPORAN PHLN  
KEMENTERIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021

Uraian	Tahun Anggaran 2021			Tahun Anggaran 2020
	Anggaran	Realisasi	Persentase	Realisasi
<b>A. Pendapatan Hibah</b>				
Penerimaan Hibah Luar Negeri (1)	17.780.508.000,00	3.454.200.853,00	19,43%	
<b>Jumlah Pendapatan Hibah</b>	<b>17.780.508.000,00</b>	<b>3.454.200.853,00</b>		
<b>B. Belanja yang Bersumber dari PHLN</b>				
1. Belanja Pegawai (2)				
2. Belanja Barang (3)	244.734.305.000,00	185.090.398.086,00	75,63%	
3. Belanja Modal (4)				
4. Belanja Bantuan Sosial (5)				
5. Belanja Lain-lain (6)				
<b>Jumlah Belanja yang Bersumber dari PHLN</b>	<b>244.734.305.000,00</b>	<b>185.090.398.086,00</b>	<b>75,63%</b>	
<b>C. Surplus (Defisit) Anggaran (A-B)</b>	<b>(226.953.797.000,00)</b>	<b>(181.636.197.233,00)</b>		
<b>D. Pembiayaan</b>				
Penarikan Pinjaman Luar Negeri (7)	226.953.797.000,00	181.636.197.233,00	80,03%	
<b>Jumlah Pembayaran</b>	<b>226.953.797.000,00</b>	<b>181.636.197.233,00</b>		
<b>E. Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran</b>	-	-		

Berikut rincian anggaran dan realisasi PHLN Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi berdasarkan UKE-I:

No	Eselon I	Pinjaman			Hibah			Jumlah		
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
1	PDP	30.000.000.000,00	25.284.906.619,00	84,28%	4.420.508.000,00	3.361.800.853,00	76,05%	34.420.508.000,00	28.646.707.472,00	83,23%
2	PEID	86.953.797.000,00	73.288.862.612,00	84,28%	13.360.000.000,00	92.400.000,00	0,69%	100.313.797.000,00	73.381.262.612,00	73,15%
3	BPSDM	85.000.000.000,00	69.557.820.403,00	81,83%	0,00	0,00	0,00%	85.000.000.000,00	69.557.820.403,00	81,83%
4	Setjen	5.000.000.000,00	4.962.693.324,00	99,25%	0,00	0,00	0,00%	5.000.000.000,00	4.962.693.324,00	99,25%
5	BPI	20.000.000.000,00	8.546.592.055,00	42,73%	0,00	0,00	0,00%	20.000.000.000,00	8.546.592.055,00	42,73%

PHLN Ditjen PDP terbagi menjadi 3 program yaitu *Investing in Nutrition and Early Years (INEY)*, *Third Water Supply and Sanitation for Low Income Communities / Community Baset Water Supply Project (PAMSIMAS)*, dan *Institutional Strengthening for Improved Village Service Delivery Project (P3PD)*.

PHLN Ditjen PEID merupakan PHLN program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD). Pemberi PHLN ini adalah *International Fund For Agricultural Development (IFAD)*. IFAD memberikan dalam bentuk Pinjaman dengan nomor register 1BXM576A dan Hibah dengan nomor register 2JUD5HBA.

PHLN BPSDM, Setjen, dan BPI merupakan Pinjaman World Bank untuk program P3PD dengan Grand ID IBRD No.8941-ID dan nomor register 1CZ6CF2A. Ikhtisar laporan PHLN terlampir.

### **F.2.2. Laporan Stunting Tahun Anggaran 2021**

Program percepatan penurunan stunting pada Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi bersumber dari rupiah murni sebesar Rp444.260.000,00 dan hibah luar negeri sebesar Rp3.626.864.000,00 berikut penjelasannya:

#### 1. Rupiah Murni

Stranas Percepatan Pencegahan *Stunting* mengamanatkan kepada Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi untuk mendorong Dana Desa membiayai kegiatan konvergensi pencegahan *stunting* di Desa. Data Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2021 yang disampaikan oleh Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi meliputi Program/Kegiatan *Konvergensi Pencegahan Stunting* yang ada pada Direktorat Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan di tingkat output dengan Pagu Awal DIPA sebesar Rp5.000.000.000,00. Namun, adanya Pandemi Covid-19 menyebabkan penyesuaian anggaran pada Direktorat Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan, termasuk anggaran percepatan Penurunan *stunting* di Desa mengalami refocusing tahap 1 sesuai DIPA per tanggal 26 Juli 2021 yang semula sebesar Rp5.000.000.000,00 menjadi sebesar Rp1.050.968.000,00. Adanya Peningkatan kasus Pandemi Covid-19 pada awal bulan Agustus Tahun 2021 menyebabkan adanya refocusing tahap 2 sesuai DIPA per tanggal 13 Agustus 2021 yang semula sebesar Rp1.050.968.000,00 menjadi Rp444.260.000,00 dan realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp443.921.469,00 atau sebesar 99,92%. Adanya penyesuaian anggaran tersebut, banyak kegiatan Pelaksanaan Konvergensi Pencegahan Stunting terdampak

penghematan anggaran, sehingga tidak dapat terlaksana pada Tahun 2021, salah satunya kegiatan Sosialisasi Konvergensi Pencegahan Stunting dengan target sasaran kegiatan sebanyak 360 kelompok masyarakat. Hal tersebut sangat berpengaruh pada perubahan yang signifikan capaian target output Kinerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi, sehingga penting dilakukan penyesuaian capaian target output Kinerja Pelaksanaan Konvergensi Pencegahan Stunting.

Data Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2021 setelah refocussing per tanggal 31 Desember 2021 yang disampaikan oleh Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi meliputi Program/Kegiatan Stunting yang ada di Direktorat Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan pada rincian output QDD.001.051 dengan jumlah anggaran sebesar Rp444.260.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp443.921.469,00 atau sebesar 99,92% meliputi kegiatan Konsolidasi Tim Pendamping Pusat Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa dengan alokasi kegiatan sebesar Rp7.200.000,00 dengan capaian realisasi 100%, Pelaksanaan Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa dengan alokasi kegiatan sebesar Rp389.460.000,00 dengan capaian realisasi sebesar Rp389.141.469,00 atau sebesar 99,92% dan Rakor Penyusunan Panduan dan Sosialisasi Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa (Virtual) dengan alokasi kegiatan sebesar Rp47.600.000,00 dengan capaian realisasi sebesar Rp47.580.000,00 atau sebesar 99,96%.

Adapun permasalahan yang mempengaruhi penyerapan realisasi anggaran percepatan Penurunan *stunting* di Desa adalah belum terbitnya rancangan peraturan presiden dan Rencana Aksi Nasional Stranas Penurunan Stunting yang banyak berpengaruh pada strategi penurunan stunting di Desa terutama pada kegiatan merevisi panduan untuk proses penyempurnaan Panduan Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa yang nantinya menjadi acuan Desa dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa) untuk Tahun

2022 dalam penyelenggaraan fasilitasi konvergensi pencegahan Stunting di Desa. Terbitnya Peraturan Presiden 72 Tahun 2021 terkait Percepatan Penurunan Stunting yang baru disahkan pada 13 Agustus 2021 menjadi salah satu kendala pada Direktorat Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan dalam melakukan rangkaian proses revisi, finalisasi dan sosialisasi panduan kepada Desa menjadi terhambat. Cara mengatasi permasalahan tersebut yaitu dengan mengadakan kegiatan secara daring atau *online* webinar serial yang sudah dilakukan dengan mengundang BKKBN yang menjadi *leading sector* stunting dan Direktorat Gizi, Kementerian Kesehatan untuk memberikan review masukan dan tanggapan terhadap revisi panduan dibantu oleh Tenaga Ahli yang direkrut dan dibiayai *World Bank*.

Kegiatan Pelaksanaan Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa terdiri dari:

A. Konsolidasi Tim Pendamping Pusat Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa.

Pelaksanaan kegiatan Konsolidasi Tim Pendamping Pusat (TPP) Konvergensi Pencegahan Stunting dengan alokasi kegiatan sebesar Rp7.200.000,00 dengan capaian realisasi 100%. Pada kegiatan ini yang rencana awalnya adalah pertemuan paket *fullday* yang dilaksanakan selama 1 hari, karena adanya kebijakan dari pemerintah terkait PPKM dan adanya *refocusing*, kegiatan ini hanya dapat dilaksanakan secara daring dan berlangsung 1x pada tanggal 24 Juni 2021 dengan mengundang Tenaga Pendamping Profesional Konvergensi Pencegahan Stunting Pusat dan Daerah di Provinsi dan Kabupaten (sudah dilaksanakan).

B. Pelaksanaan Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa

Alokasi kegiatan Pelaksanaan Konvergensi Pencegahan Stunting sebesar Rp389.460.000,00 dengan capaian realisasi sebesar Rp389.141.469,00 atau sebesar 99,92%.

Untuk mewujudkan terjadinya konvergensi pencegahan Stunting di Desa maka diperlukan koordinasi dan kolaborasi multisektor yang melibatkan Kementerian/Lembaga yang tergabung dalam tim koordinasi pusat konvergensi pencegahan Stunting di Desa untuk mengarahkan berbagai program/kegiatan dalam peningkatan kualitas dan ketersediaan layanan dasar sebagai bentuk intervensi spesifik dan sensitif dalam pencegahan Stunting harus berjalan beriringan serta didukung oleh kesiapan, kepedulian dan kapasitas yang memadai dari masyarakat dan pemerintah desa agar konvergensi pencegahan Stunting di desa dapat berjalan dengan optimal. Oleh karena itu, kegiatan koordinasi tim pusat konvergensi pencegahan stunting di Desa di berikan honor tim yang semula di bayarkan sebanyak 10 (sepuluh) bulan terhitung Maret sampai Desember 2021 karena adanya refocusing menjadi 7 (tujuh) bulan terhitung Bulan Maret sampai September Tahun 2021. Pada kegiatan ini telah terlaksana kegiatan publikasi konvergensi pencegahan Stunting di desa di Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah yang hasilnya berupa video atau konten dari desa yang menjadi role model terkait konvergensi pencegahan Stunting di desa dan pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi untuk mengetahui perkembangan dan progres pada wilayah konvergensi pencegahan Stunting di Desa (sudah dilaksanakan).

#### C. Rakor Penyusunan Panduan dan Sosialisasi Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa (Virtual)

Alokasi kegiatan Rakor Penyusunan Panduan dan Sosialisasi Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa (Virtual) sebesar Rp47.600.000,00 dengan capaian realisasi sebesar Rp47.580.000,00 atau sebesar 99,96%. Rakor Penyusunan Panduan Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa sudah dilakukan secara daring dengan melaksanakan webinar sebanyak 4 kali untuk

mendapatkan masukan dari berbagai multi sektor dengan melibatkan kementerian/lembaga lintas K/L.

## 2. Hibah Luar Negeri

Program Investing In Nutrition Early Years (INEY) memfasilitasi desa dalam mendukung pelaksanaan intervensi sensitif dan intervensi spesifikasi serta terjadinya konvergensi pencegahan stunting di tingkat desa.

Pada Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting, Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi mendapatkan tugas untuk memfasilitasi konvergensi pencegahan stunting di Desa. Fasilitasi yang dilakukan diharapkan dapat mencapai beberapa hal berikut:

- 90% Desa mengalokasikan Dana Desa untuk kegiatan pencegahan stunting.
- 80% Desa melakukan konvergensi pencegahan stunting.
- 80% Kader Pembangunan Manusia (KPM) mendapatkan pelatihan atau bimbingan teknis oleh Kabupaten.
- Setiap tahun menerbitkan peraturan yang mengatur pelaksanaan konvergensi pencegahan stunting di Desa.

Sebagai wujud pelaksanaan tugas Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi dalam memfasilitasi konvergensi pencegahan stunting di Desa dengan mendapat dukungan dari INEY Program, diperlukan unit khusus untuk membantu Kementerian dalam melakukan fasilitasi program baik di tingkat pusat maupun desa.

Tujuan Program *Investing In Nutrition Early Years (INEY)* adalah:

- a) Secara rutin akan memberikan data perkembangan pelaksanaan dan hasil konvergensi di Desa guna mendukung Kementerian/Lembaga lainnya didalam Menyusun rencana dan mengembangkan strategi implementasi program.
- b) Memfasilitasi Pemerintah Desa dan mengorganisir masyarakat Desa guna mendukung proses pelaksanaan program yang dikembangkan oleh semua stakeholder.

Kegiatan utama *Investing In Nutrition Early Years (INEY)* mencakup: a) Mengoperasikan aplikasi eHDW dan dashboard kabupaten; b) Mengembangkan model fasilitasi desa merah stunting dan advokasi kebijakan; dan c) Penguatan literasi Desa tentang pencegahan stunting serta d) Diseminasi kebijakan dan pembimbingan. Pelaksanaan kegiatan utama sebagaimana dimaksud dilakukan dengan menerapkan pendekatan desentralisasi-asimetris melalui metode *benchmarking*.

Mekanisme Program *Investing In Nutrition Early Years (INEY)* terdiri dari beberapa kegiatan yaitu :

1. Penyempurnaan Aplikasi e-HDW berbasis Android dan Pengembangan Aplikasi e-HDW berbasis Web;
2. Bimbingan Teknis Tenaga Pendamping Profesional;
3. Penyusunan Modul dan Media Pembelajaran Daring;
4. Dukungan Manajemen (Kontrak Individual dan Biaya Tambahan Kegiatan *Investing In Nutrition Early Years (INEY)* PIU Direktorat Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan – Ditjen PDP).

Alokasi dan realisasi anggaran *Investing In Nutrition Early Years (INEY)* PIU Direktorat pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan Tahun Anggaran 2021 pada RO 6468.BDC.003 (Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan stunting (INEY) sebesar Rp3.626.864.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp2.948.139.026,00 atau 81,30% Triwulan IV per tanggal 31 Desember 2021, meliputi Belanja Bahan sebesar Rp91.083.000,00 atau 67,24%, Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi sebesar Rp8.800.000,00 atau 25,31% Jasa Konsultan sebesar sebesar Rp774.418.182,00 atau 72,10%, Belanja Sewa sebesar Rp89.525.000,00 atau 90,93%, Belanja Jasa Profesi sebesar Rp69.400.000,00 (pengembalian ke Kas Negara sebesar Rp1.800.000,00) menjadi sebesar Rp67.600.000 atau 39,79%, Belanja Jasa Lainnya sebesar Rp1.041.771.226 atau 92,22%, Belanja Perjalanan Biasa sebesar Rp558.316.618,00 pengembalian

ke Kas Negara sebesar Rp14.209.515) menjadi sebesar Rp544.107.103,00 atau 97,11%, Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota sebesar Rp195.221.000,00 atau 70,92%, Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota sebesar Rp119.544.000,00 pengembalian ke Kas Negara sebesar Rp27.095.356,00) menjadi sebesar Rp92.448.644,00 atau 62,89%.

Anggaran hibah INEY masuk DIPA pada bulan Juli 2021 sehingga adanya kendala dalam pelaksanaan kegiatan karena terbatasnya waktu. Keterbatasan pelaksanaan kontrak dengan pihak ketiga, khususnya pada kegiatan yang menggunakan metode lelang seleksi dengan proses yang panjang.

Adapun Laporan Anggaran dan Realisasi Program Percepatan Penurunan *Stunting* pada Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

**Laporan Anggaran dan Realisasi Program Percepatan *Stunting* Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi TA. 2021**

(Dalam Rupiah)

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REFOCUSING	REALISASI	%
6468.Q DD.001	Desa yang Mendapatkan Penanganan Konvergensi <i>Stunting</i>	5.000.000.000	444.260.000	443.921.469	99,92%
051	Pelaksanaan Konvergensi Pencegahan <i>Stunting</i> di Desa	5.000.000.000	444.260.000	443.921.469	99,92%
A	Konsolidasi Tim Pendamping Pusat Konvergensi Pencegahan <i>Stunting</i> di Desa	80.390.000	7.200.000	7.200.000	100,00%
	522151-Belanja Jasa Profesi		7.200.000	7.200.000	
B	Pelaksanaan Konvergensi Pencegahan <i>Stunting</i> di Desa	1.082.830.000	389.460.000	389.141.469	99,92%
	521213-Belanja Honor Output Kegiatan		91.800.000	91.800.000	
	522191-Belanja Jasa Lainnya		135.000.000	135.000.000	
	522192-Belanja Jasa-Penanganan Pandemi Covid-19		4.800.000	4.769.797	
	524111-Belanja Perjalanan Dinas Biasa		157.860.000	157.571.672	
C	Sosialisasi Konvergensi Pencegahan <i>Stunting</i> di Desa	2.441.200.000	0	0	0
D	Rakor Tim Koordinasi Konvergensi Pencegahan <i>Stunting</i> di Desa	356.480.000	0	0	0
E	Rakor Konvergensi Pencegahan <i>Stunting</i> di Desa	845.400.000	0	0	0

		<b>F</b>	<b>Rakor Penyusunan Panduan dan Sosialisasi Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa (Virtual)</b>	<b>193.700.000</b>	<b>47.600.000</b>	<b>47.580.000</b>	<b>99,96%</b>
			521211-Belanja Bahan		1.800.000	1.780.000	
			522151-Belanja Jasa Profesi		45.800.000	45.800.000	
<b>6468.B DC.003</b>			<b>Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan stunting (INEY)</b>	<b>-</b>	<b>3.626.864.000</b>	<b>2.905.034.155</b>	<b>80,10%</b>
	<b>051</b>		<b>Pelaksanaan Program Investing in Nutrition and Early Years (INEY)</b>	<b>-</b>	<b>3.626.864.000</b>	<b>2.905.034.155</b>	<b>80,10%</b>
		<b>A</b>	<b>Pelaksanaan Pencegahan Stunting (INEY)</b>	<b>-</b>	<b>1.558.243.000</b>	<b>1.204.964.408</b>	<b>77,33%</b>
			522131-Belanja Jasa Konsultan		614.130.000	337.418.182	
			522191-Belanja Jasa Lainnya		944.113.000	867.546.226	
		<b>B</b>	<b>Dukungan Sekretariat PIU INEY</b>	<b>-</b>	<b>2.068.621.000</b>	<b>1.700.069.747</b>	<b>82,18%</b>
			521131 - Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID - 19		1.750.000	-	
			521211-Belanj Bahan		135.453.000	91.083.000	
			521811-Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi		35.000.000	8.860.000	
			522131- Belanja Jasa Konsultan		460.000.000	437.000.000	
			522141- Belanja Sewa		98.450.000	89.525.000	
			522151-Belanja Jasa Profesi		169.900.000	67.600.000	
			522191-Belanja Jasa Lainnya		185.500.000	174.225.000	
			524111-Belanja Perjalanan Dinas Biasa		560.298.000	544.107.103	
			524114-Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota		275.270.000	195.221.000	
			524119-Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota		147.000.000	92.448.644	
			<b>TOTAL</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>4.071.124.000</b>	<b>3.348.955.624</b>	<b>82,26%</b>

\*Note: Pada 6468.QDD.001 adanya Pemotongan DIPA Tahap 2 untuk Penanganan Covid-19 per tanggal 13 Agustus 2021

### F.2.3. Informasi Data Tuntutan Hukum/Gugatan Hukum Kepada Pemerintah Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Tahun 2021

Berdasarkan Surat Sekretariat Jenderal Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi kepada Inspektorat Jenderal Nomor: 148/HK.11.02/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 perihal Informasi Data Tuntutan Hukum/Gugatan Hukum Kepada Pemerintah Yang telah Berkekuatan Hukum tetap Tahun 2020 yang kemudian ditindaklanjuti oleh Inspektorat Jenderal dengan menerbitkan surat Nomor 146/KU.06.01/III/2021

tanggal 18 Maret 2021 kepada Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Eks Ditjen PDT) perihal Hasil Koordinasi dengan Tim BPK RI, salah satu hal yang diinstruksikan kepada Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal adalah untuk mengungkapkan gugatan perbuatan melanggar hukum penyelenggara negara dalam hal pelaksanaan ganti rugi harta benda materil dan imateril pasca kerusuhan Maluku/Maluku Utara Tahun 1999 yang telah berkekuatan hukum tetap.

Perkara yang menjadi perhatian adalah Perkara: 1950K/PDT/2016Jo.Nomor:318/Pdt.G.Class.Action/2011/PNJ kt.Pst yakni tuntutan Gugatan Class Action, Sdr. Hibani dkk yang memberikan kuasanya kepada Syamsuri Launa dkk, mewakili kelompok sebanyak 213.217 (dua ratus tiga belas ribu dua ratus tujuh belas) KK yang mengalami kerugian akibat kerusuhan Maluku-Maluku Utara Tahun 1999, dimana saat ini Kementerian Sosial akan membentuk Tim Panel yang akan membahas mekanisme pembayaran ganti rugi tersebut, sebagaimana amar Putusan.

Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dalam hal ini belum bisa mengakui tuntutan ganti rugi tersebut di Laporan Keuangan Tahun 2021 dikarenakan besaran nominal ganti rugi yang harus ditanggung oleh Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi yang dalam hal ini didelegasikan kepada Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal masih menunggu hasil pembahasan Tim Panel Kementerian Sosial.

#### **F.2.4. Prioritas Nasional**

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2020 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021, pada Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada Prioritas Nasional I, II, V, dan VI.

Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran, Target dan

Realisasi Output dari masing-masing Prioritas Nasional adalah sebagai berikut:

1. PN I : Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.

Pagu Anggaran PN I adalah Rp739.568.000,00 dan total realisasi sebesar Rp736.026.452,00. Berikut rincian Program Prioritas Nasional pada masing-masing UKE I:

No	UKE I	Pagu	Realisasi	%
1	DITJEN PEID	739.568.000,00	736.026.452,00	99,52%
Jumlah		739.568.000,00	736.026.452,00	99,52%

2. PN II : Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.

Pagu Anggaran PN II adalah Rp2.214.425.536.052,00 dan total realisasi sebesar Rp2.120.774.712.996,00. Berikut rincian Program Prioritas Nasional pada masing-masing UKE I:

I:

No	UKE I	Pagu	Realisasi	%
1	DITJEN PDP	1.699.202.926.000,00	1.673.386.342.558,00	98,48%
2	DITJEN PEID	150.106.609.000,00	125.143.314.761,00	83,37%
3	DITJEN PPDT	13.400.575.000,00	12.999.259.953,00	97,01%
4	DITJEN PPKTRANS	229.433.580.052,00	214.652.610.260,00	93,56%
5	BPSDM	75.000.000.000,00	59.917.434.085,00	79,89%
6	SETJEN	5.000.000.000,00	4.958.015.544,00	99,16%
7	BPI	42.281.846.000,00	29.717.735.835,00	70,28%
Jumlah		2.214.425.536.052,00	2.120.774.712.996,00	95,77%

3. PN V : Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.

Pagu Anggaran PN V adalah Rp10.000.000.000,00 dan total realisasi sebesar Rp9.640.386.318,00. Berikut rincian Program Prioritas Nasional pada masing-masing UKE I:

No	UKE I	Pagu	Realisasi	%
1	BPSDM	10.000.000.000,00	9.640.386.318,00	96,40%
Jumlah		10.000.000.000,00	9.640.386.318,00	96,40%

4. PN VI : Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.

Pagu Anggaran PN V adalah Rp23.505.007.000,00 dan total realisasi sebesar Rp23.472.597.739,00. Berikut rincian Program Prioritas Nasional pada masing-masing UKE I:

No	UKE I	Pagu	Realisasi	%
1	DITJEN PDP	226.597.000,00	226.596.300,00	100,00%
2	DITJEN PPDT	23.278.410.000,00	23.246.001.439,00	99,86%
Jumlah		23.505.007.000,00	23.472.597.739,00	99,86%

#### **F.2.5. Penanganan Pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN)**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Program Pemulihan Ekonomi Nasional (Program PEN), Program PEN adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan ekonomi nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi Covid-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.

Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi terdapat program PEN pada sektor Dukungan Sektor K/L dengan program sebagai berikut:

- a. Desa Wisata dengan kegiatan Pengembangan Objek Wisata Mendukung Destinasi Super Prioritas dan Pengembangan Amenitas Wisata di Daerah Tertinggal mendukung Destinasi Super Prioritas. Program ini dilaksanakan oleh Ditjen PDP dengan pagu anggaran Rp49.000.000,00;
- b. Rehabilitasi Mangrove dengan kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat dan Konservasi Kawasan atau Rehabilitasi Ekosistem (Pembibitan/Persemaian *Mangrove* dan Penanaman/Rehabilitasi *Mengrove*). Program ini dilaksanakan oleh Ditjen PPDT dengan pagu anggaran Rp23.278.410,00 yang merupakan tambahan anggaran atau pergeseran anggaran dari BA-BUN sesuai surat

Menteri Keuangan No. S-36/MK.2/2021 perihal Penetapan Satuan Anggaran Bagian Anggaran dari BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya BA Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi untuk Rehabilitasi Lahan *Mangrove*

- c. Ketahanan Pangan dengan kegiatan Rencana Perwujudan Kawasan Transmigrasi, Perpindahan Penempatan Transmigrasi, Mediasi dan Kerjasama antar Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Transmigrasi, Bantuan Sarana Produksi Pertanian, Bantuan Sarana Prasarana Utilitas yang dibangun dan ditingkatkan di Kawasan Transmigrasi. Program ini dilaksanakan oleh Ditjen PPKTrans dengan pagu anggaran Rp146.391.179.000,00.

Berikut besaran alokasi anggaran dan realisasi terkait program PEN:

Program	Pagu Anggaran	Realisasi	%	Target Output	Capaian Output	%
Desa Wisata	49.000.000.000,00	48.878.617.670,00	99,75%	96 Unit	96 Unit	100%
Rehabilitasi Mangrove	23.278.410.000,00	23.246.001.439,00	99,86%	1600 org & 500 Hektar	1600 org & 500 Hektar	100%
Ketahanan Pangan	146.391.179.000,00	105.918.937.082,00	72,35%	532 NSPK/Keluarga	257 NSPK/Keluarga	48,31%
<b>Jumlah</b>	<b>218.669.589.000,00</b>	<b>178.043.556.191,00</b>	<b>81,42%</b>			

Berikut besaran alokasi anggaran dan realisasi program PEN menurut jenis belanja:

Program	Pagu Anggaran		Realisasi	
	Belanja Barang	Belanja Modal	Belanja Barang	Belanja Modal
Desa Wisata	49.000.000.000,00	-	48.878.617.670,00	-
Rehabilitasi Mangrove	23.278.410.000,00	-	23.246.001.439,00	-
Ketahanan Pangan	137.014.054.000,00	9.377.125.000,00	99.451.084.571,00	6.467.852.511,00
<b>Jumlah</b>	<b>209.292.464.000,00</b>	<b>9.377.125.000,00</b>	<b>171.575.703.680,00</b>	<b>6.467.852.511,00</b>

Berikut pagu anggaran dan dan realisasi program PEN menurut jenis akun:

<b>A. Menggunakan Akun khusus Covid-19</b>			
<b>Akun</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
521131	268.038.000,00	265.256.344,00	98,96%
521241	108.816.959.000,00	79.227.581.848,00	72,81%
522192	9.258.811.000,00	6.757.488.434,00	72,98%
524115	6.490.502.000,00	5.776.358.713,00	89,00%
526132	2.107.730.000,00	1.673.279.500,00	79,39%
526321	18.008.690.000,00	18.008.690.000,00	100,00%
526322	4.483.301.000,00	876.970.456,00	19,56%
536118	9.377.125.000,00	6.467.852.511,00	68,97%
<b>Jumlah A</b>	<b>158.811.156.000,00</b>	<b>119.053.477.806,00</b>	<b>74,97%</b>
<b>B. Tidak Menggunakan Akun khusus Covid-19</b>			
<b>Akun</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
521211	4.530.597.000,00	4.324.273.250,00	95,45%
522121	500.000,00	279.550,00	55,91%
522191	1.201.655.000,00	1.194.167.118,00	99,38%
524114	1.256.924.000,00	1.246.410.000,00	99,16%
526123	33.816.687.000,00	33.774.886.169,00	99,88%
526124	9.700.078.000,00	9.700.076.831,00	100,00%
522151	1.009.100.000,00	975.700.000,00	96,69%
524111	1.615.829.000,00	1.216.331.739,00	75,28%
524119	1.816.610.000,00	1.773.571.668,00	97,63%
521213	834.050.000,00	817.680.000,00	98,04%
522131	90.000.000,00	89.900.000,00	99,89%
526113	2.643.449.000,00	2.584.497.360,00	97,77%
521219	827.366.000,00	778.106.000,00	94,05%
522141	223.450.000,00	222.427.500,00	99,54%
526112	292.138.000,00	291.771.200,00	99,87%
<b>Jumlah B</b>	<b>59.858.433.000,00</b>	<b>58.990.078.385,00</b>	<b>98,55%</b>
<b>Jumlah A+B</b>	<b>218.669.589.000,00</b>	<b>178.043.556.191,00</b>	<b>81,42%</b>

Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi mengalokasikan anggaran untuk Penanganan Pandemi Covid di lingkungan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi (Non PEN). Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penanganan pandemic covid-19 berupa pengadaan masker, *handsanitizer*, pembelian vitamin, penyemprotan disinfektan, pembayaran aplikasi *zoom meeting*, jasa *Swab Test*. Penanganan pandemi covid di Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi seluruhnya menggunakan akun khusus belanja penanganan Pandemi Covid-19 dengan rincian sebagai berikut:

<b>A. Menggunakan Akun khusus Covid-19</b>			
<b>Akun</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
521131	10.140.773.000,00	9.406.143.643,00	92,76%
521241	2.168.398.000,00	2.039.858.057,00	94,07%
521841	208.505.000,00	206.677.620,00	99,12%
522192	13.742.475.000,00	10.153.604.458,00	73,88%
524115	115.250.000,00	115.244.257,00	100,00%
<b>Jumlah A</b>	<b>26.375.401.000,00</b>	<b>21.921.528.035,00</b>	<b>83,11%</b>
<b>B. Tidak Menggunakan Akun khusus Covid-19</b>			
<b>Akun</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
-	-	-	-
<b>Jumlah B</b>	-	-	-
<b>Jumlah A+B</b>	<b>26.375.401.000,00</b>	<b>21.921.528.035,00</b>	<b>83,11%</b>

### F.2.6. Jurnal Koreksi

Berdasarkan hasil Nota Kesepakatan Final (NKF) pertemuan tiga pihak/tripartit antara Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, Kementerian Keuangan, dan Badan Pemeriksa Keuangan dalam rangka penetapan asersi final Laporan Keuangan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi disepakati terdapat 141 jurnal koreksi. Jurnal koreksi tersebut terdiri dari jurnal koreksi usulan satker dan jurnal usulan koreksi BPK, jurnal likuidasi satker inaktif bersaldo, jurnal akibat update aplikasi persediaan dan SIMAK BMN.

#### a. Jurnal usulan satker dan usulan BPK

Terdapat 37 jurnal usulan satker dan BPK terdiri dari

- Ditjen PDP terdapat 6 jurnal yang terdiri dari jurnal koreksi terkait mencatat pengakuan sisa kas pada rekening Koran per 31 Desember 2021, jurnal transfer keluar pada satker inaktif di tahun 2022, dan jurnal transfer masuk di Satker pusat menampung saldo satker inaktif di tahun 2022; (Rincian terlampir)
- Ditjen PEID terdapat 3 jurnal yaitu jurnal mencatat pengakuan kas karena masih terdapat saldo di rekening Koran per 31 Desember 2021; (Rincian terlampir)
- BPSDM terdapat 4 jurnal koreksi yaitu jurnal mencatat pengakuan akrual beban listrik dan telepon pemakaian bulan Desember 2021 yang dibayarkan bulan Januari dan jurnal beban penyusutan tertinggal di tahun 2021; (Rincian terlampir)

- Setjen terdapat 5 jurnal yang terdiri dari jurnal mencatat piutang atas penerimaan PNBP sewa bangunan, jurnal penyisihan piutang, jurnal mencatat pengakuan akrual beban listrik, air, dan telepon pemakaian bulan Desember 2021 yang dibayarkan bulan Januari, jurnal penghapusan BMN kendaraan mobil, serta jurnal koreksi nilai persediaan hasil *stock opname*; (Rincian terlampir)
- Ditjen PPKTrans terdapat 19 jurnal yang terdiri dari jurnal mencatat koreksi persediaan ke aset tetap (terhadap KDP) akibat pembangunan awal akun 53 yang dilanjutkan 526, jurnal mencatat koreksi atas kesalahan penggunaan akun belanja barang non operasional yang seharusnya 526 karena membentuk aset yang diserahkan masyarakat, jurnal penyisihan piutang, mencatat pembayaran utang sisa pekerjaan 526, jurnal mencatat koreksi atas kesalahan pencatatan penyetoran piutang TGR. (Rincian terlampir)

b. Jurnal akibat update aplikasi

Terdapat 33 jurnal dampak *update* aplikasi Persediaan dan SIMAK BMN versi terbaru terdapat pada UKE-1 Itjen, Ditjen PPDT, BPSDM, SETJEN, BPI, Ditjen PPKTrans, ex-Ditjen PKTrans. (Rincian terlampir)

c. Jurnal Likuidasi

Terdapat 71 jurnal likuidasi yang terdiri dari 70 jurnal likuidasi transfer keluar satker inaktif bersaldo, dan 1 jurnal transfer masuk satker Ditjen PPKTrans sebagai satker yang ditunjuk untuk menampung proses likuidasi satker inaktif. (Rincian terlampir)

### **F.3 KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA**

Berdasarkan hasil koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan rekomendasi BPK RI, Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi melakukan pengambilan data monitoring e-Rekon&LK per tanggal 26 April 2022 dimana tanggal

pengambilan data tersebut terdapat perbedaan dengan tanggal pengambilan data *Face* Laporan Keuangan secara keseluruhan yang diambil per tanggal 23 April 2022. Perbedaan tersebut dikarenakan masih terdapat proses OLAP e-Rekon&LK yang terlambat sebagai akibat dari *update* aplikasi Persediaan, SIMAK-BMN, dan SAIBA. Namun demikian, data *Face* Laporan Keuangan tidak terdapat perbedaan antara data per tanggal 23 April 2022 dan 26 April 2022.

#### **TDK Rekonsiliasi Internal BMN**

TDK rekonsiliasi internal BMN Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi per 31 Desember 2021 terdapat TDK Aset Tetap dengan nilai netto (Rp374.858.907,00) dan nilai absolut Rp1.189.231.207,00. TDK Aset Lainnya dengan nilai netto Rp0,00 dan nilai absolut Rp196.124.800,00. Penjelasan TDK rekonsiliasi internal BMN tersebut secara aplikasi SIMAK dan SAIBA tidak ada perbedaan nilai namun di *e-rekon* masih terdapat selisih tersebut. (Rincian terlampir).

#### **Transfer Keluar / Masuk**

Transfer Keluar / Masuk Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi per 31 Desember 2021 terdapat 33 jumlah baris beda dengan nilai netto beda sebesar (Rp112.432.893,00) dan nilai Absolut beda sebesar Rp47.244.723.861,00. (Rincian Terlampir).

#### **Saldo Tidak Normal**

Saldo tidak normal Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi per 31 Desember 2021 terdapat 8 jumlah baris dengan nilai absolut Rp18.110.620.627,00. (Rincian Terlampir).

#### **Saldo Satker Inaktif**

Saldo Satker Inaktif Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi per 31 Desember 2021 terdapat 83 jumlah baris beda dengan nilai netto beda sebesar Rp106.351.321.390,00 dan nilai Absolut beda sebesar Rp836.545.839.070,00. (Rincian Terlampir).

**Nilai Perolehan Minus**

Nilai Perolehan Minus Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi per 31 Desember 2021 terdapat jumlah baris 1 dan nilai Rph Perolehan Aset (Rp149.339.130,00). (Rincian Terlampir).

**Nilai Buku Minus**

Nilai Buku Minus Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi per 31 Desember 2021 terdapat jumlah baris 88 dan nilai Rph Buku (Rp41.194.001.091,00). (Rincian Terlampir).

**Rekon SP2D Belanja Modal**

Rekon SP2D Belanja Modal Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi per 31 Desember 2021 terdapat 4 jumlah baris beda dengan nilai Absolut beda sebesar Rp302.264.248.00. (Rincian Terlampir).

**Rekon GL Vs BMN**

Rekon GL Vs BMN Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi per 31 Desember 2021 terdapat 20 jumlah baris beda dengan nilai Netto beda sebesar (Rp104.079.720.489,00) dan nilai Absolut beda sebesar Rp117.064.815.511,00. (Rincian Terlampir).